



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 045 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Klasifikasi Arsip;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;

4. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan;

5. Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. [Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Kearsipan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
11. [Peraturan Wali Kota Nomor 1399 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam ...

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau menerus.
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
10. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai

kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis.

12. Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian Arsip Dinamis dan Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi: penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan dan pendayagunaan.
13. Penyimpanan Arsip adalah proses dan tata cara penempatan arsip pada tempat penyimpanan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip.

BAB III
KLASIFIKASI ARSIP, KODE KLASIFIKASI ARSIP, DAN
PENGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
Bagian Kesatu
Klasifikasi Arsip
Pasal 3

- (1) Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota dikelompokkan kedalam Klasifikasi Arsip berdasar:
 - a. Fungsi dan/atau Urusan adalah bentuk penyebaran urusan tertentu kepada unit kerja dan/atau satuan kerja dan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai tanggung jawabnya baik fungsi substantif maupun fungsi fasilitatif;
 - b. Kegiatan ...

- b. Kegiatan adalah jenis-jenis aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan salah satu fungsi organisasi/instansi; dan
 - c. Transaksi adalah kesepakatan para pihak dalam komunikasi kedinasan atas sesuatu obyek yang bersifat spesifik.
- (2) Uraian mengenai pengelompokan Arsip berdasarkan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Kode Klasifikasi Arsip

Pasal 4

- (1) Kode klasifikasi menggunakan kombinasi huruf dan angka.
- (2) Kode huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menggambarkan urusan.
- (3) Kode angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk fungsi, kegiatan, dan transaksi pada masing-masing urusan.
- (4) Uraian mengenai kode klasifikasi arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kode Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Setiap Arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan menggunakan kode klasifikasi berdasarkan fungsi, kegiatan dan transaksinya.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pemberkasan, pembuatan daftar arsip aktif, inaktif, statis, dan pembuatan daftar arsip usul pindah, usul serah, dan usul musnah.
- (3) Ketentuan mengenai cara penggunaan kode klasifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 045 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 September 2019

Kode Klasifikasi Arsip menggunakan Hurup dan Angka

A. Urusan dan Susunan Pola Klasifikasi:

Fasilitatif:

| | |
|----|--|
| HM | Hubungan Masyarakat |
| HK | Hukum |
| KP | Kepegawaian |
| RT | Kerumahtanggaan |
| TU | Ketatausahaan |
| KU | Keuangan |
| TL | Organisasi dan Tata Laksana |
| PU | Pekerjaan Umum |
| PP | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| PW | Pengawasan |
| KD | Perlengkapan, Peralatan, dan Kekayaan Daerah |

Substantif:

| | |
|----|--|
| KK | Keamanan dan Ketertiban |
| AR | Kearsipan |
| KB | Keluarga Berencana |
| KS | Kesehatan |
| KT | Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| KI | Komunikasi dan Informatika |
| KM | Koperasi dan UKM |
| LH | Lingkungan Hidup |
| PE | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| PA | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| PD | Pemerintahan Daerah |
| PO | Pemuda dan Olahraga |
| PM | Penanaman Modal |
| PB | Penanggulangan Bencana |
| PK | Pendidikan dan Kebudayaan |
| PG | Perdagangan |
| PN | Perencanaan dan Pembangunan |
| HB | Perhubungan |
| PI | Perindustrian |

| | |
|----|--------------|
| PS | Perpustakaan |
| SN | Persandian |
| IK | Perikanan |
| TN | Pertanian |

Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah per urusan, diperlukan kode dan singkatan nama komponen untuk Pemerintahan Daerah Kota diatur sebagai berikut:

| | |
|---|---------------|
| Sekretariat Daerah Kota Bandung | Setda |
| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | As.I |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan | As.II |
| Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian | As.III |
| Sekretariat DPRD Kota Bandung | Setwan |
| Inspektorat Kota Bandung | Inspektorat |
| Satuan Polisi Pamong Praja | SatpolPP |
| Dinas Pendidikan Kota Bandung | Disdik |
| Dinas Kesehatan Kota Bandung | Dinkes |
| Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung | DPU |
| Dinas Penataan Ruang Kota Bandung | Distaru |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung | DPKP3 |
| Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung | Dinsosnangkis |
| Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung | Disnaker |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung | DP3APM |
| Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung | DPPKB |
| Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung | Dispangtan |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung | DLHK |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung | Disdukcapil |
| Dinas Perhubungan Kota Bandung | Dishub |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung | Diskominfo |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung | DKUMKM |
| Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung | Disdagin |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung | DPMPTSP |
| Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung | Dispora |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung | Disbudpar |

| | |
|---|--------------|
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung | Dispusip |
| Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung | DiskarPB |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung | Bappelitbang |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung | BKPP |
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung | BPKA |
| Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung | BKPD |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung | Kesbangpol |

B. Perincian Kode Klasifikasi dan Indeks Kaitan

| | | |
|----|---------------------|--|
| HM | Hubungan Masyarakat | |
| | 01 | Penerangan dan Publikasi |
| | 02 | Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> |
| | 03 | Hubungan Antar Lembaga |
| | 01 | Forkompimda |
| | 02 | Organisasi Kearsipan Nasional dan Internasional |
| | 03 | Instansi Vertikal |
| | 04 | Organisasi Kemasyarakatan |
| | 05 | Perguruan Tinggi/Sekolah |
| | 06 | Partai Politik |
| | 07 | Swasta |
| | 08 | Bakohumas |
| | 04 | Keprotokolan |
| | 01 | Upacara/Acara Kedinasan |
| | 02 | Kunjungan |
| | 03 | Agenda Pimpinan |
| | 05 | Dokumentasi dan Penerbitan |
| | 06 | Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan |
| | 07 | Ucapan |
| | 08 | Dokumen <i>Hosting</i> |
| HK | Hukum | |
| | 01 | Program Pembentukan Peraturan Daerah |
| | 01 | Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah |
| | 02 | Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah |
| | 02 | Produk Hukum |
| | 01 | Proses Penyusunan Peraturan Daerah |
| | 02 | Proses Penyusunan Peraturan Wali Kota |

| | | |
|----|-------------|---|
| | 03 | Proses Penyusunan Keputusan Wali Kota |
| | 03 | Perjanjian Kerja Sama |
| | 01 | Kerja Sama Dalam Negeri |
| | 02 | Kerja Sama Luar Negeri |
| | 04 | Bantuan Hukum |
| | 01 | Bantuan Hukum Kasus Perdata |
| | 02 | Bantuan Hukum Kasus Pidana |
| | 03 | Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara |
| | 05 | Telaah Hukum |
| | 01 | Telaah Hukum Internal |
| | 02 | Telaah Hukum Eksternal |
| | 06 | Sosialisasi Hukum |
| | 07 | Dokumentasi Hukum |
| | 01 | Kegiatan Pengembangan Dokumentasi Hukum |
| | 02 | Data Base Dokumentasi Hukum |
| | 08 | Hak Atas Kekayaan Intelektual |
| | 09 | Penegakan Hukum |
| | 01 | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| | 02 | Tindak Lanjut Kegiatan Penegakan Hukum |
| | 10 | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| | 01 | Program Pengembangan PPNS |
| | 02 | Pembinaan PPNS |
| KP | Kepegawaian | |
| | 01 | Persediaan Pegawai |
| | 02 | Formasi Pegawai |
| | 01 | Usulan Unit Kerja |
| | 02 | Usulan Formasi |
| | 03 | Persetujuan/Penetapan Formasi |
| | 04 | Penetapan Formasi Khusus |
| | 03 | Pengadaan Formasi |
| | 01 | Penerimaan |
| | 02 | Pengangkatan CPNS dan PNS |
| | 03 | Prajabatan |
| | 04 | Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan |
| | 01 | Ujian Penyesuaian Ijazah |
| | 02 | Ujian Dinas |

| | | |
|--|----|--|
| | 05 | Ujian Kompetensi |
| | 01 | <i>Assessment Test</i> Pegawai |
| | 02 | <i>Talent Mapping</i> /Pemetaan Pegawai |
| | 06 | Mutasi |
| | 01 | Kenaikan Pangkat/Golongan |
| | 02 | Kenaikan Gaji Berkala |
| | 03 | Penyesuaian Masa Kerja |
| | 04 | Penyesuaian Tunjangan Keluarga |
| | 05 | Penyesuaian Kelas Jabatan |
| | 06 | Alih Tugas |
| | 07 | Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan |
| | 01 | Pengangkatan Jabatan |
| | 02 | Pemberhentian Jabatan Struktural |
| | 08 | Pendelegasian Wewenang |
| | 01 | Penjabat (Pj) |
| | 02 | Pelaksana Tugas (Plt) |
| | 03 | Pelaksana Harian (Plh) |
| | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai |
| | 01 | Program Diploma |
| | 02 | Program Sarjana |
| | 03 | Program Pasca Sarjana |
| | 04 | Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan |
| | 05 | Kursus/Diklat Fungsional |
| | 06 | Kurus/Diklat Teknis |
| | 07 | Orientasi CPNS |
| | 10 | Administrasi Pegawai |
| | 01 | Data/Keterangan Pegawai |
| | 02 | Kartu Pegawai |
| | 03 | Karis/Karsu |
| | 04 | Kartu Taspen |
| | 05 | Kartu Jaminan Kesehatan |
| | 06 | Tanda Jasa |
| | 07 | Keterangan Penerimaan Pembiayaan Penghasilan Pegawai (KP4) |
| | 08 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) |
| | 09 | Tunjangan Kinerja dan Uang Makan |

| | | |
|--|----|--|
| | 11 | Cuti Pegawai |
| | 01 | Cuti Tahunan |
| | 02 | Cuti Besar |
| | 03 | Cuti Sakit |
| | 04 | Cuti Bersalin |
| | 05 | Cuti Karena Alasan Penting |
| | 06 | Cuti di Luar Tanggungan Negara |
| | 12 | Pembinaan Pegawai |
| | 01 | Penilaian Prestasi Kerja |
| | 02 | Sasaran Kerja Pegawai |
| | 03 | Pembinaan Mental |
| | 04 | Hukuman Disiplin |
| | 13 | Pembinaan Jabatan Fungsional |
| | 01 | Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu |
| | 02 | Kenaikan Jenjang Jabatan |
| | 03 | Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu |
| | 04 | Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum |
| | 05 | Pemindahan Jabatan Fungsional Umum |
| | 06 | Pemberhentian |
| | 14 | Kesejahteraan |
| | 01 | Kesehatan |
| | 02 | Rekreasi/Kesenian/Olahraga |
| | 03 | Bantuan Sosial |
| | 04 | Perumahan |
| | 15 | Pemberhentian Pegawai |
| | 01 | Dengan Hormat |
| | 02 | Tidak dengan Hormat |
| | 16 | Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda /Duda/PNS yang Tewas |
| | 17 | Perselisihan/Sengketa Pegawai |
| | 18 | Organisasi Non Kedinasan |
| | 01 | KORPRI |
| | 02 | Dharma Wanita |
| | 03 | Koperasi |
| | 04 | Lain-lain |

| | | | |
|----|-----------------|--|--|
| RT | Kerumahtanggaan | | |
| | 01 | Perjalanan Dinas Pimpinan | |
| | | 01 | Dalam Negeri |
| | | 02 | Luar Negeri |
| | 02 | Rapat Pimpinan | |
| | | 01 | Sarana dan Prasarana |
| | | 02 | Jamuan Rapat |
| | 03 | Kantor | |
| | | 01 | Pemeliharaan Gedung |
| | | 02 | Perlengkapan Kantor |
| | | 03 | Air, Listrik dan Telekomunikasi |
| | | 04 | Keamanan Kantor |
| | | 05 | Kebersihan Kantor |
| | | 06 | Jamuan Tamu |
| | | 07 | Halaman dan Taman |
| | 05 | Fasilitas Pimpinan | |
| | | 01 | Kendaraan Dinas |
| | | 02 | Pengawasan dan Pengamanan |
| | | 03 | Telekomunikasi |
| TU | Ketatausahaan | | |
| | 01 | Persuratan | |
| | | 01 | Pengurusan Surat Masuk |
| | | 02 | Pengurusan Surat Keluar |
| | | 03 | Korepondensi Internal |
| | 02 | Penggandaan Surat Masuk | |
| | 03 | Agenda kegiatan | |
| | 04 | Rapat/Rakor/Rakernis | |
| KU | Keuangan | | |
| | 01 | Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan | |
| | | 01 | Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran |
| | | 01 | Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra |
| | | 02 | Dokumen Rancangan kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah |
| | | 03 | KUA beserta Nota Kesepakatannya |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 04 | Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) |
| | | 05 | Nota Kesepakatan PPA |
| | | 06 | Prioritas Plafon Anggaran |
| | 02 | | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) |
| | | 01 | Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah |
| | | 02 | Dokumen RKA-SKPD |
| | 03 | | Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | 01 | Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah APBD |
| | | 02 | Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah |
| | | 03 | Dokumen Persetujuan Evaluasi kepada Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD |
| | | 04 | Dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD beserta Lampirannya |
| | | 05 | Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD |
| | | 06 | Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD |
| | | 07 | Penetapan Peraturan Daerah APBD oleh Wali Kota beserta Penjabarannya |
| | | 08 | Peraturan Daerah tentang APBD |
| | 04 | | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) |
| | | 01 | Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas, dan Renstra |
| | | 02 | Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah |
| | | 03 | KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya |
| | | 04 | Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan |
| | | 05 | Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran |

| | | | |
|--|----|---------------------|--|
| | | 06 | Prioritas Plafon Anggaran Perubahan |
| | | 05 | Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan |
| | | 01 | Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah |
| | | 02 | Dokumen RKA-SKPD Perubahan |
| | | 06 | Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
| | | 01 | Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan, Nota Keuangan Pemerintah dan Materi RAPBD Perubahan |
| | | 02 | Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah |
| | | 03 | Dokumen Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan |
| | | 04 | Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya |
| | | 05 | Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta Penjabarannya |
| | | 06 | Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan |
| | | 07 | Penetapan Peraturan Daerah APBD Perubahan oleh Wali Kota beserta Penjabarannya |
| | | 08 | Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan |
| | 02 | Penyusunan Anggaran | |
| | | 01 | Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan |
| | | 02 | Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan |
| | | 03 | Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota |
| | | 04 | Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah |
| | | 05 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |

| | | | |
|--|----|----------------------|--|
| | 03 | Pelaksanaan Anggaran | |
| | | 01 | Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan SP2D): UP, GU, TU, LS |
| | | 02 | Pendapatan Asli Daerah |
| | | 01 | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Kendaraan Bermotor |
| | | 02 | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
| | | 03 | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |
| | | 04 | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Air Permukaan |
| | | 05 | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Rokok |
| | | 06 | Surat Ketetapan Retribusi Daerah |
| | | 07 | Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Umum |
| | | 08 | Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha |
| | | | 01 Hotel |
| | | | 02 Restoran |
| | | 09 | Bukti Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu |
| | | 10 | Bukti Pembayaran Retribusi Pengendalian Lalu Lintas |
| | | 11 | Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) |
| | | 12 | Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat |
| | | 13 | Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah |
| | | 14 | Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | 15 | Bukti Penerimaan dari Pengelolaan Dana Bergulir |
| | | 16 | Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank |
| | | 03 | Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan |
| | | 01 | Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak |
| | | 02 | Dana Bagi Hasil untuk Kota |
| | | 03 | Dana Alokasi Umum (Dana Alokasi Umum) |
| | | 04 | Daerah yang Menerima DAU |
| | | 05 | Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| | | 04 | Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah |
| | | 01 | Alokasi Dana Penyesuaian |
| | | 02 | Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Operasional Sekolah |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 03 | Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat |
| | | 04 | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat |
| | | 05 | Penerimaan Hibah yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah Lainnya atau Sumbangan dari Pihak Ketiga |
| | | 05 | Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) |
| | | 06 | Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) |
| | | 07 | Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |
| | | 08 | Dokumen Piutang Daerah |
| | | 09 | Dokumen Pengelolaan Investasi |
| | | 10 | Dokumen Belanja Langsung |
| | | 01 | Belanja Pegawai |
| | | 02 | Belanja Barang Jasa |
| | | 03 | Belanja Modal |
| | | 11 | Dokumen Belanja Tidak Langsung |
| | | 01 | Pegawai |
| | | 02 | Hibah |
| | | 03 | Belanja Bagi Hasil |
| | | 04 | Subsidi |
| | | 05 | Bunga |
| | | 06 | Bantuan Sosial |
| | | 07 | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat |
| | | 08 | Belanja Tidak Terduga |
| | 04 | | Pembiayaan Daerah |
| | | 01 | Bukti Penerimaan Pembiayaan |
| | | 01 | SilPA |
| | | 02 | Dana Cadangan |
| | | 03 | Dana Bergulir |
| | | 04 | Pinjaman Daerah |
| | | 05 | Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD |
| | | 02 | Bukti Pengeluaran Pembiayaan |
| | | 01 | Investasi Jangka Panjang dalam Bentuk Dana Bergulir |
| | | 02 | Penyertaan Modal pada BUMD |
| | | 03 | Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD |
| | | 04 | Pengeluaran dari Dana Cadangan |
| | | 05 | Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) |

| | | | |
|--|----|---|--|
| | | 06 | Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah |
| | 05 | Dokumen Penatausahaan Keuangan | |
| | | 01 | Surat Penyediaan Dana (SPD) |
| | | 02 | Surat Permohonan Pembayaran (SPP) |
| | | 03 | Surat Perintah Membayar (SPM) |
| | | 04 | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) |
| | 06 | Pertanggungjawaban Penggunaan Dana | |
| | | 01 | Buku Kas Umum (BKU) |
| | | 02 | Buku Kas Pembantu (BKP) |
| | | 03 | Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek |
| | | 04 | Rekening Koran Bank |
| | | 05 | Pertanggungjawaban Fungsionalitas dan Administrasi |
| | | 06 | Bukti Penyetoran Pajak |
| | | 07 | Register Penutupan Kas |
| | | 08 | Berita Acara Pemeriksaan |
| | | 09 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Arsip Data Komputer (ADK) |
| | | 10 | Laporan Pendapatan Daerah |
| | | 11 | Laporan Keadaan Kredit Anggaran |
| | | 12 | Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran |
| | | 13 | Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan Daerah |
| | | 14 | Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah |
| | 07 | Daftar Gaji | |
| | 08 | Kartu Gaji | |
| | 09 | Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) | |
| | 10 | Laporan Keuangan Tahunan | |
| | | 01 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| | | 02 | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) |
| | | 03 | Neraca |
| | | 04 | Laporan Operasional (LO) |
| | | 05 | Laporan Arus Kas (LAK) |
| | | 06 | Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) |
| | | 07 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) |

| | | | |
|--|----|------------------------------|---|
| | | | |
| | 11 | Bantuan/Pinjaman Luar Negeri | |
| | | 01 | Permohonan Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>) |
| | | 02 | Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>) |
| | | 03 | Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan Dokumen Sejenisnya |
| | | 04 | Dokumen <i>Loan Agreement (PLHN)</i> seperti <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat Menyurat dengan <i>Lender</i> |
| | | 05 | Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain Usulan Luncuran Dana |
| | | 06 | Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri berikut Lampirannya |
| | | 01 | <i>Reimbursement</i> |
| | | 02 | <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i> |
| | | 03 | <i>Special Commitment/L/C Opening</i> |
| | | 04 | <i>Special Account/Impress Fund</i> |
| | | 07 | Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>) |
| | | 08 | Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung Lainnya |
| | | 09 | <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain <i>No Object Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)</i> |
| | | 10 | <i>Staff Appraisal Report</i> |
| | | 11 | <i>Report/Laporan</i> yang terdiri dari |
| | | 01 | <i>Progress Report</i> |
| | | 02 | <i>Monthly Report</i> |
| | | 03 | <i>Quarterly Report</i> |
| | | 12 | Laporan Hutang Daerah |
| | | 01 | Laporan Pembayaran Hutang Daerah |
| | | 02 | Laporan Posisi Hutang Daerah |
| | | 13 | <i>Completion Report/Annual Report</i> |
| | | 14 | Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman |

| | | |
|--|----|---|
| | | Luar Negeri |
| | 12 | Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) |
| | | 01 Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan |
| | | 01 Kuasa Penggunaan Anggaran |
| | | 02 Kuasa Pengguna Barang/Jasa |
| | | 03 Pejabat Pembuat Komitmen |
| | | 04 Pejabat Pembuat Daftar Gaji |
| | | 05 Pejabat Penandatanganan SPM |
| | | 06 Bendahara Penerimaan/Pengeluaran |
| | | 07 Pengelola Barang |
| | | 08 Berita Acara Serah Terima Jabatan |
| | 13 | Akuntansi Pemerintah Daerah |
| | | 01 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah |
| | | 02 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah |
| | | 03 Bagan Akun Standar |
| | | 04 Arsip Data Komputer |
| | 14 | Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan |
| | | 01 Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk <i>Specimen</i> Tanda Tangan |
| | | 02 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: |
| | | 01 SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DUA, Bilyet giro, SPM Nihil |
| | | 02 Penagihan/ <i>Invoice</i> , Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya antara lain <i>Copy</i> Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank |
| | | Permintaan Pelayanan Jasa/ <i>Service Report</i> dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan |
| | | 03 Buku Rekening Bank |
| | | 04 Keputusan Pembukuan Rekening |
| | | 05 Pembukuan Anggaran terdiri dari: |
| | | 01 Buku Kas Umum (BKU) |
| | | 02 Buku Kas Pembantu |
| | | 03 Register dan Buku Tambahan |
| | | 04 Daftar Pembukuan Selama Rekening masih aktif |
| | | 05 Pencairan/Pengeluaran (DPP) |

| | | | |
|--|----|--------------------------------------|---|
| | | 06 | Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP) |
| | | 07 | Daftar Himpunan Pencairan (DHP) |
| | | 08 | Rekening Koran |
| | 15 | Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan | |
| | | 01 | Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya |
| | | 02 | Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPhn, dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan |
| | 16 | Pengelolaan Anggaran Pemilu | |
| | | 01 | Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD |
| | | 01 | Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu |
| | | 02 | Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu |
| | | 03 | Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panitia Pengawas Daerah Provinsi, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panitia Pengawas |
| | | 04 | Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu |
| | | 05 | Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Provinsi |
| | | 06 | Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panitia Pengawas Provinsi dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD |
| | | 07 | Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada |
| | | 08 | Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD |
| | | 09 | Nota Persetujuan DPRD tentang Peraturan Daerah Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD |
| | | 10 | Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu |
| | | 01 | Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panitia Pengawas Daerah dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu |

| | | | | |
|--|----|-----------------------|---|---|
| | | | 02 | Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu |
| | | | 03 | Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu Termasuk Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro |
| | | | 04 | Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Termasuk Di antaranya Bukti Transfer Bank |
| | | | 05 | Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu Termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya |
| | | 11 | Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu | |
| | | | 01 | Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya |
| | | | 02 | Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Provinsi, Panitia Pengawas Daerah dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panitia Pengawas |
| | | | 03 | Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS, dan KPPS Termasuk di antaranya Bukti Transfer Bank |
| | | 12 | Pemeriksaan/ Pengawasan Keuangan Daerah | |
| | | | 01 | Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan |
| | | | 02 | Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal |
| | | | 03 | Laporan Aparat Pemeriksaan Fungsional |
| | | | 01 | LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) |
| | | | 02 | MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) |
| | | | 03 | Tindak Lanjut/Tanggapan LHP |
| | | | 04 | Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah |
| | | | 01 | Tuntutan Perbendaharaan |
| | | | 02 | Tuntutan Ganti Rugi |
| | 17 | Pengadaan Barang/Jasa | | |
| | | 01 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) | |
| | | 02 | Pelaksanaan Pengadaan | |
| | | 01 | Swakelola | |

| | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | 02 | Pengadaan Langsung |
| | | 03 | Penunjukan Langsung |
| | | 04 | Tender |
| | | 05 | <i>E-Purchasing</i> |
| | | 03 | Laporan Pengadaan Barang/Jasa |
| TL | Organisasi dan Tata Laksana | | |
| | 01 | Organisasi | |
| | | 01 | Struktur Organisasi |
| | | 02 | Uraian Tugas |
| | | 03 | Analisis Jabatan dan Beban Kerja |
| | 02 | Hubungan/Mekanisme Kerja | |
| | 03 | Ketatalaksanaan | |
| PU | Pekerjaan Umum | | |
| | 01 | Kebijakan | |
| | | 01 | Pengairan |
| | | 01 | Perencanaan |
| | | 02 | Pembangunan |
| | | 03 | Pemeliharaan |
| | 02 | Jalan | |
| | | 01 | Perencanaan |
| | | 02 | Pembangunan |
| | | 03 | Pemeliharaan |
| | 03 | Jembatan | |
| | | 01 | Perencanaan |
| | | 02 | Pembangunan |
| | | 03 | Pemeliharaan |
| | 04 | Bangunan Gedung | |
| | | 01 | Perencanaan |
| | | 02 | Pembangunan |
| | | 03 | Pemeliharaan |
| | 05 | Penerangan Jalan Umum | |
| | | 01 | Perencanaan |
| | | 02 | Pembangunan |
| | | 03 | Pemeliharaan |
| | 06 | Trotoar | |
| | | 01 | Perencanaan |
| | | 02 | Pembangunan |

| | | | |
|--|----|------------------------------|--------------------|
| | | 03 | Pemeliharaan |
| | | 07 | Peralatan |
| | | 01 | Permohonan |
| | | 02 | Inventaris |
| | | 03 | Pengadaan |
| | 02 | Rencana Umum Tata Ruang | |
| | | 01 | <i>Master Plan</i> |
| | | 02 | <i>Block Plan</i> |
| | | 03 | <i>Detail Plan</i> |
| | 03 | Standarisasi Kriteria Teknis | |
| | | 01 | Bangunan |
| | | 01 | Spesifikasi Teknis |
| | | 02 | Pedoman/Prosedur |
| | | 03 | Manual Teknis |
| | | 04 | Manual Pelaksanaan |
| | | 02 | Pengairan |
| | | 01 | Spesifikasi Teknis |
| | | 02 | Pedoman/Prosedur |
| | | 03 | Manual Teknis |
| | | 04 | Manual Pelaksanaan |
| | | 03 | Air Minum |
| | | 01 | Spesifikasi Teknis |
| | | 02 | Pedoman/Prosedur |
| | | 03 | Manual Teknis |
| | | 04 | Manual Pelaksanaan |
| | | 04 | Jalan |
| | | 01 | Spesifikasi Teknis |
| | | 02 | Pedoman/Prosedur |
| | | 03 | Manual Teknis |
| | | 04 | Manual Pelaksanaan |
| | | 05 | Jembatan |
| | | 01 | Spesifikasi Teknis |
| | | 02 | Pedoman/Prosedur |
| | | 03 | Manual Teknis |
| | | 04 | Manual Pelaksanaan |

| | | |
|----|----|--|
| | 04 | Pembinaan |
| | 05 | Perizinan |
| | 01 | Perizinan |
| | 01 | Izin Mendirikan Bangunan |
| | 02 | Izin Pemborongan Pembangunan |
| | 03 | Izin Penggunaan Bangunan |
| | 04 | Izin Pembangunan Tanggul/Tambak pada Pinggiran Sungai |
| | 05 | Izin Pengambilan dan Pembuangan Air |
| | 06 | Izin Pembangunan Sumur Bor/Artesis |
| | 07 | Izin Proyek Air Minum |
| | 08 | Izin Pemanfaatan Tanah Dataran |
| | 09 | Izin Penggunaan Jalan dan Sejenisnya |
| | 02 | Penolakan Permohonan Perizinan |
| | 03 | Keringanan Pemberian Izin |
| | 04 | Pembatalan Izin |
| PP | | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| | 01 | Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah |
| | 01 | Kegiatan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Pemerintahan Daerah |
| | 02 | Laporan Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Pemerintahan Daerah |
| | 02 | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang Ekonomi |
| | 01 | Kegiatan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang Ekonomi |
| | 02 | Laporan Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang Ekonomi |
| | 03 | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya |
| | 01 | Kegiatan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya |
| | 02 | Laporan Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya |
| | 04 | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| | 01 | Kegiatan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang |

| | | |
|----|----|--|
| | | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| | 02 | Laporan Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| | 05 | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna |
| | 01 | Kegiatan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna |
| | 02 | Laporan Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna |
| | 03 | Pemasyarakatan Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna |
| | 06 | Kerja Sama Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| | 01 | Kerja Sama Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan antar Pemerintah Daerah |
| | 02 | Kerja Sama Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan antar Perguruan Tinggi |
| | 03 | Kerja Sama Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan dengan Masyarakat dan atau Swasta |
| | 04 | Dewan <i>Research</i> Daerah |
| | 07 | Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| | 01 | Data Base Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| | 02 | Publikasi Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| | 03 | Penerbitan Jurnal |
| | 08 | Pengembangan Inovasi Daerah |
| | 01 | Bantuan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Potensi Daerah |
| | 02 | Penghargaan Inovasi Daerah |
| | 09 | Sumber Daya Manusia Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| | 01 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| | 02 | Pembinaan Peneliti |
| PW | | Pengawasan |
| | 01 | Rencana Kegiatan Pengawasan |
| | 01 | Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan |
| | 02 | Rencana Kegiatan Pengawasan Khusus |
| | 02 | Pengawasan Tahunan |
| | 01 | Kegiatan Audit Keuangan dan kinerja Tahun Berjalan |
| | 02 | Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan |

| | | |
|----|----|---|
| | 03 | Tindak Lanjut Hasil Audit |
| | 03 | Pengawasan Khusus |
| | 01 | Kegiatan Audit Khusus |
| | 02 | Laporan Hasil Audit Khusus |
| | 03 | Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus |
| | 04 | Pengaduan Masyarakat |
| | 01 | Pusat Pengaduan Masyarakat |
| | 02 | Penanganan/Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat |
| | 03 | Evaluasi Penanganan/Tindak Lanjut |
| | 05 | Pengawasan Melekat |
| | 01 | Sosialisasi |
| | 02 | Kegiatan Pengawasan Melekat |
| | 03 | Evaluasi Kegiatan Pengawasan Melekat |
| | 06 | Pemantauan |
| | 01 | Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program |
| | 02 | Pemantauan Tindak Lanjut Laporan hasil Pengawasan |
| | 03 | Tuntutan Ganti Rugi |
| | 07 | Sumber Daya Manusia Pengawasan (Auditor) |
| | 01 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan |
| | 02 | Pembinaan Auditor |
| | 08 | Pengembangan Akuntabilitas Publik |
| | 01 | <i>Desk Accountability</i> |
| | 02 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah |
| | 03 | Pemantauan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah |
| | 04 | Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah |
| KD | | Perlengkapan, Peralatan, dan Kekayaan Daerah |
| | 01 | Analisis Kebutuhan |
| | 02 | Tata Ruang |
| | 03 | Daftar Perkenalan Mampu |
| | 04 | Penerimaan/Realisasi Pengadaan |
| | 01 | Alat Tulis Kantor |
| | 02 | Perlengkapan Kantor |
| | 03 | Tanah dan Bangunan |
| | 04 | Kendaraan |

| | | | |
|----|-------------------------|--|---|
| | | 05 | Instalasi/Jaringan |
| | | 06 | Peralatan Kearsipan |
| | 05 | Penyimpanan/Pergudangan | |
| | 06 | Distribusi | |
| | 07 | Pemeliharaan | |
| | 08 | Inventarisasi | |
| | 09 | Penghapusan | |
| KK | Keamanan dan Ketertiban | | |
| | 01 | Profesi dan Pengamanan, Hukum, Hubungan Masyarakat, Teknologi Informasi, Intelijen Keamanan, Pemelihara Keamanan | |
| | | 01 | Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan |
| | | 02 | Penyiapan Kebijakan |
| | | 03 | Perumusan Kebijakan |
| | | 04 | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NPSK) |
| | | 05 | MoU |
| | 02 | Profesi dan Pengamanan | |
| | | 01 | Pengamanan Internal |
| | | 01 | Pembinaan Pengamanan |
| | | 01 | Pengamanan Personel dan Bahan Keterangan |
| | | 02 | Pengamanan Materiil |
| | | 03 | Pengamanan Kegiatan |
| | | 02 | Penelitian Personel |
| | | 01 | Pembinaan Operasional |
| | | 02 | Pencatatan Personel |
| | | 03 | Produksi Dokumentasi |
| | | 01 | Produksi, Analisis, dan Evaluasi |
| | | 02 | Dokumentasi |
| | 02 | Pertanggungjawaban Profesi | |
| | | 01 | Standarisasi |
| | | 01 | Organisasi Manajemen |
| | | 02 | Sumber Daya |
| | | 03 | Akreditasi |
| | | 02 | Pembinaan Etika |
| | | 01 | Kode Etik |
| | | 02 | Penerapan Etika |
| | | 03 | Penegakan Etika |
| | | 01 | Audit |

| | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | 02 | Pemeriksaan |
| | 03 | Pemeliharaan Keamanan | | |
| | | 01 | Pembinaan Penertiban Masyarakat | |
| | | | 01 | Pembinaan Pemuda, Anak dan Wanita |
| | | | 02 | Penertiban Sosial |
| | | | 03 | Koordinasi dan Rehabilitasi |
| | | 02 | Pembinaan Keamanan Swakarsa | |
| | | | 01 | Pembinaan Satuan Keamanan |
| | | | 02 | Pengawasan Jasa Pengamanan |
| | | | 03 | Manajemen Pengamanan |
| | | 03 | Pembinaan Perpolisian Masyarakat | |
| | | | 01 | Pembinaan dan Kemampuan |
| | | | 02 | Pembinaan Potensi Masyarakat |
| | | | 03 | Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan |
| | | 04 | Pembinaan Polisi Khusus | |
| | | | 01 | Pembinaan dan Pelatihan |
| | | | 02 | Koordinasi dan Pengawasan |
| | | | 03 | Analisis dan Evaluasi |
| | | 05 | Pemeliharaan Ketertiban Umum | |
| | | | 01 | Tindak Pidana Ringan |
| | | | 02 | Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara |
| | | | 03 | Pengamanan Tenaga Kerja Indonesia |
| | | 06 | Pengendalian Masyarakat | |
| | | | 01 | Negosiasi |
| | | | 02 | Pembinaan Pengendalian Masyarakat |
| | | 07 | Patroli dan Pengawalan | |
| | | | 01 | Patroli |
| | | | 02 | Pengawalan |
| | | | 03 | <i>Call Center 110</i> |
| | | | 04 | <i>Police Backbone</i> |
| | | 08 | Pengamanan Objek Vital | |
| | | | 01 | Pengamanan VVIP/VIP |
| | | | 02 | Pengamanan Pariwisata |
| | | | 03 | Pengamanan Objek Vital Nasional/Objek Vital |
| | | | 04 | Audit Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional |

| | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|---|
| | | | |
| | 04 | Penanggulangan Kejahatan Terorisme | |
| | | 01 | Intelijen |
| | | | 01 Analisis terhadap Lapangan dan Penilaian Informasi |
| | | | 02 Deteksi |
| | | 02 | Pencegahan |
| | | | 01 Pembinaan dan Penyuluhan |
| | 05 | Intelijen Keamanan | |
| | | 01 | Pelayanan Masyarakat |
| | | | 01 Kegiatan Masyarakat |
| | | | 02 Orang Asing |
| | 06 | Teknologi Informasi | |
| | | 01 | Teknologi Informasi |
| | | | 01 Pengkajian Sistem Komunikasi |
| | | | 02 Operasional Komunikasi |
| | | | 03 Materiil Komunikasi |
| | | | 04 Kontrak/Surat Perjanjian Jual Beli |
| | | 02 | Teknologi Informasi |
| | | | 01 Pengkajian Sistem |
| | | | 02 Situs Polisi Pamong Praja |
| | | | 03 Dukungan Teknis |
| | 07 | Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) | |
| | | 01 | Data |
| | | 02 | Fasilitas |
| AR | Kearsipan | | |
| | 01 | Kebijakan | |
| | | 01 | Peraturan Daerah |
| | | | 01 Pengkajian dan Pengusulan |
| | | | 02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah |
| | | | 03 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah |
| | | | 04 Penetapan Peraturan Daerah |
| | | | 05 Sosialisasi Peraturan Daerah |
| | | 02 | Peraturan Wali Kota |
| | | | 01 Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Wali |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | | Kota |
| | | 02 | Pengusulan dan Penetapan Peraturan Wali Kota |
| | | 03 | Sosialisasi Peraturan Wali Kota |
| | | 03 | Penetapan Organisasi Kearsipan |
| | | 01 | Unit Pengolah |
| | | 02 | Unit Kearsipan |
| | 02 | | Pembinaan Kearsipan |
| | | 01 | Akreditasi Kearsipan Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Kearsipan, dan Diklat Kearsipan |
| | | 01 | Proses Akreditasi |
| | | 02 | Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi |
| | | 03 | Data Base Akreditasi |
| | | 02 | Sertifikasi Arsiparis |
| | | 01 | Proses Sertifikasi Arsiparis |
| | | 02 | Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis |
| | | 03 | Data Base Sertifikasi Arsiparis |
| | | 03 | Bina Arsiparis |
| | | 01 | Formasi Jabatan Arsiparis |
| | | 02 | Standar Kompetensi Arsiparis |
| | | 03 | Bimbingan Konsultasi Arsiparis |
| | | 04 | Penilaian Arsiparis |
| | | 05 | Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan |
| | | 06 | Berkas Penetapan Arsiparis Teladan |
| | | 07 | Data Base Arsiparis |
| | | 04 | Bimbingan dan Konsultasi |
| | | 01 | Penerapan Sistem Kearsipan |
| | | 02 | Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan |
| | | 03 | Unit Kearsipan |
| | | 04 | Sumber Daya Manusia |
| | | 05 | Supervisi dan Evaluasi |
| | | 01 | Perencanaan |
| | | 02 | Pelaksanaan |
| | | 03 | Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi |
| | | 06 | Data Base Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi |
| | | 07 | Fasilitasi Kearsipan |
| | | 01 | Sumber Daya Manusia Kearsipan |
| | | 02 | Prasarana dan Sarana |

| | | |
|----|----|---|
| | 08 | Lembaga/Unit Kearsipan Teladan |
| | 01 | Penyelenggaraan |
| | 02 | Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan |
| 03 | | Pengelolaan Arsip Dinamis |
| | 01 | Penciptaan |
| | 01 | Pencatatan (Buku Agenda, Kartu Kendali dan Lembar Pengantar/Ekspedisi) |
| | 02 | Pendistribusian |
| | 02 | Penggunaan |
| | 01 | Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip Dinamis |
| | 02 | Peminjaman |
| | 03 | Pemeliharaan |
| | 01 | Pemberkasan: Daftar Arsip Aktif (Daftar Berkas dan Isi Berkas) |
| | 02 | Penataan Arsip Inaktif: Pengaturan Fisik, Pengolahan Informasi Arsip, Penyusunan Daftar Arsip Inaktif |
| | 04 | Penyimpanan |
| | 01 | Skema Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif |
| | 02 | Pengamanan |
| | 05 | Alih Media |
| | 01 | Kebijakan Alih Media |
| | 02 | Autentikasi |
| | 03 | Berita Acara |
| | 04 | Daftar Arsip Alih Media |
| | 06 | Program Arsip Vital |
| | 01 | Identifikasi |
| | 02 | Pelindungan dan Pengamanan |
| | 03 | Penyelamatan dan Pemulihan |
| | 07 | Autentikasi Arsip Dinamis |
| | 01 | Pembuktian Autentisitas |
| | 02 | Pendapat Tenaga Ahli |
| | 03 | Pengujian |
| | 04 | Penetapan Autentisitas Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip |
| | 08 | Penyusutan |
| | 01 | Pemindahan Arsip Inaktif (Berita Acara dan Daftar Arsip yang Dipindahkan) |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 02 | Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna |
| | | 01 | Panitia Penilai |
| | | 02 | Penilaian Panitia Penilai |
| | | 03 | Permintaan Persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) |
| | | 04 | Penetapan Arsip yang Dimusnahkan |
| | | 05 | Berita Acara Pemusnahan Arsip |
| | | 06 | Daftar Arsip yang Dimusnahkan |
| | | 03 | Penyerahan Arsip Statis |
| | | 01 | Pembentukan Panitia Penilai |
| | | 02 | Notulen Rapat |
| | | 03 | Surat Pertimbangan Panitia Penilai |
| | | 04 | Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan |
| | | 05 | Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan dapat Digunakan dari Pencipta Arsip |
| | | 06 | Keputusan Penetapan Penyerahan |
| | | 07 | Berita Acara Penyerahan Arsip |
| | | 08 | Daftar Arsip yang Diserahkan |
| | | 09 | Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis |
| | | 01 | Data Base Pengelolaan Arsip Aktif |
| | | 02 | Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif |
| | 04 | | Pengelolaan Arsip Statis |
| | | 01 | Akuisisi |
| | | 01 | Monitoring Fisik dan Daftar |
| | | 02 | Verifikasi Terhadap Daftar Arsip |
| | | 03 | Menetapkan Status Arsip Statis |
| | | 04 | Persetujuan untuk Penyerahan |
| | | 05 | Penetapan Arsip yang Diserahkan |
| | | 06 | Berita Acara Penyerahan Arsip |
| | | 07 | Daftar Arsip yang Diserahkan |
| | | 02 | Sejarah Lisan |
| | | 01 | Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan |
| | | 02 | Hasil Wawancara Sejarah Lisan |
| | | 01 | Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan |
| | | 02 | Laporan Kegiatan |
| | | 03 | Hasil Wawancara (kaset atau CD) dan Transkrip |
| | | 03 | Daftar Pencarian Arsip Statis |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 01 | Pengumuman |
| | | 02 | Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis |
| | | 04 | Penghargaan dan Imbalan |
| | | 05 | Pengolahan |
| | | 01 | Menata Informasi |
| | | 02 | Menata Fisik |
| | | 03 | Menyusun Sarana Bantu Temu Balik: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis dan Petunjuk |
| | | 06 | Preservasi Preventif |
| | | 01 | Penyimpanan |
| | | 02 | Pengendalian Hama Terpadu |
| | | 03 | Reproduksi (Alih Media): Berita Acara Alih Media dan Daftar Arsip Alih Media |
| | | 04 | Perencanaan dan Penanggulangan Bencana |
| | | 07 | Preventif Kuratif |
| | | 01 | Perawatan Arsip |
| | | 02 | Laporan Hasil Pengujian Preservasi |
| | | 08 | Autentikasi Arsip Statis |
| | | 01 | Pembuktian Autentisitas |
| | | 02 | Pendapat Tenaga Ahli |
| | | 03 | Pengujian |
| | | 04 | Penetapan Autentisitas Arsip Statis/Surat Pernyataan |
| | | 09 | Akses Arsip Statis |
| | | 01 | Layanan Arsip Statis |
| | | 02 | Administrasi dan Proses Penyusunan Penerbitan Naskah Sumber |
| | | 03 | Hasil Naskah Sumber Arsip |
| | | 04 | Pameran Arsip |
| | 05 | | Jasa Kearsipan |
| | | 01 | Konsultasi Kearsipan |
| | | 02 | Manual Kearsipan |
| | | 03 | Penataan Arsip |
| | | 04 | Otomasi Kearsipan |
| | | 05 | Penyimpanan Arsip/Dokumen |
| | | 06 | Perawatan Arsip/Dokumen |
| | | 07 | Data Base Jasa Kearsipan |
| | 06 | | Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan |

| | | | |
|----|--------------------|-----------------------|--|
| | | 01 | Pembinaan Internal |
| | | 01 | Kegiatan Pembinaan terhadap Perangkat Daerah |
| | | 02 | Laporan Hasil Pembinaan Perangkat Daerah |
| | | 02 | Pembinaan Eksternal |
| | | 01 | Kegiatan Pembinaan terhadap BUMD, Orpol, Ormas, Swasta, dan Masyarakat |
| | | 02 | Laporan Hasil Pembinaan Eksternal |
| | | 03 | Pengawasan Internal |
| | | 01 | Kegiatan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah |
| | | 02 | Laporan Hasil Audit Kearsipan Internal terhadap Perangkat Daerah |
| | | 04 | Pengawasan Eksternal |
| | | 01 | Kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap BUMD, Orpol, Ormas, Swasta, dan Masyarakat |
| | | 02 | Laporan Hasil Audit Kearsipan Eksternal |
| KB | Keluarga Berencana | | |
| | 01 | Pengendalian Penduduk | |
| | | 01 | Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk |
| | | 01 | Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (Pengumpulan Data dan Pengolahan Data) |
| | | 02 | Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (Pelaporan dan Evaluasi) |
| | | 03 | Penyiapan fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk |
| | | 04 | Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk (Evaluasi dan Pelaporan) |
| | | 02 | Perencanaan Pengendalian Penduduk |
| | | 01 | Data dan Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk |
| | | 02 | Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk (Penetapan Sasaran Parameter dan Evaluasi Sasaran Parameter) |
| | | 03 | Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk (Pemanfaatan Profil dan Proyek, Pemanfaatan Parameter) |
| | | 03 | Kerja Sama Pendidikan Kependudukan |
| | | 01 | Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal dan Pengembangan Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal |
| | | 02 | Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal dan |

| | | | | |
|--|--|--|----|---|
| | | | | Pengembangan Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal |
| | | | 03 | Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal dan Pengembangan Jalur Pendidikan Non Formal dan Informal |
| | | | 04 | Analisis Dampak Kependudukan |
| | | | 01 | Analisis Sosial |
| | | | 02 | Analisis Ekonomi |
| | | | 03 | Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan |
| | | | 04 | Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan |
| | | | 05 | Pencatatan Sipil |
| | | | 01 | Kelahiran |
| | | | 01 | Warga Negara Indonesia |
| | | | 02 | Warga Negara Asing |
| | | | 02 | Kematian |
| | | | 03 | Perkawinan |
| | | | 01 | Warga Negara Indonesia |
| | | | 02 | Warga Negara Asing |
| | | | 04 | Perceraian |
| | | | 06 | Pendaftaran Penduduk |
| | | | 01 | Mutasi Penduduk |
| | | | 02 | Pendataan Penduduk |
| | | | 01 | Warga Negara Indonesia |
| | | | 01 | Permanen |
| | | | 02 | Non Permanen |
| | | | 02 | Warga Negara Asing |
| | | | 03 | Identitas Penduduk |
| | | | 01 | Warga Negara Indonesia |
| | | | 02 | Warga Negara Asing |
| | | | 07 | Inovasi Layanan Kependudukan |
| | | | 02 | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi |
| | | | 01 | Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah |
| | | | 01 | Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah |
| | | | 02 | Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | | Berencana |
| | | 03 | Kualitas, Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah |
| | | 02 | Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta |
| | | 01 | Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta |
| | | 02 | Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta |
| | | 03 | Kualitas, Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta |
| | | 03 | Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus |
| | | 01 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan |
| | | 02 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan |
| | | 03 | Peningkatan Akses dan Partisipasi Kesertaan Keluarga Berencana Pria |
| | | 04 | Kesehatan Reproduksi |
| | | 01 | Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak |
| | | 02 | Pencegahan PMS dan HIV/AIDS |
| | | 03 | Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas |
| | | 03 | Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga |
| | | 01 | Bina Keluarga Balita dan Anak |
| | | 01 | Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak (Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak, Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga Balita dan Anak) |
| | | 02 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak |
| | | 02 | Bina Ketahanan Remaja |
| | | 01 | Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan dan Jalur Masyarakat |
| | | 02 | Monitoring dan Pelaporan dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 03 | Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan |
| | | 01 | Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan |
| | | 02 | Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (Pengembangan Kelompok dan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan) |
| | | 03 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan |
| | | 04 | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |
| | | 01 | Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga |
| | | 02 | Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga |
| | | 03 | Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga (Pengembangan Administrasi, Keuangan dan Pemasaran Kelompok Usaha Bersama) |
| | | 04 | Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga |
| | | 05 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera |
| | | 01 | Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera |
| | | 02 | Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera |
| | | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera |
| | 04 | | Advokasi dan Informasi |
| | | 01 | Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi |
| | | 01 | Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan) |
| | | 02 | Advokasi dan Pencitraan |
| | | 03 | Promosi |
| | | 04 | Sarana Produksi Media Komunikasi |
| | | 05 | Produksi Media Komunikasi |
| | | 02 | Bina Hubungan antar Lembaga |
| | | 01 | Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi |
| | | 02 | Pengembangan dan Penguatan Hubungan dengan |

| | | | |
|----|-----------|--|--|
| | | | Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | | 03 | Pengembangan dan Penguatan Hubungan dengan Lembaga Non Pemerintah |
| | | 03 | Bina Lini Lapangan |
| | | 01 | Pengembangan Tenaga Lini Lapangan |
| | | 02 | Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan |
| | | 03 | Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan |
| | | 04 | Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan |
| | | 05 | Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan |
| | | 06 | Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan |
| | | 04 | Pelaporan dan Statistik |
| | | 01 | Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan (Perumusan Pola, Sistem Pencatatan dan Pelaporan) |
| | | 02 | Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan |
| | | 03 | Pengumpulan dan Pengolahan Data |
| | | 04 | Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk |
| | | 05 | Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana |
| | | 05 | Teknologi Informasi dan Dokumentasi |
| | | 01 | Pengembangan Sistem Aplikasi |
| | | 02 | Pengelolaan Bank Data |
| | | 03 | Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi |
| | | 04 | Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi |
| | | 05 | Dokumentasi dan Perpustakaan |
| | | 06 | Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi |
| KS | Kesehatan | | |
| | 01 | Upaya Kesehatan | |
| | 01 | Upaya Kesehatan Dasar | |
| | 01 | Pelayanan Kedokteran Keluarga | |
| | 02 | Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer | |
| | 03 | Pelaksanaan Kesehatan Primer | |
| | 04 | Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas | |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 05 | Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit |
| | | 06 | ICD 10, <i>Dentistry & Stomatology</i> |
| | | 07 | Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah |
| | | 08 | Penyakit Mulut di Tingkat Primer |
| | | 09 | Pembiayaan Darah |
| | | 10 | Penggunaan Darah Rasional |
| | | 11 | Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah |
| | | 12 | Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan |
| | | 13 | Akreditasi Puskesmas |
| | | 14 | Puskesmas Berprestasi |
| | 02 | | Upaya Kesehatan Rujukan |
| | | 01 | Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Bergerak, Pratama, Publik, Privat dan Khusus |
| | | 02 | Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi, dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK) |
| | | 03 | Pelayanan Rumah Sakit Privat (SPGDT <i>Call</i> 119, Rekayasa Jaringan, Geriatri, <i>Medical Tourism</i> , Hiperbarik) |
| | | 04 | Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain (Pelayanan Kanker, Rujukan Regional dan Pencegahan Froud) |
| | | 05 | Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan (Keselamatan Pasien, Jantung dan Pembuluh Darah, Ginjal, HIV/AIDS, Tim Reproduksi Penguatan Rumah Sakit Vertikal dan PPDSBK) |
| | | 06 | Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (Biaya Klaim) |
| | | 07 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa |
| | | 08 | Badan Pengawas Rumah Sakit |
| | | 09 | Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanaman Modal Asing (Usulan Penetapan, Rekomendasi, Profil dan Data Rumah Sakit, <i>Self-Instrument Assessment</i> , Keputusan dan Sertifikat) |
| | | 10 | Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lain (Standar Nasional, Standar Internasional, Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional dan Penyurvei) |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | 03 | Keperawatan dan Keteknisian Medis |
| | | 01 | Pelayanan Keperawatan Dasar |
| | | 02 | Pelayanan Keperawatan Profesional Rumah Sakit |
| | | 03 | Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum |
| | | 04 | Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus |
| | | 05 | Bina Pelayanan Kebidanan |
| | | 06 | Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik |
| | | 04 | Penunjang Medik dan Saraba Kesehatan |
| | | 01 | Mikrobiologi dan Imunologi (Laboratorium Kesehatan, Klinik, Puskesmas, dan Mikrobiologi Kultur) |
| | | 02 | Patologi dan Toksikologi (PNPME, Sarana Kesehatan) |
| | | 03 | Radiologi (Pelayanan, Dosis Radiasi Nasional, Radio Terapi, <i>Telemedicine</i> , Radiologi Diagnostik, Teleradiologi) |
| | | 04 | Perizinan dan Sertifikasi |
| | | 05 | Sarana dan Prasarana Kesehatan (Bangunan Rumah Sakit Kelas A,B,C, Ruang Gawat Darurat, Ruang Operasi, Ruang Perawatan Intensif) |
| | | 06 | Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK, Rumah Sakit, Puskesmas, Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit dan Puskesmas) |
| | | 07 | Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota) |
| | | 05 | Kesehatan Jiwa |
| | | 01 | Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Jiwa, Kegawatdaruratan dan Promosi Kesehatan) |
| | | 02 | Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | 06 | Etikolegal dan <i>Assessment</i> |
| | | 01 | Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan serta Penanganan Salah Lainnya terhadap Orang dengan Penderita Gangguan Jiwa |
| | | 02 | <i>Visum et Repertum</i> |
| | | 07 | Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol |
| | | 01 | Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) |
| | | 02 | Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol |

| | | | |
|--|----|---|--|
| | | 03 | Wajib Laport Pecandu Narkoba |
| | | 04 | Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau |
| | 08 | Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko | |
| | | 01 | Kesehatan Jiwa di Sekolah |
| | | 02 | Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana |
| | | 03 | Penanggulangan Autisme |
| | | 04 | Kesehatan Jiwa pada Kelompok Berisiko |
| | | 05 | Psikologi Awal (PFA) bagi Petugas Siaga Bencana |
| | 02 | Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | |
| | | 01 | Surveian, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra |
| | | 01 | Surveian dan Respons Kejadian Luar Biasa (KLB)(Difteri, Polio, Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pra TAS Filariasis, Surveian Influenza, Keracunan Pangan) |
| | | 02 | Pekan Imunisasi Nasional |
| | | 03 | <i>Cold chain</i> bagi Petugas Imunisasi |
| | | 04 | Introduksi Imunisasi DPT-HB-HIB (<i>Pentavalent</i>) pada Bayi |
| | | 05 | Imunisasi bagi Petugas Kesehatan |
| | | 06 | Imunisasi di Daerah Sulit |
| | | 07 | Imunisasi TT bagi Wanita Usia Subur |
| | | 08 | Imunisasi bagi Masyarakat Umum |
| | | 09 | Vaksin dan Serum Program Imunisasi, Pencanangan Vaksin baru DPT-HB-HIB |
| | | 10 | Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus, dan HIB B/ <i>Hemophilus Influenza</i> tipe B |
| | | 11 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan |
| | | 12 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan pelabuhan Pemberian ICV (<i>Internasional Certificate Vaccine</i>) |
| | | 13 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Hapus Serangga dan Hapus Tikus |
| | | 14 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Darat |
| | | 15 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Vaksinasi Meningitis pada RS, KKP, dan Poliklinik |
| | | 16 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | | Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan |
| | | 17 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Obat dan P3K Kapal |
| | | 18 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kesehatan Nakhoda/Pilot dan ABK/Pesawat |
| | | 19 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Air Bersih di Kapal |
| | | 20 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Fumigasi di Kapal |
| | | 21 | Kesehatan Matra Mudik Sehat |
| | | 22 | Kesehatan Matra bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut, Penumpang Pesawat Udara |
| | | 23 | Kesehatan Matra Migran |
| | | 24 | Kesehatan Matra Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik |
| | | 25 | Kesehatan Matra Penanggulangan Kesehatan Akibat Gangguan Kamtibmas |
| | | 26 | Kesehatan Matra Transmigrasi bagi Tenaga Kesehatan |
| | | 02 | Pengendalian Penyakit Menular Langsung |
| | | 01 | Pengendalian Tuberkulosis/Pengendalian Penyakit TB |
| | | 02 | Pengendalian TB <i>Multi Drug Resistance</i> , TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB |
| | | 03 | Laboratorium TB |
| | | 03 | Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual |
| | | 01 | Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP)/ <i>Integrated Bio-Behavioral Surveillance</i> (IBBS) |
| | | 02 | <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV) |
| | | 03 | Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling, dan Tes |
| | | 04 | Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV |
| | | 04 | Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut |
| | | 01 | <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV) |
| | | 02 | Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) |
| | | 05 | Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pernapasan |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 01 | Diare |
| | | 02 | Tifoid |
| | | 03 | Hepatitis |
| | | 06 | Pengendalian Kusta dan Frambusia |
| | | 01 | Kusta |
| | | 02 | Frambusia |
| | | 03 | Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK) |
| | | 07 | Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang |
| | | 01 | Pengendalian Malaria (Kelambu Berinsektisida (LLIN, Malaria, Crosschecker Mikroskopis Malaria) |
| | | 02 | Pengendalian Arbovirosis (DBD, Chikungunya, Ebola) |
| | | 08 | Pengendalian Zoonosis |
| | | 01 | Penyakit Flu Burung |
| | | 02 | Vaksin Anti Rabies (VAR) baru |
| | | 03 | Penyakit Pes |
| | | 04 | Penyakit Flu Baru (H1N1) |
| | | 09 | Pengendalian Filariasis dan Kecacingan |
| | | 01 | Filariasis |
| | | 02 | Kecacingan |
| | | 03 | <i>Schistosomiasis</i> |
| | | 10 | Pengendalian Vektor |
| | | 11 | Pengendalian Penyakit Tidak Menular |
| | | 12 | Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah |
| | | 01 | Penyakit Jantung |
| | | 02 | Penyakit Pembuluh Darah |
| | | 03 | Penyakit Hipertensi |
| | | 04 | Penyakit Stroke |
| | | 13 | Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik |
| | | 01 | Penyakit Diabetes Melitus |
| | | 02 | Penyakit Gangguan Metabolik |
| | | 03 | Penyakit Gangguan Tiroid |
| | | 04 | Gangguan Obesitas |
| | | 14 | Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif |
| | | 01 | Penyakit Akibat Tembakau |
| | | 02 | Asma, Lupus, Talasemia |

| | | | |
|--|----|--|---|
| | | 03 | Pengendalian Penyakit Kanker |
| | 15 | Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan | |
| | | 01 | Pengendalian Cedera |
| | | 02 | Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas |
| | | 03 | Penanganan Kesehatan Akibat Tindak Kekerasan |
| | 16 | Penyehatan Lingkungan | |
| | | 01 | Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Pengawasan Kualitas Air Minum |
| | | 02 | Sanitasi Total Berbasis Masyarakat |
| | 17 | Penyehatan Pemukiman dan Tempat-tempat Umum | |
| | | 01 | Higiene Sanitasi dan Bangunan Umum |
| | | 02 | Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan |
| | | 03 | Pengendalian Faktor Risiko di Rumah dan Tempat Umum |
| | 18 | Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat | |
| | | 01 | Penanggulangan Kedaruratan Bidang Kesehatan Lingkungan |
| | | 02 | Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan |
| | | 03 | Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat |
| | | 04 | Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Dasar |
| | 19 | Higiene Sanitasi Pangan | |
| | | 01 | Makanan Jajanan |
| | | 02 | Restoran/Rumah Makan |
| | | 03 | Jasa Boga |
| | | 04 | Depo Air Minum |
| | 20 | Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi | |
| | | 01 | Medis Fasyankes |
| | | 02 | Limbah Medis (<i>Free Mercury</i>) |
| | | 03 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) |
| | | 04 | Pengamanan Dampak Kesehatan Radiasi Non Pengion |
| | 21 | Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | |
| | | 01 | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium |
| | | 02 | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Pengendalian Penyakit |
| | | 03 | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Kesehatan |

| | | | |
|--|----|---------------------------------|---|
| | | | Lingkungan |
| | | 04 | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Kesehatan Matra |
| | | 05 | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Model dan Teknologi Tepat Guna |
| | | 06 | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi |
| | | 07 | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pelayanan pada Instansi |
| | | 22 | Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan |
| | | 01 | <i>Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)</i> |
| | | 02 | <i>Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)</i> |
| | | 03 | Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal |
| | | 23 | Sertifikat |
| | | 01 | <i>Health Certificate</i> |
| | | 02 | <i>International Certificate of Vaccination</i> |
| | | 03 | Surat Keterangan Pengujian Kesehatan Nakhoda/Pilot dan Anak Buah |
| | | 04 | Kapal Laut/Pesawat Udara |
| | | 05 | Sertifikat Air Bersih |
| | | 06 | Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal |
| | | 07 | Rekomendasi Hasil Uji Laboratorium Rujukan |
| | 03 | Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | |
| | | 01 | Gizi Makro |
| | | 01 | Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam Rangka Percepatan Perbaikan Gizi (1000 HPK, <i>Stunting</i>) |
| | | 02 | Pemantauan Pertumbuhan Anak (Posyandu) |
| | | 02 | Gizi Mikro |
| | | 01 | Upaya Penanggulangan Masalah Gizi Mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi) |
| | | 02 | Manajemen Taburia |
| | | 03 | Upaya Penanggulangan Masalah Gizi Mikro Lainnya |
| | | 03 | Gizi Klinik dan Dietetik |
| | | 01 | Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi |
| | | 02 | Tatalaksana Anak Gizi Buruk |
| | | 03 | Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 04 | Konsumsi Makan dan Jasa Makanan |
| | | 01 | Makanan Pendamping ASI |
| | | 02 | ASI Eksklusif |
| | | 03 | Pedoman Gizi Seimbang |
| | | 04 | Makanan Bayi dan Anak |
| | | 05 | Bufer Stok Makanan Pendamping ASI |
| | | 06 | Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Kurang Gizi dan Makanan Tambahan Anak Sekolah |
| | | 05 | Kewaspadaan Gizi |
| | | 01 | Surveiian Gizi |
| | | 02 | Epidemiologi Kasus Gizi Buruk |
| | | 03 | Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana |
| | | 04 | Jejaring Informasi Pangan dan Gizi |
| | 04 | | Kesehatan Ibu |
| | | 01 | Kesehatan Ibu Hamil |
| | | 01 | Pelayanan Antenatal Terpadu |
| | | 02 | Pelayanan Kelas Ibu Hamil |
| | | 03 | Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) |
| | | 02 | Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas |
| | | 01 | Kemitraan Bidan dan Dukun |
| | | 02 | Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) |
| | | 03 | Supervisi Fasilitatif |
| | | 03 | Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi |
| | | 01 | Audit Maternal Perinatal |
| | | 02 | Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat |
| | | 03 | Tanda Bahaya pada Kehamilan |
| | | 04 | Surveiian Kematian Ibu |
| | | 04 | Keluarga Berencana |
| | | 01 | Pelayanan KB Pasca Persalinan |
| | | 02 | Pelatihan KB Pasca Persalinan |
| | | 05 | Perlindungan Kesehatan Produksi |
| | | 01 | Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) |
| | | 02 | Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) |
| | | 03 | Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap |

| | | | |
|--|----|----------------|---|
| | | | Perempuan |
| | | 04 | Pengarus Utama Gender Bidang Kesehatan (PUGBK) |
| | 05 | Kesehatan Anak | |
| | | 01 | Kelangsungan Hidup Bayi |
| | | 01 | Pelayanan Kesehatan Neonatal |
| | | 02 | Manajemen Asfiksia |
| | | 03 | Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) |
| | | 04 | Pencegahan Infeksi |
| | | 02 | Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah |
| | | 01 | Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang) |
| | | 02 | Rujukan Tumbuh Kembang |
| | | 03 | Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) |
| | | 03 | Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko |
| | | 01 | <i>Screening Hypothyroid Congenital</i> |
| | | 02 | Surveian Kesehatan Anak |
| | | 03 | Surveian Kesehatan Bawaan |
| | | 04 | Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja |
| | | 01 | Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit |
| | | 02 | Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja |
| | | 03 | Usaha Kesehatan Sekolah |
| | | 05 | Perlindungan Kesehatan Anak |
| | | 01 | Korban Kekerasan terhadap Anak |
| | | 02 | Anak dengan Distabilitas |
| | | 03 | Anak Terlantar/Anak Jalanan di Panti |
| | | 04 | Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lapas/Rutan |
| | | 05 | Anak Kelompok Terasing/Kelompok Minoritas |
| | | 06 | Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer |
| | | 01 | Kesehatan Tradisional Terampil |
| | | 01 | Akupresur |
| | | 02 | Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional |
| | | 03 | Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes |
| | | 04 | Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya |
| | | 02 | Kesehatan Tradisional Ramuan |

| | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|
| | | 01 | <i>Health Tourism</i> |
| | | 02 | Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) |
| | | 03 | Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) |
| | | 04 | Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional |
| | | 05 | Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes |
| | 03 | Kesehatan Alternatif dan Komplementer | |
| | | 01 | Akupunktur |
| | | 02 | Obat Herbal/Obat Tradisional |
| | | 03 | Integrasi Yankestrad |
| | | 04 | Pelayanan Alternatif Komplementer Lainnya |
| | 04 | Penapisan dan Kemitraan | |
| | | 01 | Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) |
| | | 02 | Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer |
| | | 03 | Penapisan Pengobatan Alternatif Asing |
| | | 04 | Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer |
| | | 05 | Pengobatan Tradisional (Lokal) |
| | | 06 | Asosiasi Pengobat Tradisional |
| | 07 | Kesehatan Kerja dan Olahraga | |
| | | 01 | Pelayanan Kesehatan Kerja |
| | | 01 | Penyakit Akibat Kerja |
| | | 02 | Pemeriksaan Kesehatan Pekerja |
| | | 03 | Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia |
| | | 02 | Kapasitas Kerja |
| | | 01 | Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif |
| | | 02 | Kapasitas Kesehatan Kerja |
| | | 03 | TAPI ASI |
| | | 03 | Lingkungan Kerja |
| | | 01 | Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP |
| | | 02 | K3 Perkantoran |
| | | 03 | K3 Rumah Sakit |
| | | 04 | Biomonitoring Efek Kesehatan |
| | | 05 | K3 Puskesmas |
| | | 06 | <i>Review</i> Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan |
| | | 04 | Kemitraan Kesehatan Kerja |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | 01 | Pengembangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja |
| | | 02 | Kesehatan Nelayan |
| | | 03 | Integrasi Pos UKK |
| | | 04 | Kota Percontohan |
| | | 05 | Penguatan Profesi |
| | | 05 | Kesehatan perkotaan |
| | | 01 | Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan |
| | | 02 | Forum Kota |
| | | 06 | Kesehatan Olahraga |
| | | 01 | Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja |
| | | 02 | Kebugaran Jasmani bagi Calon Jamaah Haji |
| | | 03 | Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah |
| | | 04 | Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas |
| | | 05 | Olahraga bagi Usia Lanjut |
| | | 06 | Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat |
| | | 08 | Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
| | | 01 | Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) |
| | | 01 | Harga Jual Obat Generik |
| | | 02 | Harga Jual Obat Generik Berdagang |
| | | 03 | Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat |
| | | 02 | Pengadaan Obat |
| | | 01 | Pengadaan Vaksin Reguler |
| | | 02 | Obat <i>Essential</i> |
| | | 03 | Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kota dan Nasional |
| | | 04 | Obat Program Malaria |
| | | 05 | Obat Program Kesehatan Anak |
| | | 06 | Obat Program Kesehatan Ibu |
| | | 07 | Obat Program Gizi |
| | | 08 | Obat Anti Tuberkulosis |
| | | 09 | Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2PKTP) |
| | | 10 | Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia |
| | | 11 | Obat Penderita Talasemia |
| | | 12 | Obat Psikotropika |
| | | 13 | Obat <i>Anti Retro Viral</i> |

| | | |
|--|----|--|
| | 03 | Perbekalan Kesehatan |
| | 01 | Gudang Farmasi |
| | 02 | Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan |
| | 03 | Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
| | 04 | Pengadaan Reagen <i>Screening</i> Darah |
| | 05 | Obat Bufer Stok |
| | 06 | Hasil Stok Opname Obat |
| | 09 | Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan |
| | 01 | Alat Kesehatan |
| | 01 | Alat Kesehatan |
| | 02 | Kompendium Alat Kesehatan |
| | 03 | Pelabelan Alat Kesehatan dan PKRT |
| | 04 | <i>Post Market</i> & Surveian Alat Kesehatan |
| | 05 | Produk Alat Kesehatan Elektronik |
| | 06 | Produk Alat Kesehatan Non Elektronik |
| | 02 | Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat |
| | 01 | Industri Farmasi |
| | 02 | Pedagang Besar Farmasi |
| | 03 | Pedagang Eceran Obat |
| | 04 | Penyalur Alat Kesehatan |
| | 05 | Toko Alat Kesehatan |
| | 06 | Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan |
| | 03 | Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) |
| | 01 | Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> |
| | 02 | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga |
| | 03 | PKRT Kelas III |
| | 04 | PKRT Kelas II dan PKRT Kelas I |
| | 05 | Perusahaan Rumah Tangga PKRT |
| | 06 | Penggunaan Pestisida di Rumah Tangga |
| | 07 | <i>Post Market</i> dan Surveian PKRT |
| | 10 | Kefarmasian (Standarisasi, Klinis, Komunitas, dan Obat Tradisional) |
| | 01 | Pelayanan Kefarmasian |
| | 01 | <i>Visite</i> untuk Apoteker |

| | | | |
|--|----|-------------------------------------|---|
| | | 02 | Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien |
| | | 03 | Penulisan Resep |
| | 02 | Farmasi Klinik | |
| | | 01 | <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Artritis Rematik |
| | | 02 | <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Asma |
| | | 03 | <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Flu Burung |
| | | 04 | <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Hati |
| | | 05 | <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Diabetes Melitus |
| | | 06 | <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Saluran Pernapasan |
| | | 07 | <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Penyakit Tuberkulosis |
| | | 08 | <i>Pharmaceutical Care</i> Lainnya |
| | | 09 | <i>Dispensing</i> Sediaan Steril |
| | | 10 | Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Narkotika |
| | | 11 | <i>Pharmaceutical Care</i> untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner, Fokus Sindrom, Koroner Akut |
| | 03 | Farmasi Komunitas | |
| | | 01 | Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas |
| | | 02 | Kefarmasian di Rumah (<i>Home Pharmacy Care</i>) |
| | | 03 | Kefarmasian untuk Pasien Pediatri |
| | | 04 | Kefarmasian untuk Penyakit Malaria |
| | | 05 | Farmasi di Rumah Sakit |
| | 04 | Penggunaan Obat Rasional | |
| | | 01 | Obat Rasional |
| | | 02 | Informasi Obat |
| | | 03 | Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik |
| | | 04 | Pemantauan Terapi Obat |
| | 11 | Produksi dan Distribusi Kefarmasian | |
| | | 01 | Obat Tradisional |
| | | 01 | Farmakope Indonesia |
| | | 02 | Farmakope Herbal Indonesia |
| | | 03 | Suplemen I Farmakope Indonesia |
| | | 04 | Suplemen II Farmakope Indonesia |
| | | 05 | Suplemen III Farmakope Indonesia |
| | | 06 | Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia |
| | | 07 | Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia |
| | | 08 | Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 09 | Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) |
| | | 10 | Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) |
| | | 11 | Usaha Jamu Gendong (UJG) |
| | | 12 | Usaha Jamu Racik (UJR) |
| | | 13 | Farmakope Herbal Indonesia dan Suplemennya Versi Bahasa Inggris |
| | | 02 | Kosmetik dan Makanan |
| | | 01 | Keamanan Pangan |
| | | 02 | Kosmetika bagi Petugas |
| | | 03 | Industri Rumah Tangga bagi Petugas |
| | | 04 | Makanan Jajanan Anak Sekolah |
| | | 05 | Kodeks Kosmetika Indonesia |
| | | 06 | Materia Kosmetika Bahan |
| | | 03 | Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus |
| | | 01 | Narkotika dan Psikotropika |
| | | 02 | Prekursor Farmasi |
| | | 03 | Sediaan Farmasi Khusus |
| | | 04 | Persetujuan Ekspor dan Impor |
| | | 05 | Pelaksanaan Perizinan Impor dan ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi |
| | | 04 | Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat |
| | | 01 | <i>Indonesian Pharmaceutical Industry Directory</i> |
| | 12 | | Surat Keterangan, Sertifikat, dan Perizinan |
| | | 01 | Surat Keterangan |
| | | 01 | Surat Keterangan <i>Special Access Scheme</i> (SAS) |
| | | 02 | Surat Keterangan Alat Kesehatan |
| | | 03 | Sertifikat Produksi PKRT |
| | | 04 | Surat Keterangan PKRT |
| | | 05 | Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan |
| | | 06 | Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan |
| | | 07 | Perizinan dan Pengawasan Alat Kesehatan |
| | | 08 | Perizinan Penyalur Alat Kesehatan |
| | | 09 | Sertifikasi Produksi PKRT |
| | | 10 | Surat Keterangan PKRT |
| | 13 | | Penanggulangan Krisis Kesehatan |
| | | 01 | Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 01 | Pencegahan dan Mitigasi |
| | | 02 | Kesiapsiagaan |
| | | 02 | Tanggap Darurat dan Pemulihan |
| | | 01 | Tanggap Darurat |
| | | 02 | Pemulihan |
| | | 03 | Pemantauan dan Informasi |
| | | 01 | Pemantauan |
| | | 02 | Informasi |
| | | 04 | Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan |
| | | 05 | Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana |
| | 14 | | Pengembangan dan Jaminan Kesehatan |
| | | 01 | Tersedianya Data NHA Setiap Tahun |
| | | 02 | Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN |
| | 15 | | Inteligensia Kesehatan |
| | | 01 | Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan |
| | | 01 | Inteligensia Anak |
| | | 02 | Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia |
| | | 02 | Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan |
| | | 01 | Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan |
| | | 02 | Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Syaraf |
| | 16 | | Kesehatan Haji |
| | | 01 | Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji |
| | | 01 | Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji |
| | | 02 | Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Kota |
| | | 03 | Klaim Persyaratan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP |
| | | 04 | Pelayanan Kesehatan Embarkasi |
| | | 05 | Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) |
| | | 06 | Rekrutmen Tenaga Musliman |
| | | 02 | Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji |
| | | 01 | Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji |
| | | 02 | Kesehatan Haji di Kota |

| | | | |
|--|----|-------------------|--|
| | | 03 | Kesehatan Haji Terpadu |
| | | 04 | Pemeriksaan Jasa Boga Katering Jemaah Haji |
| | | 05 | Vaksinasi Jemaah Haji |
| | | 06 | Sanitasi Asrama Haji |
| | | 07 | Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi |
| | 17 | Promosi Kesehatan | |
| | | 01 | Sarana Promosi Kesehatan |
| | | 01 | <i>Booklet</i> |
| | | 02 | Poster |
| | | 03 | <i>Leaflet</i> |
| | | 04 | Pamflet |
| | | 05 | Lembar Balik |
| | | 06 | Selebaran |
| | | 07 | Buletin |
| | | 08 | Festival |
| | | 09 | Lomba |
| | | 10 | Pameran |
| | | 11 | Seminar |
| | | 12 | Iklan Layanan Masyarakat |
| | | 13 | Film |
| | | 14 | Radio <i>Spot</i> |
| | | 02 | Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran |
| | | 01 | Saka Bhakti Husada |
| | | 02 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | 03 | Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan |
| | | 04 | Kawasan Tanpa Rokok |
| | | 05 | Kerja Sama dengan Swasta di Bidang Kesehatan |
| | | 06 | Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan |
| | | 07 | Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | 08 | Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | 03 | Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan |
| | | 01 | Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan |
| | | 02 | Kampanye Promosi Kesehatan |
| | | 03 | Video Animasi Promosi Kesehatan |
| | | 04 | Hari Kesehatan |
| | | 01 | Hari Kesehatan Nasional |
| | | 02 | Hari Kesehatan Dunia |
| | | 03 | Hari Tanpa Tembakau Sedunia |
| | | 04 | Hari-hari Besar Kesehatan Lainnya |
| | 18 | | Konsil Kedokteran Indonesia |
| | | 01 | Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi |
| | 19 | | Data dan Informasi |
| | | 01 | Statistik Kesehatan |
| | | 01 | Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan |
| | | 02 | Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan |
| | | 02 | Analisis dan Diseminasi Informasi |
| | | 01 | Analisis Data Kesehatan |
| | | 02 | Diseminasi Informasi Kesehatan |
| | | 03 | Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan |
| | | 01 | Pengembangan Sistem Informasi |
| | | 02 | Bank Data |
| KT | | | Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| | | 01 | Perencanaan Tenaga Kerja |
| | | 01 | Perencanaan Tenaga Kerja Makro |
| | | 01 | Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional |
| | | 02 | Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional |
| | | 03 | Analisis Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional |
| | | 04 | Pelaksanaan kebijakan Perencanaan Tenaga kerja Daerah |
| | | 05 | Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah |
| | | 06 | Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | | Kerja Daerah |
| | | 02 | Perencanaan Tenaga Kerja Mikro |
| | | 01 | Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah |
| | | 02 | Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah |
| | | 03 | Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah |
| | | 04 | Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta |
| | | 05 | Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta |
| | | 06 | Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta |
| | | 03 | Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas |
| | | 01 | Penerapan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan |
| | | 02 | Bimbingan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Ketenagakerjaan |
| | | 03 | Program Pengembangan standarisasi Kompetensi Pelatihan Ketenagakerjaan |
| | | 04 | Penyusunan Materi Pelatihan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Ketenagakerjaan |
| | | 05 | Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan |
| | | 06 | Pengembangan Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan |
| | | 07 | Pengembangan Program Pelatihan Ketrasmigrasian |
| | | 08 | Pengembangan Penyusunan Materi Pelatihan Ketrasmigrasian |
| | | 04 | Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja |
| | | 01 | Akreditasi Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja |
| | | 02 | Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan |
| | | 03 | Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan |
| | | 04 | Pengembangan Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 05 | Pengembangan Standar Mutu Lembaga Pelatihan |
| | | 06 | Pengembangan Bimbingan Penerapan Standar Mutu |
| | | 07 | Sistem Pendanaan Pelatihan |
| | | 08 | Kerja Sama Antar Lembaga |
| | 05 | | Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan |
| | | 01 | Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan |
| | | 02 | Pengembangan Karier Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan |
| | | 03 | Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta |
| | | 04 | Pengembangan Karier Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta |
| | | 05 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan |
| | | 06 | Pengembangan Karier Tenaga Pelatihan |
| | | 07 | Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan |
| | | 08 | Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan |
| | 06 | | Pelatihan 4 Bina Pemagangan |
| | | 01 | Bina Program Pemagangan Dalam Negeri |
| | | 02 | Bina Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri |
| | | 03 | Bina Program Pemagangan Luar Negeri |
| | | 04 | Bina Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri |
| | | 05 | Perizinan dan Rekomendasi |
| | | 06 | Advokasi dan Perlindungan |
| | | 07 | Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan |
| | | 08 | Pemagangan Jejaring Pemagangan |
| | 07 | | Produktivitas dan Kewirausahaan |
| | | 01 | Pengembangan Promosi Produktivitas dan Kewirausahaan |
| | | 02 | Kerja Sama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan |
| | | 03 | Pengembangan Sistem dan Metode Produktivitas |
| | | 04 | Pengembangan Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|---|
| | | 05 | Pengembangan Pengukuran Produktivitas |
| | | 06 | Kajian Produktivitas |
| | | 07 | Pengembangan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan |
| | | 08 | Pengembangan Bimbingan Konsultasi |
| | 02 | Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja | |
| | | 01 | Pengembangan Pasar Kerja |
| | | 01 | Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri |
| | | 02 | Informasi Pasar Kerja Luar Negeri |
| | | 03 | Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri |
| | | 04 | Analisis Pasar Kerja Luar Negeri |
| | | 05 | Bursa Kerja Dalam Negeri |
| | | 06 | Bursa Kerja Luar Negeri |
| | | 07 | Analisis dan Informasi Jabatan |
| | | 08 | Pengembangan Sistem Analisis Jabatan |
| | | 02 | Penetapan Tenaga Kerja Dalam Negeri |
| | | 01 | Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL) |
| | | 02 | Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja |
| | | 03 | Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita |
| | | 04 | Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia |
| | | 05 | Penyuluhan Jabatan |
| | | 06 | Bimbingan Jabatan |
| | | 07 | Pengembangan Pemberdayaan Kompetensi Pengantar Kerja |
| | | 08 | Kerja Sama antar Lembaga |
| | | 03 | Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri |
| | | 01 | Perizinan Kelembagaan |
| | | 02 | Evaluasi Kinerja |
| | | 03 | Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI |
| | | 04 | Fasilitasi Penyediaan TKI |
| | | 05 | Perlindungan Advokasi dan Kepulangan TKI |
| | | 06 | Sarana dan Perlindungan |
| | | 07 | Kerja Sama Bilateral |
| | | 08 | Kerja Sama Regional dan Multilateral |
| | | 04 | Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 01 | Tenaga Kerja Mandiri |
| | | 02 | Tenaga Kerja Sektor Informal |
| | | 03 | Pengembangan Padat Karya Perkotaan |
| | | 04 | Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna |
| | | 05 | Penyebarluasan Terapan Teknologi Tepat Guna |
| | | 06 | Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama Antar Lembaga |
| | | 07 | Pemberdayaan Pendamping |
| | | 08 | Kerja Sama antar Lembaga |
| | | 05 | Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing |
| | | 01 | Analisis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri |
| | | 02 | Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing |
| | | 03 | Analisis Rencana Pembangunan Tenaga Kerja asing Sektor Jasa |
| | | 04 | Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa |
| | | 05 | Pengendalian |
| | | 06 | Kerja Sama Kelembagaan |
| | | 06 | Standarisasi Profesi |
| | | 01 | Dokumen yang Berhubungan dengan Sistem Informasi dan Registrasi |
| | | 02 | Dokumen yang Berhubungan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja |
| | | 03 | Pembakuan Dokumen yang Berhubungan dengan Kompetensi dan Akreditasi Kelembagaan Sertifikasi |
| | | 04 | Pembakuan Dokumen yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan konvensi dan persidangan |
| | 03 | | Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
| | | 01 | Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, Analisis Diskriminasi |
| | | 01 | Peraturan Perusahaan |
| | | 02 | Perjanjian Kerja Bersama |
| | | 03 | Perjanjian Kerja |
| | | 04 | Program Kesejahteraan |
| | | 05 | Fasilitasi Kesejahteraan |
| | | 06 | Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja |
| | | 07 | Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja |
| | | 02 | Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 01 | Organisasi Pekerja |
| | | 02 | Organisasi Pengusaha |
| | | 03 | Lembaga Kerja Sama BIPARTIT |
| | | 04 | Lembaga Kerja Sama TRIPARTIT |
| | | 05 | Pemasyarakatan Hubungan Industrial |
| | | 06 | Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial |
| | | 03 | Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| | | 01 | Penerapan Standar Pengupahan |
| | | 02 | Pengurusan Pengupahan |
| | | 03 | Pengurusan Jamsostek dalam Hubungan Kerja |
| | | 04 | Ke pesertaan Jamsostek dalam Hubungan Kerja |
| | | 04 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| | | 01 | Pencegahan dini Perselisihan Hubungan Industrial |
| | | 02 | Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan |
| | | 05 | Penyelenggaraan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial |
| | | 01 | Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial |
| | | 02 | Evaluasi dan Pelaporan |
| | | 06 | Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| | | 01 | Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan |
| | | 02 | Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan |
| | 04 | | Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan |
| | | 01 | Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
| | | 01 | Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat |
| | | 02 | Pengawasan Norma Pengupahan |
| | | 03 | Pengawasan Norma Hubungan Kerja |
| | | 04 | Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat |
| | | 05 | Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 06 | Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek |
| | 02 | | Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak |
| | | 01 | Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi |
| | | 02 | Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan |
| | | 03 | Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak |
| | | 04 | Pengawasan Norma Pelindungan Tenaga Kerja Anak |
| | | 05 | Kerja Sama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan |
| | | 06 | Kerja Sama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak |
| | | 07 | Advokasi Tenaga Kerja Perempuan |
| | | 08 | Advokasi Tenaga Kerja Anak |
| | 03 | | Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| | | 01 | Pengawasan Norma Mekanik |
| | | 02 | Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan |
| | | 03 | Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan |
| | | 04 | Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran |
| | | 05 | Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja |
| | | 06 | Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja |
| | | 07 | Pengawasan Norma Lingkungan Kerja |
| | | 08 | Pengawasan Norma Bahan Berbahaya |
| | | 09 | Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 |
| | | 10 | Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3 |
| | 04 | | Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan |
| | 05 | | Bina Penegakan Hukum |
| | | 01 | Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan |
| | | 02 | Penindakan Norma Ketenagakerjaan |
| | | 03 | Teknik Penyidikan Norma Ketenagakerjaan |
| | | 04 | Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan |
| | | 05 | Pengembangan Pemberdayaan PPNS |
| | | 06 | Pengembangan Sarana dan Prasarana PPNS |
| | | 07 | Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum |
| | | 08 | Kerja Sama Pemeriksaan dan Penyidikan |
| | 05 | | Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| | | 01 | Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan |

| | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| | | | dan Kesehatan Kerja (K3) |
| | | 01 | Analisis dan Standarisasi Bidang K3 |
| | | 02 | Hasil Kajian, Perencanaan, dan Penerapan Teknologi dan Alih Teknologi K3 |
| | | 03 | Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3 |
| | | 02 | Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 |
| | | 01 | Program, Analisis dan Standarisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 |
| | | 02 | Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 |
| | | 03 | Kerja Sama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 |
| | | 04 | Kerja Sama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 |
| | | 05 | Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 |
| KI | Komunikasi dan Informatika | | |
| | 01 | Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | |
| | | 01 | Penataan Sumber Daya |
| | | 01 | Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap |
| | | 02 | Penataan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat |
| | | 03 | Alokasi Dinas Bergerak Darat |
| | | 04 | Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran |
| | | 05 | Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit |
| | | 06 | Pengelolaan Orbit Satelit Notifikasi dan Penataan Filing Satelit |
| | | 07 | Pengelolaan Orbit Satelit Tata Kelola Hubungan antar Penyelenggara |
| | | 08 | Ekonomi Sumber Daya Analisa Industri dan Ekonomi |
| | | 09 | Ekonomi Sumber Daya Penanganan Izin Pita |
| | | 10 | Harmonisasi Teknik Spektrum Teknik Spektrum Antar Lembaga |
| | | 11 | Harmonisasi Teknik Spektrum Harmonisasi dan Notifikasi |
| | | 02 | Operasi Sumber Daya |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 01 | Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Tetap |
| | | 02 | Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat |
| | | 03 | Pelayanan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran |
| | | 04 | Pelayanan Alokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit |
| | | 05 | Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk |
| | | 06 | Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Operator Radio |
| | | 07 | Penanganan Biaya Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio |
| | | 08 | Penanganan Biaya Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio |
| | | 09 | Konsultasi dan Informasi Data Operasi Sumber Daya |
| | | 10 | Konsultasi Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya |
| | | 03 | Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika |
| | | 01 | Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum |
| | | 02 | Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum |
| | | 03 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum |
| | | 04 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum |
| | | 05 | Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial |
| | | 06 | Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial |
| | | 07 | Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika |
| | | 08 | Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika |
| | | 09 | Monitoring Frekuensi Radio |
| | | 04 | Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika |
| | | 01 | Teknik Pos dan Telekomunikasi |
| | | 02 | Teknik Komunikasi Radio |
| | | 03 | Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi |
| | | 04 | Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar |

| | | | |
|--|----|-------------------------------------|---|
| | | 05 | Standar dan Audit Perangkat Lunak |
| | | 06 | Pengujian Perangkat Telekomunikasi |
| | 02 | Penyelenggaraan Pos dan Informatika | |
| | | 01 | Pos |
| | | 01 | Layanan Pos Universal |
| | | 02 | Penerapan Layanan Pos Universal |
| | | 03 | Layanan Pos Komersial Tata Kelola Layanan |
| | | 04 | Layanan Pos Komersial Data dan Informasi Layanan |
| | | 05 | Prangko |
| | | 06 | Filateli |
| | | 07 | Iklim Usaha Pos Universal |
| | | 08 | Iklim Usaha Pos Komersial |
| | | 09 | Penarifan Pos Layanan Pos Universal |
| | | 10 | Penarifan Pos Komersial |
| | | 02 | Telekomunikasi |
| | | 01 | Layanan Jaringan Telekomunikasi Akses |
| | | 02 | Layanan Jaringan Telekomunikasi <i>Backbone</i> |
| | | 03 | Layanan Jasa Telekomunikasi Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi |
| | | 04 | Penomoran Telekomunikasi |
| | | 05 | Penomoran Informatika |
| | | 06 | Tarif Telekomunikasi |
| | | 07 | Interkoneksi Telekomunikasi |
| | | 08 | Kelayakan Sistem Telekomunikasi Jaringan dan Jasa |
| | | 09 | Kelayakan Penerapan Sistem Teknologi Telekomunikasi |
| | | 03 | Penyiaran |
| | | 01 | Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi |
| | | 02 | <i>Database</i> Penyelenggaraan Radio dan Televisi |
| | | 03 | Verifikasi dan Uji Coba Radio |
| | | 04 | Verifikasi dan Uji Coba Televisi |
| | | 05 | Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio |
| | | 06 | Lembaga Penyiaran Swasta Radio |
| | | 07 | Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Televisi |
| | | 08 | Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 09 | Lembaga Penyiaran Swasta Televisi |
| | | 10 | Iklim Usaha Penyiaran Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran |
| | | 11 | Iklim Usaha Penyiaran Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran |
| | | 04 | Telekomunikasi Khusus Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal |
| | | 01 | Analisa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Pemerintah |
| | | 02 | Pelayanan Telekomunikasi Khusus Pemerintah |
| | | 03 | Analisa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah |
| | | 04 | Pelayanan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah |
| | | 05 | Layanan Khusus Penyiaran Radio |
| | | 06 | Layanan Khusus Penyiaran Televisi |
| | | 07 | Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kewajiban Universal |
| | | 08 | Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kewajiban Universal |
| | | 09 | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur |
| | | 10 | Analisa Ekonomis Pengembangan Infrastruktur |
| | | 05 | Pengembangan Pos dan Telekomunikasi |
| | | 01 | Monitoring Pos |
| | | 02 | Evaluasi Pos |
| | | 03 | Analisa Ekonomi Infrastruktur |
| | | 04 | Monitoring Jasa Telekomunikasi |
| | | 05 | Evaluasi Jasa Telekomunikasi |
| | | 06 | Monitoring Penyiaran |
| | | 07 | Evaluasi Penyiaran |
| | | 08 | Pencegahan |
| | | 09 | Penertiban |
| | 03 | | Aplikasi Informatika |
| | | 01 | <i>E-Government</i> |
| | | 01 | Tata Kelola Program <i>E-Government</i> |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|--|
| | | 02 | Tata Kelola Evaluasi <i>E-Government</i> |
| | | 03 | Teknologi <i>E-Government</i> |
| | | 04 | Infrastruktur <i>E-Government</i> |
| | | 05 | Interoperabilitas <i>E-Government</i> |
| | | 06 | Interkonektivitas <i>E-Government</i> |
| | | 07 | Aplikasi Layanan Ke pemerintahan Pusat |
| | | 08 | Aplikasi Pelayanan Ke pemerintahan Daerah |
| | | 09 | Inisiasi Aplikasi Layanan Publik |
| | | 10 | Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik |
| | 02 | <i>E-Business</i> | |
| | | 01 | Tata Kelola Program <i>E-Business</i> |
| | | 02 | Tata Kelola Evaluasi <i>E-Business</i> |
| | | 03 | Teknologi <i>E-Business</i> |
| | | 04 | Interoperabilitas <i>E-Business</i> |
| | | 05 | Interkonektivitas <i>E-Business</i> |
| | | 06 | Aplikasi Layanan <i>E-Business</i> Bidang Usaha Kecil dan Mikro |
| | | 07 | Aplikasi Layanan <i>E-Business</i> Bidang Usaha Menengah dan Besar |
| | 03 | Pemberdayaan Informatika | |
| | | 01 | Perancangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan |
| | | 02 | Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan |
| | | 03 | Pengembangan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus |
| | | 04 | Penerapan Model Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus |
| | 04 | Pemberdayaan Industri Informatika | |
| | | 01 | Pemberdayaan Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika |
| | | 02 | Promosi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika |
| | | 03 | Pemberdayaan Industri Perangkat Informatika Pengguna |
| | | 04 | Pengembangan Produk Industri Perangkat Informatika Pengguna |
| | | 05 | Pemberdayaan Industri Perangkat Lunak |

| | | | |
|--|----|---------------------------------|---|
| | | 06 | Pengembangan Produk Industri Perangkat Lunak |
| | | 07 | Pemberdayaan Industri Konten Multimedia |
| | | 08 | Pengembangan Produk Industri Konten Multimedia |
| | 05 | Keamanan Informatika | |
| | | 01 | Tata Kelola Keamanan Informasi Kelembagaan |
| | | 02 | Tata Kelola Keamanan Informasi Manajemen Risiko |
| | | 03 | Teknologi Keamanan Informasi Infrastruktur |
| | | 04 | Teknologi Keamanan Informasi Aplikasi |
| | | 05 | Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi Infrastruktur |
| | | 06 | Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi Aplikasi |
| | | 07 | Penyidik dan Penindakan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi |
| | | 08 | Penyidikan dan Penindakan Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi |
| | | 09 | Penyidikan Budaya Keamanan Informasi |
| | | 10 | Penindakan Budaya Keamanan Informasi |
| | 04 | Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | | 01 | Komunikasi Publik |
| | | 01 | Tata Kelola Program Komunikasi Publik |
| | | 02 | Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi |
| | | 03 | Pengelolaan Pengumpulan Opini Publik |
| | | 04 | Pengelolaan Pengolahan Opini Publik |
| | | 05 | Pengumpulan Data Layanan Komunikasi Publik |
| | | 06 | Pengolahan Data Layanan Komunikasi Publik |
| | | 02 | Pengolahan dan Penyediaan Informasi |
| | | 01 | Informasi Politik dan Keamanan |
| | | 02 | Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| | | 03 | Informasi Perekonomian Keuangan, Perbankan, dan Jasa |
| | | 04 | Informasi Perekonomian Industri dan Perdagangan |
| | | 05 | Informasi Kesejahteraan Agama, Sosial, dan Budaya |
| | | 06 | Informasi Kesejahteraan Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan |
| | | 03 | Pengelolaan Media Publik |
| | | 01 | Media Cetak |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|---|
| | | 02 | Media Online |
| | | 03 | Media Audio Visual dan Luar Ruangan |
| | 04 | Kemitraan Komunikasi | |
| | | 01 | Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara |
| | | 02 | Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara |
| | | 03 | Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha |
| | | 04 | Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Media dan Dunia Usaha |
| | | 05 | Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi |
| | | 06 | Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi |
| | 05 | Layanan Informasi Internasional | |
| | | 01 | Program Layanan Informasi Media Asing |
| | | 02 | Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Media Asing |
| | | 03 | Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional |
| | | 04 | Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional |
| | | 05 | Program Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri |
| | | 06 | Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Masyarakat Luar |
| | 05 | Pusat Data dan Sarana Informatika | |
| | | 01 | Infrastruktur Informatika |
| | | 01 | Jaringan Infrastruktur |
| | | 02 | Peranti Teknologi Infrastruktur Informatika |
| | | 03 | Keamanan Infrastruktur Informatika |
| | | 02 | Sistem dan Data |
| | | 01 | Sistem Portal dan Konten |
| | | 02 | Sistem Pengumpulan dan Pengolah Data |
| | | 03 | Sistem Pengembangan Aplikasi |
| | | 03 | Pusat Kerja Sama Internasional |
| | | 01 | Kerja Sama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral |
| | | 02 | Kerja Sama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, |

| | | | |
|----|------------------|----|--|
| | | | Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral |
| | | 03 | Kerja Sama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral |
| | | 04 | Kerja Sama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional |
| | | 05 | Kerja Sama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional |
| | | 06 | Kerja Sama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional |
| | | 07 | Kerja Sama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bilateral |
| | | 08 | Kerja Sama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral |
| | | 04 | Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat |
| | | 01 | Pelayanan Informasi Media Baru |
| | | 02 | Pelayanan Informasi Media Konvensional |
| | | 03 | Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Perpustakaan |
| | | 04 | Publikasi Hubungan Masyarakat |
| | | 05 | Analisis Berita Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Opini Publik |
| | | 06 | Hubungan Masyarakat Internal dan Eksternal |
| | | 07 | Bimbingan Teknis Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos |
| | | 08 | Bimbingan Teknis Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Hubungan Masyarakat |
| | | 09 | Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Hubungan Masyarakat |
| KM | Koperasi dan UKM | | |

| | | | |
|--|----|------------------------------|--|
| | 01 | Kelembagaan Koperasi dan UKM | |
| | | 01 | Organisasi dan Badan Hukum Koperasi |
| | | 01 | Organisasi Koperasi dan UKM |
| | | 02 | Badan Hukum Koperasi (Penatausahaan Badan Hukum Koperasi, Evaluasi Badan Hukum Koperasi) |
| | | 03 | Penelaahan Kasus Hukum (Kasus Hukum Koperasi, Kasus Hukum UKM) |
| | | 02 | Peraturan Perundang-undangan |
| | | 01 | Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Koperasi |
| | | 02 | Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan UKM |
| | | 03 | Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan (Produk Peraturan Perundang-undangan Pusat, Peraturan Daerah) |
| | | 03 | Tata Laksana Koperasi dan UKM |
| | | 01 | Tata laksana Koperasi (Tata Laksana Koperasi Primer, Tata Laksana Koperasi Sekunder) |
| | | 02 | Tata Laksana UKM (Tata Laksana Usaha Kecil, Tata Laksana Usaha Menengah) |
| | | 03 | Klasifikasi Koperasi dan UKM |
| | | 04 | Keanggotaan Koperasi |
| | | 01 | Partisipasi Usaha dan Permodalan |
| | | 02 | Partisipasi Pengawasan (Rapat Anggota, Pengawasan) |
| | | 03 | Pengembangan Anggota Kaderisasi, Penyuluhan |
| | | 05 | Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan UKM |
| | | 01 | Pengendalian (Pengendalian Intern, Tindak Lanjut Hasil Pengendalian) |
| | | 02 | Akuntabilitas dan Akuntansi (Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit) |
| | | 03 | Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM |
| | 02 | Produksi | |
| | | 01 | Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 01 | Tanaman Pangan Padi, Palawija |
| | | 02 | Hortikultura (Buah-buahan dan Tanaman Obat, Tanaman Hias, dan Sayur |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 03 | Sarana (Sarana Produksi, Sarana Pengolah) |
| | | 02 | Perhutanan dan Perkebunan |
| | | 01 | Kehutanan (Hutan Produksi, Hutan Kemasyarakatan) |
| | | 02 | Perkebunan (Tanaman Semusim dan Rempah-rempah, dan Tanaman Keras) |
| | | 03 | Sarana (Sarana Produksi, Sarana Pengolah) |
| | | 03 | Perikanan dan Peternakan |
| | | 01 | Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya) |
| | | 02 | Peternakan (Ternak Besar, Ternak Kecil) |
| | | 04 | Industri, Kerajinan, dan Pertambangan |
| | | 01 | Industri (Sandang, Logam dan Elektronik, Pangan, Kimia dan Aneka) |
| | | 02 | Kerajinan (Logam, Non Logam) |
| | | 03 | Pertambangan Umum dan Migas |
| | | 05 | Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha |
| | | 01 | Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha (Listrik, Konstruksi) |
| | | 02 | Aneka Usaha (Jasa Umum, Angkutan) |
| | | 03 | Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi |
| | 03 | | Pembiayaan |
| | | 01 | Program Pendanaan |
| | | 01 | Program Pendanaan Jangka Pendek (Koperasi dan UKM Jangka Pendek) |
| | | 02 | Program Pendanaan Jangka menengah dan Panjang |
| | | 03 | Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir |
| | | 02 | Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam |
| | | 01 | Pengembangan dan Pengendalian KSP |
| | | 02 | Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi |
| | | 03 | Pengembangan dan Pengendalian USP LKM |
| | | 03 | Urusan Permodalan |
| | | 01 | Pengembangan Permodalan Sendiri (Koperasi dan UKM) |
| | | 02 | Pengembangan Permodalan Luar (Permodalan Bank, Non Bank) |
| | | 03 | Pengembangan Kredit Program (Bank, Non Bank) |
| | | 04 | Asuransi dan Jasa Keuangan |
| | | 01 | Asuransi (Koperasi, UKM) |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 02 | Perpajakan (Koperasi, UKM) |
| | | 03 | Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (Bank dan Non Komersial Bank) |
| | | 05 | Pembiayaan dan Penjaminan Kredit |
| | | 01 | Lembaga Pembiayaan (Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang) |
| | | 02 | Penjaminan Kredit (Penjaminan, Asuransi Kredit) |
| | | 03 | Pasar Modal (Obligasi, Modal Penyertaan) |
| | | 06 | Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) |
| | 04 | | Pemasaran dan Jaringan Usaha |
| | | 01 | Perdagangan Dalam Negeri |
| | | 01 | Pengadaan Sektor Formal dan Informal |
| | | 02 | Distribusi Sektor Formal dan Informal |
| | | 03 | Pengembangan Sektor Formal dan Informal |
| | | 02 | Ekspor dan Impor |
| | | 01 | Ekspor (Koperasi dan UKM) |
| | | 02 | Impor (Koperasi dan UKM) |
| | | 03 | Hubungan Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral, Regional, dan Bilateral) |
| | | 03 | Sarana dan Prasarana Pemasaran |
| | | 01 | Sarana (Pengembangan Pasar Tradisional dan Sentra Pasar) |
| | | 02 | Prasarana (Lembaga Perantara dan Fasilitas HAKI) |
| | | 03 | Pengembangan Potensi Pemasaran (Koperasi dan UKM) |
| | | 04 | Kemitraan dan Jaringan Usaha |
| | | 01 | Kemitraan (Koperasi dan UKM) |
| | | 02 | Jaringan Usaha (Koperasi dan UKM) |
| | | 03 | Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan Koperasi dan UKM |
| | | 05 | Informasi dan Publikasi Bisnis |
| | | 01 | Pengumpulan Informasi Koperasi dan UKM |
| | | 02 | Pengolahan Informasi Koperasi dan UKM |
| | | 03 | Publikasi dan Informasi (Koperasi dan UKM) |
| | | 06 | Lembaga Layanan Pemasaran LIP Koperasi dan UKM |
| | 05 | | Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | 01 | Pengembangan Kewirausahaan |
| | | 01 | Lembaga Kewirausahaan (Pengembangan Jaringan Kewirausahaan dan Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan) |
| | | 02 | Penumbuhan Kewirausahaan (Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan dan Evaluasi Kewirausahaan) |
| | | 03 | Sosialisasi Kewirausahaan (Perangkat Lunak dan Promosi Kewirausahaan) |
| | | 02 | Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM |
| | | 01 | Diklat Formal dan Informal |
| | | 02 | Diklat Non Formal (Perangkat Lunak, Sarana, dan Prasarana) |
| | | 03 | Kerja Sama Lembaga Diklat (Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah) |
| | | 03 | Peran Serta Masyarakat |
| | | 01 | Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM |
| | | 02 | Peningkatan Dukungan LSM terhadap KUKM |
| | | 03 | Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM |
| | | 04 | Monitoring dan Evaluasi Diklat KUKM |
| | | 01 | Monitoring dan Evaluasi Diklat KUKM |
| | | 02 | Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal |
| | | 03 | Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat (Pemerintah dan Non Pemerintah) |
| | | 05 | Advokasi |
| | | 01 | Advokasi Organisasi dan Manajemen |
| | | 02 | Advokasi Kemitraan dan Teknologi |
| | | 03 | Advokasi Peraturan Perundang-undangan (Kajian Penerangan dan Sosialisasi Perundang-undangan) |
| | | 06 | Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha |
| | | 01 | Produktivitas dan Mutu |
| | | 01 | Produktivitas (Inkubator Teknologi dan Pengembangan Klaster) |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | 02 | Peningkatan Mutu (Desain dan Standarisasi) |
| | | 03 | Sertifikasi Produk (Sertifikasi, Label, dan Merek) |
| | | 02 | Restrukturisasi Usaha |
| | | 01 | Restrukturisasi Manajemen (Koperasi dan UKM) |
| | | 02 | Restrukturisasi Pendanaan (Koperasi dan UKM) |
| | | 03 | Restrukturisasi Kelembagaan (Koperasi dan UKM) |
| | | 03 | Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) |
| | | 01 | Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (Asosiasi dan Manajemen LPB, Akreditasi LPB) |
| | | 02 | Pengembangan Bisnis LPB (Peningkatan Kerja Sama LPB dan Kerja Sama Layanan LPB) |
| | | 03 | Pengembangan Jaringan LPB (Kerja Sama Kelembagaan dan Teknologi) |
| | | 04 | Fasilitasi Investasi KUKM |
| | | 01 | Investasi Klaster KUKM (Fasilitasi Investasi KUKM Agro Bisnis dan KUKM Non Agro Bisnis) |
| | | 02 | Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha (Pangan dan Non Pangan) |
| | | 03 | Fasilitasi Investasi Aneka Usaha KUKM |
| | | 05 | Pengembangan Sistem Bisnis |
| | | 01 | Fasilitasi Transaksi (Dalam dan Luar Negeri) |
| | | 02 | Kerja Sama Usaha (Pertukaran Koperasi dan UKM) |
| | | 03 | Jaringan Komunikasi Bisnis (Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis) |
| | | 07 | Pengkajian Sumber Daya KUKM |
| | | 01 | Penelitian Koperasi |
| | | 01 | Perencanaan dan Pengendalian (Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) |
| | | 02 | Penyelenggaraan Kelembagaan (Koperasi dan Bisnis Koperasi) |
| | | 03 | Tata Laksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana) |
| | | 02 | Penelitian Sumber Daya |
| | | 01 | Perencanaan dan Pengendalian (Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan) |
| | | 02 | Penyelenggaraan Kelembagaan) (Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan) |

| | | | |
|----|------------------|-----------------|---|
| | | 03 | Tata Laksana Penelitian (Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana) |
| | | 03 | Pengembangan Pengaderan UKM |
| | | 01 | Penyuluhan (Penyelenggara dan Materi Penyuluhan) |
| | | 02 | Pengaderan (Penilaian dan Pengembangan) |
| | | 03 | Kerja Sama Jaringan Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan |
| | | 04 | Kerja Sama Internasional dan Hubungan antar Lembaga |
| LH | Lingkungan Hidup | | |
| | 01 | Tata Lingkungan | |
| | | 01 | Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |
| | | 02 | Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan |
| | | 01 | Dokumentasi Inventarisasi |
| | | 02 | Pedoman Inventarisasi |
| | | 03 | Penetapan Ekoregion |
| | | 04 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional |
| | | 05 | Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kota |
| | | 03 | Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam |
| | | 01 | Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam |
| | | 02 | Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam |
| | | 04 | Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor |
| | | 01 | Evaluasi Penerapan |
| | | 02 | Perencanaan Lingkungan Hidup |
| | | 05 | Ekonomi Lingkungan |
| | | 01 | Perencanaan Evaluasi Ekonomi |
| | | 02 | Perencanaan Internalisasi Lingkungan |
| | | 03 | Intensif dan Pendanaan Lingkungan |
| | | 06 | Dampak Lingkungan |
| | | 01 | Bimbingan Teknis Dampak Lingkungan |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 02 | Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dalam Penilaian Dokumen Lingkungan |
| | | 03 | Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dalam Pemeriksaan Dokumen Lingkungan |
| | | 04 | Evaluasi |
| | | 05 | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi |
| | | 07 | Perumahan |
| | | 01 | Pengembangan Perumahan |
| | | 01 | Perencanaan dan Pengembangan Perumahan |
| | | 02 | Rekomendasi Teknis dan Non Teknis Izin Bidang Perumahan |
| | | 03 | Registrasi, Seleksi, Teknis Pemanfaatan Perumahan Milik Pemerintah |
| | | 02 | Pembangunan Perumahan |
| | | 01 | Pendataan dan Pembinaan Pembangunan Perumahan |
| | | 02 | Pembangunan Baru Perumahan dan Rusun |
| | | 03 | Pemeliharaan Perumahan dan Rusun |
| | | 03 | Pengelolaan Rusunawa |
| | | 04 | Pengawasan dan Pengendalian Perumahan |
| | 02 | | Pengendalian Pencemaran Lingkungan |
| | | 01 | Pemantauan dan Pengawasan: |
| | | 01 | Industri Kimia |
| | | 02 | Industri Logam, Elektronika, dan Mesin |
| | | 03 | Aneka Industri |
| | | 04 | Prasarana dan Jasa |
| | | 05 | Pertambangan, Energi, Minyak, dan Gas |
| | | 06 | Peternakan dan Perikanan |
| | | 07 | Perkebunan |
| | | 08 | Kehutanan dan Hortikultura |
| | | 09 | Usaha Skala Kecil |
| | | 10 | Transportasi Air dan Udara |
| | | 11 | Transportasi Darat |
| | | 12 | Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat |
| | | 02 | Evaluasi dan Pengembangan |
| | | 01 | Industri Kimia |

| | | | |
|--|----|---|--|
| | | 02 | Industri Logam, Elektronika, dan Mesin |
| | | 03 | Aneka Industri |
| | | 04 | Prasarana dan Jasa |
| | | 05 | Pertambangan, Energi, Minyak, dan Gas |
| | | 06 | Peternakan dan Perikanan |
| | | 07 | Perkebunan |
| | | 08 | Kehutanan dan Hortikultura |
| | | 09 | Usaha Skala Kecil |
| | | 10 | Transportasi Air dan Udara |
| | | 11 | Transportasi Darat |
| | | 12 | Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat |
| | 03 | Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim | |
| | | 01 | Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim |
| | | 01 | Pengembangan Sumber Daya Genetika |
| | | 02 | Pengembangan Keamanan Hayati |
| | | 03 | Pemanfaatan Sumber Daya Genetik |
| | | 04 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik/Pengembangan dan Pemanfaatan |
| | | 05 | Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Genetik |
| | | 06 | Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Hayati |
| | | 07 | Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Hayati |
| | | 08 | Pengendalian Kerusakan Lahan Budidaya |
| | | 09 | Lahan Non Budidaya |
| | | 02 | Kerusakan Ekosistem Perairan Darat |
| | | 01 | Kerusakan Ekosistem Sungai |
| | | 02 | Pengelolaan Kualitas Air Sungai |
| | | 03 | Pengendalian Kerusakan Ekosistem Danau |
| | | 04 | Pengelolaan Kualitas Air Danau |
| | | 05 | Kerusakan Ekosistem Rawa Gambut |
| | | 06 | Kerusakan Ekosistem Rawa bukan Gambut |
| | | 03 | Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut |
| | | 01 | Pencegahan |
| | | 02 | Penanggulangan |
| | | 03 | Pemulihan |
| | | 04 | Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer |

| | | | |
|--|----|------------------------------------|---|
| | | 01 | Perangkat Mitigasi |
| | | 02 | Laporan Inventarisasi GRK Nasional |
| | | 03 | Data Bidang Inventarisasi GRK |
| | | 04 | Surat Rekomendasi kepada Importir terdaftar dan Bahan Perusak Ozon |
| | | 05 | Hibah Bantuan Luar Negeri terkait Program Perlindungan Lapisan Ozon |
| | | 06 | Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan |
| | 05 | Adaptasi Perubahan Iklim | |
| | | 01 | Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim |
| | | 02 | Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perubahan Iklim |
| | | 03 | Identifikasi dan Analisis Kerentanan Perubahan Iklim |
| | | 04 | Media Kliring Kerentanan Perubahan Iklim |
| | 04 | Pengelolaan B3, Limbah, dan Sampah | |
| | | 01 | Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun |
| | | 01 | Registrasi |
| | | 02 | Notifikasi |
| | | 03 | Pemantauan Sektor Industri |
| | | 04 | Pemantauan Sektor Non Industri |
| | | 05 | Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor Industri |
| | | 06 | Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor Non-Industri |
| | | 02 | Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| | | 01 | Pengumpulan dan Pemanfaatan |
| | | 02 | Pengangkutan dan Pengolahan |
| | | 03 | Penimbunan dan Dumping |
| | | 04 | Notifikasi Limbah Lintas Batas |
| | | 05 | Rekomendasi Limbah Lintas Batas |
| | | 03 | Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 |
| | | 01 | Pemantauan Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas |
| | | 02 | Pemantauan Manufaktur |
| | | 03 | Pemantauan Agroindustri |
| | | 04 | Pemantauan Prasarana, Jasa, dan Non Institusi |

| | | | |
|--|----|------------------|--|
| | | 05 | Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas |
| | | 06 | Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Manufaktur |
| | | 07 | Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Agroindustri |
| | | 08 | Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Prasarana, Jasa, dan Non Institusi |
| | | 04 | Pengelolaan Sampah |
| | | 01 | Pembatasan Sampah |
| | | 02 | Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah |
| | | 03 | Pembentukan Dewan Adipura |
| | | 04 | Penetapan Pemenang Adipura |
| | 05 | Hukum Lingkungan | |
| | | 01 | Hukum Administrasi Lingkungan |
| | | 01 | Pengelolaan Pengaduan |
| | | 02 | Pengembangan Pengaduan |
| | | 03 | Penerapan Hukum Administrasi Lingkungan |
| | | 04 | Pengembangan Hukum Administrasi Lingkungan |
| | | 02 | Penyelesaian Sengketa Lingkungan |
| | | 01 | Administrasi Gugatan Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan |
| | | 02 | Gugatan Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan |
| | | 03 | Kerugian Negara dan Masyarakat Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan |
| | | 04 | Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan |
| | | 03 | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan |
| | | 01 | Administrasi Penyidikan |
| | | 02 | Pelaksanaan Penyidikan |
| | | 03 | Koordinasi Penuntutan |
| | | 04 | Evaluasi dan Tindak Lanjut Koordinasi Penuntutan |
| | | 05 | Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| | | 04 | Perjanjian Internasional Lingkungan |
| | | 01 | Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional |
| | | 02 | Tindak Lanjut Perjanjian Internasional |

| | | | |
|--|----|--|--|
| | | 03 | Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran |
| | | 04 | Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan |
| | 06 | Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| | | 01 | Komunikasi Lingkungan |
| | | 01 | Program Pengembangan Komunikasi |
| | | 02 | Evaluasi Pengembangan Komunikasi |
| | | 03 | Publikasi |
| | | 04 | Kampanye |
| | | 02 | Penguatan Inisiatif Masyarakat |
| | | 01 | Pengembangan dan Bimbingan Komunitas Pendidikan Lingkungan |
| | | 02 | Evaluasi Komunitas Pendidikan Lingkungan |
| | | 03 | Inventarisasi Kearifan Lingkungan |
| | | 04 | Revitalisasi Kearifan Lingkungan |
| | | 03 | Peningkatan Peran Masyarakat |
| | | 01 | Masyarakat Kawasan Permukiman |
| | | 02 | Masyarakat Kawasan Rentan |
| | | 03 | Masyarakat Petani |
| | | 04 | Masyarakat Nelayan |
| | | 04 | Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan |
| | | 01 | Organisasi Sosial dan Masyarakat |
| | | 02 | Organisasi Profesi dan Dunia Usaha |
| | 07 | Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas | |
| | | 01 | Data dan Informasi Lingkungan |
| | | 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data |
| | | 02 | Manajemen Basis Data |
| | | 03 | Analisis Data dan Penyajian Informasi |
| | | 04 | Pengelolaan Informasi melalui Perpustakaan |
| | | 05 | Pengembangan Instrumen Layanan Informasi |
| | | 06 | Pengembangan Instrumen Analisis Data |
| | | 07 | Pengembangan Sistem Jaringan |
| | | 08 | Pemeliharaan Jaringan |
| | | 02 | Kelembagaan Lingkungan |
| | | 01 | Pengembangan Kelembagaan |
| | | 02 | Tata Laksana |
| | | 03 | Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota |
| | | 03 | Standarisasi dan Teknologi |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| | | 01 | Standarisasi Perangkat Manajemen Lingkungan |
| | | 02 | Standarisasi Pengujian Lingkungan |
| | | 03 | Standarisasi Kompetensi Keahlian Lingkungan |
| | | 04 | Standarisasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan |
| | | 05 | Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan |
| | | 06 | Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan |
| | 04 | Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan | |
| | | 01 | Pemantauan Kualitas Lingkungan |
| | | 02 | Kajian Kualitas Lingkungan |
| | | 03 | Laboratorium Rujukan |
| | | 04 | Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi |
| PE | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | 01 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | |
| | | 01 | Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata |
| | | 01 | Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) |
| | | 02 | Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) |
| | | 03 | Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya |
| | | 04 | Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK |
| | | 05 | Pengembangan Potensi dan Promosi Investasi Pariwisata |
| | | 02 | Pengembangan Daya Tarik Wisata |
| | | 01 | Bimbingan Teknis Daya Tarik Wisata 5 Tahun |
| | | 02 | Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Wisata |
| | | 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota |
| | | 04 | Penilaian Kelayakan Tugas Pembantu |
| | | 05 | Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award) |
| | | 03 | Industri Pariwisata |
| | | 01 | Sarana Pariwisata |
| | | | 01 Usaha Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata |
| | | | 02 Penyediaan Akomodasi, Jasa Makanan dan Minuman, serta Tirta dan SPA |
| | | 02 | Jasa Pariwisata |
| | | | 01 Jasa Transportasi Wisata |

| | | | | |
|--|--|----|--|--|
| | | | 02 | Jasa Informasi Pariwisata |
| | | | 03 | Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi |
| | | | 04 | Jasa Perjalanan Wisata |
| | | | 05 | Jasa Konsultan Pariwisata |
| | | | 06 | Jasa Pramuwisata dan Penyelenggaraan Pertemuan |
| | | | 07 | Insentif |
| | | | 08 | Konvensi |
| | | | 09 | Pameran |
| | | | 03 | Pengembangan Produk dan Pelayanan |
| | | 04 | Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata | |
| | | | 01 | Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata |
| | | | 02 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat |
| | | | 03 | Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat |
| | | 05 | Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i> | |
| | | | 01 | Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja |
| | | | 02 | Pengembangan Rekreasi dan Hiburan |
| | | | 03 | Pengembangan Wisata Alam dan Budaya |
| | | | 04 | Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i> |
| | | 02 | Pemasaran Pariwisata | |
| | | | 01 | Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata |
| | | | 01 | Informasi Pasar Dalam Negeri |
| | | | 02 | Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri |
| | | | 03 | Informasi Pasar Luar Negeri |
| | | | 04 | Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata |
| | | | 05 | Perancangan Pemasaran Pariwisata |
| | | | 02 | Promosi Pariwisata Luar Negeri |
| | | | 01 | Wilayah ASEAN |
| | | | 02 | Wilayah Asia |
| | | | 03 | Wilayah Timur Tengah dan Afrika |
| | | | 04 | Wilayah Amerika dan Pasifik |
| | | | 05 | Wilayah Eropa |
| | | | 03 | Promosi Pariwisata Dalam Negeri |
| | | | 04 | Pencitraan Indonesia |
| | | | 01 | Strategi Pencitraan Indonesia (Perencanaan Pencitraan Indonesia, Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia) |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 02 | Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang |
| | | 01 | Promosi Media |
| | | 02 | Sarana dan Distribusi Media |
| | | 03 | Kerja Sama dan Kemitraan antar Lembaga Pemerintah dan Non Lembaga Pemerintah |
| | | 05 | Promosi Konvensi, Insentif, <i>Event</i> , dan Minat Khusus |
| | | 01 | Promosi KIE Korporasi |
| | | 01 | Korporasi Luar Negeri |
| | | 02 | Korporasi Dalam Negeri |
| | | 02 | Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah |
| | | 03 | Promosi Minat Khusus Wisata Bahari dan Wisata Non Bahari |
| | 03 | | Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya |
| | | 01 | Pengembangan Industri Perfilman |
| | | 01 | Fasilitasi Industri Perfilman |
| | | 02 | Festival dan Ekshibisi Film |
| | | 03 | Produksi |
| | | 04 | Pemasaran Film |
| | | 02 | Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik |
| | | 01 | Pengembangan Seni Pertunjukan |
| | | 02 | Pengembangan Industri Musik |
| | | 03 | Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik |
| | | 04 | Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik |
| | | 03 | Pengembangan Seni Rupa |
| | | 01 | Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi |
| | | 01 | Kreasi dan Produksi Karya Seni |
| | | 02 | Fasilitasi Pengembangan Seni |
| | | 02 | Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi |
| | | 01 | Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa |
| | | 02 | Apresiasi Karya Seni Rupa |
| | | 04 | Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek |
| | | 01 | Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media |
| | | 01 | Pengembangan Film Animasi dan Komik |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|---|
| | | 02 | Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi |
| | | 03 | Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video |
| | | 04 | Pengembangan Karya Kreatif Periklanan Iklan Cetak dan Elektronik |
| | 02 | | Desain dan Arsitektur |
| | | 01 | Arsitektur dan Desain Interior |
| | | 02 | Komunikasi Visual |
| | | 03 | Desain Produk dan Kemasan |
| | | 04 | Mode |
| | 03 | | Kerja Sama dan Fasilitas |
| | | 01 | Lisensi Teknologi, Pengembangan Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi |
| | | 02 | Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis |
| | | 03 | Pengembangan Sentra Kreatif dan Pengelolaan Sentra Kreatif |
| | | 04 | Akses Pembiayaan Bank dan Non Bank |
| | 05 | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | | 01 | Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata |
| | | 01 | Program dan Evaluasi |
| | | 02 | Data dan Publikasi |
| | | 02 | Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif |
| | | 01 | Program dan Evaluasi |
| | | 02 | Data dan Publikasi |
| | | 03 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | | 01 | Program dan Evaluasi |
| | | 02 | Penyelenggaraan dan Kerja Sama |
| | | 04 | Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| | | 01 | Program dan Evaluasi |
| | | 02 | Evaluasi dan Kerja Sama |
| PA | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | |
| | 01 | Pengurus Utama Gender (PUG) | |
| | | 01 | Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan PUG |
| | | 02 | Data Gender |

| | | | |
|--|----|----------------------------|---|
| | | 03 | Sosialisasi Kebijakan PUG |
| | | 04 | Advokasi Pelaksanaan PUG |
| | | 05 | Fasilitasi dan Koordinasi PUG |
| | | 06 | Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan PUG |
| | | 07 | Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender |
| | | 08 | Analisis dan Penyajian Informasi Gender |
| | 02 | Perlindungan Hak Perempuan | |
| | | 01 | Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan |
| | | 02 | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan |
| | | 03 | Data Perlindungan Perempuan |
| | | 04 | Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan |
| | | 05 | Penanganan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
| | | 06 | Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan |
| | | 07 | Advokasi Perlindungan Perempuan |
| | | 01 | Advokasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan |
| | | 02 | Advokasi Penanganan Masalah Sosial Perempuan |
| | | 03 | Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan |
| | | 08 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan |
| | | 01 | Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan |
| | 03 | Perlindungan Anak | |
| | | 01 | Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) |
| | | 01 | Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak |
| | | 02 | Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Tumbuh Kembang Anak |
| | | 03 | Data Perlindungan Anak |
| | | 04 | Data Tumbuh Kembang Anak |
| | | 02 | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) |
| | | 01 | Sosialisasi Kebijakan PA |
| | | 02 | Sosialisasi Kebijakan TKA |
| | | 03 | Advokasi Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | Anak (TKA) |
| | | 01 | Advokasi PA |
| | | 02 | Advokasi TKA |
| | | 04 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) |
| | | 01 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak |
| | | 02 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Tumbuh Kembang Anak |
| | | 05 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak |
| | | 01 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Perlindungan Anak |
| | | 02 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Tumbuh Kembang Anak |
| | | 06 | Pemetaan Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak |
| | | 01 | Pemetaan Perlindungan Anak |
| | | 02 | Pemetaan Tumbuh Kembang Anak |
| | 04 | | Partisipasi Masyarakat |
| | | 01 | Penyusunan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat |
| | | 02 | Sosialisasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat |
| | | 03 | Advokasi Bidang Partisipasi Masyarakat |
| | | 04 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Partisipasi Masyarakat |
| | | 05 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Partisipasi Masyarakat |
| | 05 | | Kajian tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 01 | Telaah dan Kajian |
| | | 01 | Bidang Pembangunan Keluarga |
| | | 02 | Bidang Hubungan antar Lembaga |
| | | 03 | Bidang Penanggulangan Kemiskinan |
| | | 04 | Bidang Komunikasi Pembangunan |
| | | 02 | Forum Analisis Kebijakan dan Pemantauan |
| PD | | | Pemerintahan Daerah |
| | 01 | | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 01 | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan |
| | | 01 | Ketahanan Ideologi Negara |
| | | 01 | Penguatan Ideologi Negara |
| | | 02 | Implementasi Ideologi Negara |
| | | 02 | Wawasan Kebangsaan |
| | | 01 | Penguatan Wawasan Kebangsaan |
| | | 02 | Pembinaan dan Sosialisasi |

| | | | | |
|--|--|----|---|---|
| | | | 03 | Implementasi |
| | | | 03 | Bela Negara |
| | | | 01 | Pendidikan Bela Negara |
| | | | 02 | Pemberdayaan Bela Negara |
| | | | 04 | Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan |
| | | | 01 | Penguatan Nilai-nilai Sejarah |
| | | | 02 | Implementasi Nilai-nilai Sejarah |
| | | | 03 | Penerbitan Rekomendasi Penelitian |
| | | | 05 | Pembauran dan Kewarganegaraan |
| | | | 01 | Pembauran, Kebangsaan dan Kewarganegaraan |
| | | | 02 | Pembinaan Kewarganegaraan |
| | | 02 | Kewaspadaan Nasional | |
| | | | 01 | Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan |
| | | | 02 | Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan |
| | | | 03 | Pemerintahan |
| | | | 04 | Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial (Pedoman Kewaspadaan Nasional) |
| | | | 05 | Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing (Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing, Surat Pemberitahuan Penelitian Orang Asing) |
| | | 03 | Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan | |
| | | | 01 | Ketahanan Seni |
| | | | 01 | Fasilitasi Pelaksanaan Pelestarian Kesenian |
| | | | 02 | Pelaksanaan dan Perkembangan Nilai-nilai Kesenian |
| | | | 02 | Ketahanan Budaya |
| | | | 01 | Fasilitasi Pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan |
| | | | 02 | Pelaksanaan dan Perkembangan Nilai-nilai Kebudayaan |
| | | | 03 | Agama dan Kepercayaan |
| | | | 01 | Fasilitasi |
| | | | 02 | Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota |

| | | | | |
|--|--|----|---|---|
| | | | 03 | Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan |
| | | | 04 | Pelestarian Nilai-nilai Keagamaan dan Kepercayaan |
| | | 04 | Organisasi Kemasyarakatan | |
| | | | 01 | Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat (Pendaftaran Ormas, Data Base Ormas) |
| | | | 02 | Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan dengan Ormas/LNL |
| | | | 03 | Evaluasi Aktivitas Ormas Sanksi Administrasi |
| | | | 04 | Fasilitasi Sengketa Ormas |
| | | | 05 | Fasilitasi Ormas |
| | | 05 | Masalah Sosial Kemasyarakatan | |
| | | | 01 | Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika |
| | | | 02 | Masalah Sosial Kemasyarakatan |
| | | 04 | Politik Dalam Negeri | |
| | | | 01 | Implementasi Kebijakan Politik |
| | | | 01 | Implementasi Kebijakan Politik (Sosialisasi dan Publikasi <i>Best Recite</i> dan Inovasi) |
| | | | 02 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi |
| | | 02 | Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan | |
| | | | 01 | Evaluasi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat (Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI) |
| | | | 02 | Evaluasi Kelembagaan Politik Pemerintahan Daerah (Rotasi Anggota DPRD Kota) |
| | | 03 | Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik | |
| | | | 01 | Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi |
| | | | 02 | Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi |
| | | | 03 | Pemerintah Daerah |
| | | | 04 | Data Base Partai Politik |
| | | 04 | Pendidikan Budaya Politik | |
| | | | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Politik |
| | | | 02 | Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Politik |
| | | | 03 | Modul sebagai Sarana Penyelenggaraan Pendidikan |
| | | 05 | Pemilihan Umum | |
| | | | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu |

| | | | | |
|--|----|-------------------|------------------------------|--|
| | | | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Wakil Rakyat |
| | | | 03 | Evaluasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden |
| | | | 04 | Laporan Hasil Perkembangan Politik di Daerah |
| | | | 05 | Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL |
| | | 05 | Ketahanan Ekonomi | |
| | | | 01 | Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian |
| | | | 01 | Penanganan Kesenjangan Perekonomian (Sosialisasi dan Publikasi <i>Best Recite</i> dan Inovasi) |
| | | | 02 | Penanganan Kesenjangan Perekonomian |
| | | | 02 | Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal, dan Moneter |
| | | | 01 | Fasilitasi Identifikasi Ketahanan di Bidang Perdagangan, Investasi Fiskal dan Moneter |
| | | | 02 | Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi |
| | | | 03 | Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi |
| | | | 01 | Evaluasi Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Penanganan Kejahatan Lembaga Perekonomian |
| | | | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Lembaga Perekonomian |
| | 02 | Pemerintahan Umum | | |
| | | 01 | Dekonsentrasi dan Kerja Sama | |
| | | | 01 | Evaluasi Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Penanganan Kejahatan Lembaga Perekonomian |
| | | | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Lembaga Perekonomian |
| | | | 03 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama |
| | | | 04 | Fasilitas Kecamatan |
| | | | 01 | Fasilitasi (Data Base Pembentukan Kecamatan) |
| | | | 02 | Koordinasi |
| | | | 03 | Pembinaan dan Pengawasan |
| | | | 04 | Monitoring dan Evaluasi (Evaluasi Kinerja Kecamatan) |

| | | | | |
|--|--|----|---|--|
| | | | 05 | Fasilitas Pelayanan Umum |
| | | | 01 | Fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan |
| | | | 02 | Koordinasi Pelayanan Administrasi Kecamatan |
| | | | 03 | Pembinaan dan Pengawasan (Pelayanan Administrasi Kecamatan) |
| | | | 04 | Monitoring dan Evaluasi |
| | | 02 | Wilayah Administrasi dan Perbatasan | |
| | | | 01 | Toponimi dan Data Wilayah |
| | | | 01 | Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Toponimi |
| | | | 02 | Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami dan Unsur Buatan |
| | | | 03 | Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Perubahan Nama Rupa Bumi Unsur Alami dan Unsur Buatan |
| | | | 04 | Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan |
| | | | 05 | Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Perhitungan Luas Wilayah |
| | | | 02 | Pengembangan dan Penataan batas antar Daerah |
| | | | 01 | Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penetapan Batas antar Daerah |
| | | | 02 | Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Batas antar Daerah |
| | | 03 | Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat | |
| | | | 01 | Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja |
| | | | 01 | Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Operasional Polisi Pamong Praja |

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | 02 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Batas antar Daerah |
| | | | 02 | Peningkatan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja |
| | | | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja |
| | | | 02 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja |
| | | | 03 | Perlindungan Masyarakat |
| | | | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat |
| | | | 02 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Aparatur dan Kelembagaan Perlindungan Masyarakat |
| | | | 04 | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| | | | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi pembinaan Operasional Penyidik PNS |
| | | | 05 | Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia |
| | | | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Hak Asasi Manusia |
| | | | 02 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Konvensi Internasional |
| | | | 04 | Kawasan dan Pertanahan |
| | | | 01 | Kawasan Sumber Daya Alam |
| | | | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan pada Kawasan Sumber Daya Alam yang Mencakup Kawasan Hutan, Tambang, |

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | | Pertanian, dan Lingkungan |
| | | | 02 | Kawasan Sumber Daya Buatan |
| | | | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan pada Kawasan Perhubungan Darat, Laut dan Udara |
| | | | 03 | Kawasan Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Bebas |
| | | | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan pada Kawasan Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Bebas, Mencakup Kawasan Hutan |
| | | | 04 | Pertanahan dan Kawasan Khusus |
| | | | 01 | Penyelenggaraan Urusan Pertanahan |
| | | | | 01 Perencanaan dan Pengadaan Tanah |
| | | | | 02 Ganti Rugi Tanah |
| | | | | 03 Pemanfaatan Lahan |
| | | | | 01 Sewa |
| | | | | 02 Pengalihan Hak |
| | | | | 04 Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan |
| | | | 02 | Penyelesaian Sengketa Pertanahan |
| | | | 03 | Evaluasi Penataan Kawasan Khusus |
| | | | 04 | Prasarana, Sarana, dan Utilitas |
| | | | | 01 Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan |
| | | | | 02 Penataan Dekorasi Insidental Perumahan dan Pertamanan |
| | | | | 03 Rekomendasi Desain Teknis Reklame Kawasan Tematik yang Terletak pada RTH Terkait Letak dan Estetika Kota |
| | | | | 04 Penataan dan Pemeliharaan Elemen Estetika |
| | | | | 05 Penataan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan |
| | | | | 06 Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas |

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | 05 | Kawasan Perairan, Kelautan, dan Kedirgantaraan |
| | | | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan pada Kawasan Perairan, Kelautan, dan Kedirgantaraan |
| | | | 02 | Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Kawasan Perairan, Kelautan, dan Kedirgantaraan |
| | | | 06 | Kawasan Permukiman |
| | | | 01 | Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman |
| | | | 02 | Pembangunan Kawasan Permukiman |
| | | | 03 | Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman |
| | | | 07 | Pertamanan – Penghijauan |
| | | | 01 | Pembangunan |
| | | | 02 | Pemeliharaan |
| | | | 03 | Pembibitan |
| | | | 04 | Rekomendasi Pertamanan dan Penghijauan |
| | | | 05 | Retribusi |
| | | | 05 | Pencegahan dan Penanggulangan Bencana |
| | | | 01 | Identifikasi Potensi Bencana |
| | | | 01 | Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Bencana dan Mitigasi Bencana |
| | | | 02 | Organisasi Sistem dan Prosedur |
| | | | 01 | Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan serta Penanggulangan Bencana (Fasilitasi, Data Base Rawan Bencana, Koordinasi, Fasilitasi serta Koordinasi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana) |
| | | | 03 | Sarana dan Prasarana |
| | | | 01 | Evaluasi Standarisasi Aplikasi Peralatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana |
| | | | 02 | Evaluasi Pengembangan Informasi dan Teknologi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana |
| | | | 04 | Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran |
| | | | 01 | Evaluasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat |

| | | | | |
|--|----|------------------|--|--|
| | | | | di Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran |
| | | | 02 | Evaluasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran |
| | 03 | Otonomi Daerah | | |
| | | 01 | Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | | | 01 | Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi |
| | | | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | 02 | Penyusunan Standar Pelayanan Minimal |
| | | 02 | Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran | |
| | | 03 | Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan antar Lembaga | |
| | | | 01 | Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah |
| | | | 02 | Administrasi Kepala Daerah dan DPRD |
| | | | 03 | Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan |
| | | | 04 | Hubungan antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) |
| | | | 05 | Asosiasi Daerah |
| | | 04 | Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah | |
| | | | 01 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| | | | 02 | Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah |
| | | | 03 | Pengembangan Kapasitas Daerah |
| | 04 | Bina Pembangunan | | |
| | | 01 | Perencanaan Pembangunan Daerah/Per Wilayah | |
| | | 02 | Pengembangan Wilayah | |
| | | | 01 | Penyusunan Pedoman Penyerasian Pengembangan Wilayah |
| | | | 02 | Penyusunan dan Pemutakhiran Basis Data dan Informasi Pengembangan Wilayah |
| | | | 03 | Penyusunan dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah |
| | | | 04 | Kawasan Strategis dan Andalan (Evaluasi Pengembangan |

| | | | | |
|--|--|----|--|---|
| | | | | Data, Pengembangan Kawasan Strategis dan Andalan) |
| | | | 05 | Wilayah Tertinggal |
| | | | 01 | Penyusunan Data dan Pemutakhiran Basis dan Data Informasi Pengembangan Wilayah Tertinggal |
| | | | 02 | Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah Tertinggal |
| | | | 06 | Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil |
| | | | 01 | Penyusunan <i>Masterplan</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Wilayah |
| | | | 02 | Penyusunan dan Pemutakhiran Basis Data dan Informasi Pengembangan Wilayah Pesisir |
| | | 03 | Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup | |
| | | | 01 | Penataan Ruang dan Wilayah |
| | | | 01 | Evaluasi Perencanaan, Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah |
| | | | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Penyerasian dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah |
| | | | 03 | Implementasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang |
| | | | 02 | Penataan Ruang Kawasan |
| | | | 01 | Evaluasi Tata Ruang Kawasan |
| | | | 02 | Pembinaan Tata Ruang Kawasan |
| | | | 03 | Implementasi |
| | | | 03 | Konservasi dan Rehabilitasi |
| | | | 01 | Evaluasi Pelaksanaan Konservasi |
| | | | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi |
| | | | 03 | Implementasi |
| | | | 04 | Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air |
| | | | 01 | Evaluasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Air |
| | | | 02 | Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Air |
| | | | 03 | Implementasi |
| | | | 05 | Pengendalian Lingkungan Hidup |
| | | | 01 | Pengembangan Instrumen Kelembagaan |

| | | | | |
|--|----|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | Lingkungan Hidup |
| | | | 02 | Analisis dan Audit Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |
| | | 04 | Pengembangan Ekonomi Daerah | |
| | | | 01 | Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah |
| | | | 01 | Identifikasi Produk Unggulan dan Analisis Potensi Ekonomi Daerah |
| | | | 02 | Pengembangan Produk Unggulan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah |
| | | | 02 | Promosi dan Investasi Daerah |
| | | | 01 | Pelaksanaan Promosi Ekonomi Daerah |
| | | | 02 | Pelaksanaan Investasi Daerah |
| | | | 03 | Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pengembangan Perdagangan Daerah |
| | | | 02 | Pelaksanaan Perindustrian Daerah |
| | | | 04 | Kemitraan Usaha |
| | | | 01 | Perencanaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Ekonomi Daerah |
| | | | 02 | Pengelolaan Kemitraan Usaha Ekonomi Daerah |
| | | | 05 | Kelembagaan Ekonomi Daerah |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah |
| | | | 02 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah |
| | 05 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| | | 01 | Pemerintahan Desa dan Kelurahan | |
| | | | 01 | Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan |
| | | | 01 | Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan |
| | | | 02 | Pelaksanaan Pengembangan Desa |
| | | | 03 | Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan |
| | | | 02 | Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan |
| | | | 01 | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa |
| | | | 02 | Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan |
| | | | 03 | Fasilitasi Permusyawaratan Desa |
| | | | 01 | Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa |
| | | | 02 | Pelaksanaan Penataan Kewenangan Badan |

| | | | | |
|--|--|----|----|---|
| | | | | Permusyawaratan Desa |
| | | | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa |
| | | | 01 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa |
| | | | 02 | Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa |
| | | | 05 | Pengembangan Kapasitas Desa |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan |
| | | | 02 | Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat |
| | | 02 | | Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat |
| | | | 01 | Lembaga Masyarakat |
| | | | 01 | Pembinaan Penataan Lembaga Masyarakat di Desa |
| | | | 02 | Pelaksanaan Kerja Sama Lembaga Masyarakat |
| | | | 02 | Pembangunan Partisipatif |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pengembangan Metode Pembangunan Partisipatif |
| | | | 02 | Pelaporan Kinerja Pembangunan Desa |
| | | | 03 | Pendataan Potensi Masyarakat |
| | | | 01 | Inventarisasi Potensi Masyarakat (Profil Desa) |
| | | | 02 | Evaluasi Perkembangan Masyarakat |
| | | | 04 | Pengembangan Kawasan Perdesaan |
| | | | 01 | Pelaksanaan Identifikasi dan Analisa Penataan Ruang Kawasan Pedesaan |
| | | | 02 | Pelaksanaan Penataan Pengembangan Terpadu Kawasan Perdesaan |
| | | | 05 | Pelatihan Masyarakat |
| | | | 01 | Pelaksanaan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Pelatihan Masyarakat (<i>Grand Design</i> Pelatihan Masyarakat, Pedoman Pelatihan Masyarakat, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, Evaluasi Pelatihan Masyarakat, Penyelenggaraan Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi) |
| | | | 06 | Evaluasi Pelatihan Masyarakat |
| | | | 01 | Penyelenggaraan Pelatihan |
| | | | 02 | Monitoring dan Evaluasi |

| | | | | |
|--|--|----|--|---|
| | | 03 | Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat | |
| | | | 01 | Budaya Nusantara |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat |
| | | | 02 | Pelaksanaan Kerja Sama Adat Istiadat |
| | | | 02 | Pemberdayaan Perempuan |
| | | | 01 | Pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | 02 | Pembinaan, Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Ketidaksetaraan Gender |
| | | | 03 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga |
| | | | 02 | Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga |
| | | | 04 | Kesejahteraan Sosial |
| | | | 01 | Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial |
| | | | 02 | Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial |
| | | | 05 | Tenaga Kerja Pedesaan |
| | | | 01 | Fasilitasi dan Evaluasi Pembinaan Tenaga Kerja |
| | | | 02 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja |
| | | 04 | Usaha Ekonomi Masyarakat | |
| | | | 01 | Usaha Pertanian dan Pangan |
| | | | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Agrobisnis dan Lumbung Pangan (Identifikasi Data Pertanian, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi) |
| | | | 02 | Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam |
| | | | 01 | Pelaksanaan Peningkatan Kerja Sama dan Permodalan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam (Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro yang Belum Berbadan Hukum, Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Desa, Inventarisasi Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Fasilitasi Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi) |
| | | | 02 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan |

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | | Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam (Fasilitasi Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi) |
| | | | 03 | Produksi dan Pemasaran |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pengembangan Informasi Pasar (Identifikasi Produk Unggulan Perdesaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi) |
| | | | 02 | Pelaksanaan Diverifikasi Pasar (Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, Sistem Penilaian Kinerja Pasar Desa/Lomba Pasar Desa, Monitoring dan Evaluasi, Data Pasar Desa) |
| | | | 04 | Usaha Ekonomi dan Keluarga |
| | | | 01 | Pelaksanaan Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian (Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga) |
| | | | 02 | Pelaksanaan Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil (Penyusunan Modul, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi) |
| | | | 05 | Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal |
| | | | 01 | Ekonomi Perdesaan (Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan, fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan) |
| | | | 02 | Masyarakat Tertinggal (Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal, Monitoring dan Evaluasi) |
| | | | 05 | Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan |
| | | | 01 | Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan |
| | | | 01 | Pembinaan Pengelolaan Konservasi Kawasan |
| | | | 02 | Pelaksanaan Rehabilitasi Lingkungan |
| | | | 02 | Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Kawasan |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Lahan Perdesaan |
| | | | 02 | Pelaksanaan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir Perdesaan |

| | | | | |
|----|---------------------|--|---|--|
| | | | 03 | Fasilitas Sarana dan Prasarana Perdesaan |
| | | | 01 | Pembinaan Pengelolaan Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan |
| | | | 02 | Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemukiman |
| | | | 04 | Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Teknologi Perdesaan |
| | | | 02 | Pelaksanaan Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Perdesaan |
| | | | 05 | Pemasyarakatan dan Kerja Sama Teknologi Perdesaan |
| | | | 01 | Pelaksanaan Pemasyarakatan Teknologi Perdesaan |
| | | | 02 | Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Teknologi Perdesaan |
| PO | Pemuda dan Olahraga | | | |
| | 01 | Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan | | |
| | | 01 | Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda | |
| | | | 01 | Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan |
| | | | 02 | Penyiapan Kebijakan |
| | | | 03 | Perumusan dan Penyusunan Bahan |
| | | | 04 | Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan |
| | | | 05 | Penetapan dalam Bentuk NSPK |
| | 02 | Pemberdayaan Pemuda | | |
| | | 01 | Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda | |
| | | | 01 | Penelusuran (Duta Kepemudaan), Potensi Lokal (Provinsi), Nasional, Internasional |
| | | | 02 | Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan), Potensi Lokal (Provinsi), Nasional dan Internasional |
| | | | 03 | Pengembangan Potensi Nasional dan Internasional |
| | | 02 | Peningkatan Wawasan Pemuda | |
| | | | 01 | Program Wawasan Kebangsaan |

| | | | |
|--|----|---|--|
| | | 02 | Evaluasi Wawasan Kebangsaan |
| | | 03 | Program Wawasan Lingkungan |
| | | 04 | Evaluasi Wawasan Lingkungan |
| | | 05 | Program Wawasan Sosial dan Hukum |
| | | 06 | Evaluasi Wawasan Sosial dan Hukum |
| | 03 | Peningkatan Kapasitas Pemuda | |
| | | 01 | Program Kapasitas Iman dan Taqwa |
| | | 02 | Evaluasi Kapasitas Iman dan Taqwa |
| | | 03 | Program Kapasitas IPTEK |
| | | 04 | Evaluasi Kapasitas IPTEK |
| | | 05 | Program Pemanfaatan IPTEK |
| | | 06 | Evaluasi Pemanfaatan IPTEK |
| | 04 | Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan) | |
| | | 01 | Program Kajian |
| | | 02 | Evaluasi Kajian |
| | | 03 | Program Pengembangan |
| | | 04 | Evaluasi Pengembangan |
| | | 05 | Program Pendayagunaan |
| | | 06 | Evaluasi Pendayagunaan |
| | 03 | Pengembangan Pemuda | |
| | | 01 | Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda |
| | | 01 | Program Kepemimpinan (Penelusuran, Pengaderan dan Pendampingan) |
| | | 02 | Evaluasi Kepemimpinan (Penelusuran, Pengaderan dan Pendampingan) |
| | | 03 | Program Kepeloporan Pemuda (Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan) |
| | | 04 | Evaluasi Kepeloporan Pemuda (Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan) |
| | 02 | Kewirausahaan | |
| | | 01 | Program Kelembagaan |
| | | 02 | Evaluasi Kelembagaan |
| | | 03 | Program Pengaderan |
| | | 04 | Evaluasi Pengaderan |
| | | 05 | Program Perintisan |
| | | 06 | Evaluasi Perintisan |

| | | |
|--|----|--|
| | 03 | Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan |
| | 01 | Program Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan |
| | 02 | Evaluasi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan |
| | 03 | Program Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan |
| | 04 | Evaluasi Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan |
| | 05 | Program Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran |
| | 06 | Evaluasi Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran |
| | 07 | Pengkajian dan Pengembangan Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumber Daya |
| | 04 | Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda |
| | 01 | Standarisasi dan Infrastruktur: Organisasi, Prasarana dan Sarana Kepemudaan |
| | 05 | Kemitraan dan Penghargaan Pemuda |
| | 01 | Kemitraan Lintas Sektoral, Daerah dan Luar Negeri |
| | 02 | Pengembangan Penghargaan dan Promosi Kepemudaan |
| | 04 | Pembudayaan Olahraga |
| | 01 | Pengelolaan Olahraga Pendidikan |
| | 01 | Pengembangan Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | 02 | Evaluasi Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | 03 | Pengembangan Olahraga Pendidikan Tinggi |
| | 04 | Evaluasi Olahraga Pendidikan Tinggi |
| | 05 | Pengembangan Olahraga Pendidikan Non Formal dan Informal |
| | 06 | Evaluasi Olahraga Pendidikan Non Formal dan Informal |
| | 02 | Pengelolaan Olahraga Rekreasi |
| | 01 | Pengembangan Olahraga Massal |
| | 02 | Evaluasi Olahraga Massal |
| | 03 | Pengembangan Olahraga Tradisional |
| | 04 | Evaluasi Olahraga Tradisional |
| | 05 | Pengembangan Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata |
| | 06 | Evaluasi Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata |
| | 03 | Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga |
| | 01 | Pengembangan Olahraga Pendidikan |

| | | | |
|--|----|---|--|
| | | 02 | Evaluasi Olahraga Pendidikan |
| | | 03 | Pengembangan Olahraga Rekreasi |
| | | 04 | Evaluasi Olahraga Rekreasi |
| | | 05 | Pengembangan Olahraga Prestasi |
| | | 06 | Evaluasi Olahraga Prestasi |
| | | 07 | Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga Kota |
| | | 08 | Evaluasi Sekolah Khusus Olahraga Kota |
| | 04 | Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Olahraga Tradisional | |
| | | 01 | Lokal |
| | | 02 | Nasional |
| | | 03 | Layanan Khusus Olahraga Dini, Lansia dan Penyandang Cacat |
| | 05 | Kemitraan dan Penghargaan Olahraga | |
| | | 01 | Kemitraan Keolahragaan Lintas Sektoral |
| | | 02 | Kemitraan Keolahragaan Daerah |
| | | 03 | Kemitraan Keolahragaan Luar Negeri |
| | | 04 | Penelusuran dan Penyelenggaraan Penghargaan Olahraga |
| | 05 | Peningkatan Prestasi Olahraga | |
| | | 01 | Pembibitan dan IPTEK Olahraga |
| | | 01 | Penelusuran dan Penelaahan Bakat |
| | | 02 | Program dan Evaluasi Pengembangan Olahragawan Berbakat |
| | | 03 | Kompetisi Nasional dan Internasional |
| | | 04 | Penerapan Identifikasi dan Kajian, Pendayagunaan serta Evaluasi dan Diseminasi |
| | | 05 | Pengembangan IPTEK Olahraga |
| | 02 | Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan | |
| | | 01 | Pengembangan Pelatih dan Instruktur Nasional dan Internasional |
| | | 02 | Pengembangan Wasit dan Juri Nasional dan Internasional |
| | | 03 | Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung |
| | | 04 | Pendidikan dan Rekreasi |
| | | 05 | Kelembagaan dan Sumber Daya Olahraga Prestasi |
| | | 06 | Olahraga Fungsional dan Profesional |
| | 03 | Industri dan Promosi Olahraga | |

| | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|---|
| | | 01 | Jasa, Produk dan Manajemen Industri Olahraga |
| | | 02 | Penelusuran dan Penyelenggaraan Promosi Olahraga |
| | | 04 | Olahraga Prestasi |
| | | 01 | Pengembangan, Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Daerah |
| | | 02 | Pengembangan, Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Nasional |
| | | 03 | Pengembangan, Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Internasional |
| | | 05 | Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga |
| | | 01 | Standarisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi |
| | | 02 | Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga Prestasi. Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi |
| | | 03 | Infrastruktur Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan, Rekreasi dan Prestasi |
| PM | Penanaman Modal | | |
| | 01 | Perencanaan Penanaman Modal | |
| | | 01 | Perencanaan Industri Agrobisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya |
| | | 01 | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan |
| | | 02 | Kelautan, Perikanan dan Peternakan |
| | | 03 | Energi Terbarukan |
| | | 04 | Energi Tak Terbarukan |
| | | 05 | Sumber Daya Mineral Logam |
| | | 06 | Sumber Daya Mineral Non Logam |
| | | 02 | Perencanaan Industri Manufaktur |
| | | 01 | Industri Logam dan Mesin |
| | | 02 | Industri Tekstil dan Aneka |
| | | 03 | Industri Kimia Dasar |
| | | 04 | Industri Barang Kimia dan Farmasi |
| | | 05 | Industri Alat Transportasi |
| | | 06 | Industri Telematika |
| | | 03 | Perencanaan Jasa dan Kawasan |
| | | 01 | Jasa Perdagangan |
| | | 02 | Jasa Pariwisata |

| | | | |
|--|----|-------------------------------------|--|
| | | 03 | Kawasan Ekonomi |
| | | 04 | Kawasan Ekonomi Khusus |
| | | 05 | Kawasan Ekonomi Lainnya |
| | 04 | Perencanaan Infrastruktur | |
| | | 01 | Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian |
| | | 02 | Infrastruktur Jalan dan Jembatan |
| | | 03 | Infrastruktur Energi |
| | | 04 | Infrastruktur Sumber Daya Air |
| | | 05 | Infrastruktur Transportasi Laut |
| | | 06 | Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya |
| | 02 | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | |
| | | 01 | Deregulasi Penanaman Modal |
| | | 01 | Sektor Primer Pertanian, Kelautan, dan Perikanan |
| | | 02 | Sektor Primer energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan |
| | | 03 | Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika |
| | | 04 | Sektor Sekunder Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka |
| | | 05 | Sektor Tersier Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi |
| | | 06 | Sektor Tersier Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya |
| | 02 | Pengembangan Peluang Potensi Daerah | |
| | | 01 | Sektor Primer |
| | | 02 | Sektor Tersier |
| | | 03 | Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika |
| | | 04 | Sektor Sekunder Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka |
| | 03 | Pemberdayaan Usaha | |
| | | 01 | Pembinaan |
| | | 02 | Penyuluhan |
| | | 03 | Sektor Primer dan Tersier |
| | | 04 | Sektor Sekunder |
| | | 05 | Pelayanan Usaha Sektor Primer dan Tersier |
| | | 06 | Pelayanan Usaha Sektor Sekunder |

| | | | |
|--|----|----------------------------|--|
| | | 07 | Workshop dan Sosialisasi |
| | 03 | Promosi Penanaman Modal | |
| | | 01 | Pengembangan Promosi |
| | | 01 | Analisis Target Strategi Promosi |
| | | 02 | Analisis Strategi Daya Saing Promosi |
| | | 03 | Fasilitas Promosi Wilayah Pasifik dan Afrika |
| | | 04 | Fasilitas Promosi Wilayah Jawa Barat |
| | | 02 | Promosi Sektoral |
| | | 01 | Promo Industri Sumber Daya Alam |
| | | 02 | Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik |
| | | 03 | Industri Manufaktur Lainnya |
| | | 04 | Promosi Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan |
| | | 05 | Promosi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya |
| | | 03 | Fasilitasi Promosi Wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten |
| | | 04 | Pameran dan Sarana Promosi |
| | | 01 | Pameran dalam Penyusunan Program dan Monitoring |
| | | 02 | Pameran dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi |
| | | 03 | Media Cetak |
| | | 04 | Materi Promosi Media Cetak |
| | | 05 | Publikasi dan Distribusi Media Cetak |
| | | 06 | Pameran Luar Negeri Publikasi dan Distribusi |
| | | 07 | Materi Promosi Media Elektronik |
| | | 08 | Pelayanan Informasi Media Elektronik |
| | 04 | Kerja Sama Penanaman Modal | |
| | | 01 | Kerja Sama Bilateral dan Multilateral |
| | | 01 | Kerja Wilayah Amerika |
| | | 02 | Kerja Sama Wilayah Eropa |
| | | 03 | Kerja Sama Wilayah Asia |
| | | 04 | Kerja Sama Wilayah Pasifik dan Afrika |
| | | 05 | Kerja Sama Organisasi PBB |
| | | 06 | Kerja Sama Organisasi Non PBB |
| | | 02 | Kerja Sama Regional ASEAN |
| | | 01 | Kerja Sama ASEAN |
| | | 02 | Kerja Sama Sub Regional ASEAN |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 03 | Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Barat Indonesia |
| | | 04 | Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Timur Indonesia |
| | | 05 | Kerja Sama APEC |
| | | 06 | Kerja Sama ASEAN dan Kawasan Lainnya |
| | | 07 | Kerja Sama ASEAN dan Kawasan Lainnya |
| | 03 | | Kerja Sama Dunia Usaha Internasional |
| | | 01 | Asosiasi Bisnis |
| | | 02 | Lembaga Bisnis |
| | | 03 | Lembaga Perbankan |
| | | 04 | Lembaga Non Perbankan |
| | 05 | | Pelayanan Penanaman Modal |
| | | 01 | Pelayanan Aplikasi |
| | | 01 | Aplikasi Baru Sektor Primer dan Tersier |
| | | 02 | Aplikasi Perluasan Sektor Primer dan Tersier |
| | | 03 | Aplikasi Perubahan Sektor Primer dan Tersier |
| | | 04 | Aplikasi Baru Sektor Sekunder |
| | | 05 | Aplikasi Perluasan Sektor Sekunder |
| | | 06 | Aplikasi Perubahan Sektor Sekunder |
| | | 07 | Aplikasi Sektor Tersier |
| | | 08 | Pengolahan Data Penanaman Modal |
| | | 09 | Laporan PMPTSP |
| | 02 | | Pelayanan Perizinan |
| | | 01 | Perizinan Sektor Primer dan Tersier Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana |
| | | 02 | Perizinan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi |
| | | 03 | Perizinan Sektor Primer dan Tersier Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa |
| | | 04 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam |
| | | 05 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia |
| | | 06 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka |
| | 03 | | Pelayanan Fasilitas |
| | | 01 | Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Pertanian, |

| | | | |
|----|------------------------|--|--|
| | | | Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana |
| | | 02 | Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi |
| | | 03 | Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa |
| | | 04 | Pelayanan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam |
| | | 05 | Pelayanan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia |
| | | 06 | Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka |
| | 06 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | |
| | | 01 | BAP Pemantauan Penanaman Modal |
| | | 02 | Laporan Triwulan/Semester Pemantauan Penanaman Modal |
| | | 03 | <i>Helpdesk</i> Pemantauan Penanaman Modal |
| | | 04 | Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal dan PTSP |
| | | 05 | Saksi Fasilitas Penyelesaian PMPTSP |
| | | 06 | Pembelaan Fasilitas Penyelesaian PMPTSP |
| | | 07 | Pemberian Keterangan FSP |
| | | 08 | Analisis PMPTSP |
| | | 09 | Pengawasan Penanaman Modal 5 Tahun Musnah |
| | | 10 | Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal |
| | | 11 | Naskah dan Dokumen Izin |
| | | 12 | Naskah dan Dokumen Izin Kadaluwarsa |
| | | 13 | Izin Investasi Strategis Penanaman Modal |
| | | 14 | Perizinan Lainnya Sesuai Jenisnya |
| | | 15 | Pencabutan/Pembatalan/Perbaikan Perizinan Penanaman Modal |
| | | 16 | Administrasi PMPTSP |
| | | 17 | Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal |
| | | 18 | <i>Workshop</i> /Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan PMPTSP |
| PB | Penanggulangan Bencana | | |
| | 01 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |
| | | 01 | Pengurangan Risiko Bencana |
| | | 01 | Pencegahan Pengkajian Risiko |
| | | 02 | Pencegahan Pengelolaan Risiko |

| | | | |
|--|----|-------------------------|---|
| | | 03 | Mitigasi Struktur |
| | | 04 | Mitigasi Non Struktur |
| | 02 | Pemberdayaan Masyarakat | |
| | | 01 | Peran Lembaga Usaha Padat Modal |
| | | 02 | Peran Lembaga Usaha Padat Karya |
| | | 03 | Peran Organisasi Internasional |
| | | 04 | Peran Organisasi Sosial Masyarakat Nasional |
| | | 05 | Peran Peningkatan Kesadaran Masyarakat |
| | | 06 | Peran Peningkatan Ketahanan Masyarakat |
| | 03 | Kesiapsiagaan | |
| | | 01 | Peringatan Pemaduan Sistem Jaringan |
| | | 02 | Pemantauan dan Peringatan |
| | | 03 | Perencanaan Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya |
| | | 04 | Perencanaan Penerapan Rencana Strategis |
| | | 05 | Penyediaan Pengendalian Sumber Daya |
| | | 06 | Penyiapan Pengendalian Sumber Daya |
| | 02 | Penanganan Darurat | |
| | | 01 | Tanggap Darurat |
| | | 01 | Perencanaan Pendataan Darurat |
| | | 02 | Perencanaan Operasi |
| | | 03 | Pengendalian Pengorganisasian Pos Komando |
| | | 04 | Pengendalian Sarana dan Prasarana |
| | | 05 | Penyelamatan |
| | | 06 | Evakuasi |
| | | 02 | Bantuan Darurat |
| | | 01 | Bantuan Sandang |
| | | 02 | Bantuan Pangan |
| | | 03 | Bantuan Kesehatan |
| | | 04 | Bantuan Air Bersih |
| | | 05 | Bantuan Pembangunan Hunian Sementara |
| | | 06 | Bantuan Pendukung Hunian Sementara |
| | | 03 | Perbaikan Darurat |
| | | 01 | Penyiapan Peralatan |
| | | 02 | Angkutan |
| | | 03 | Perbaikan Prasarana Sosial |
| | | 04 | Perbaikan Prasarana Ekonomi |

| | | | |
|--|----|-------------------------------|--|
| | | 05 | Pemantauan |
| | | 06 | Pelaporan |
| | 03 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi | |
| | | 01 | Penilaian Kerusakan |
| | | 01 | Inventarisasi Kerusakan Fisik |
| | | 02 | Inventarisasi Kerusakan Sosial Ekonomi |
| | | 03 | Estimasi Pembiayaan Pembangunan |
| | | 04 | Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi |
| | | 02 | Pemulihan dan Peningkatan Fisik |
| | | 01 | Rehabilitasi Fasilitas Umum |
| | | 02 | Rekonstruksi Fasilitas Umum |
| | | 03 | Rehabilitasi Fasilitas Sosial |
| | | 04 | Rekonstruksi Fasilitas Sosial |
| | | 05 | Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Berat |
| | | 06 | Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Ringan |
| | | 03 | Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi |
| | | 01 | Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya |
| | | 02 | Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan |
| | | 03 | Pemulihan Ekonomi |
| | | 04 | Peningkatan Ekonomi |
| | | 04 | Penanganan Pengungsi |
| | | 01 | Perlindungan Pengungsi |
| | | 02 | Pemberdayaan Pengungsi |
| | | 03 | Kompensasi Pengungsi |
| | | 04 | Pengembalian Hak Pengungsi |
| | | 05 | Pemulangan dan Repatriasi Pengungsi |
| | | 06 | Relokasi/Pengalihan Pengungsi |
| | 04 | Logistik dan Peralatan | |
| | | 01 | Logistik |
| | | 01 | Inventarisasi Analisis Kebutuhan |
| | | 02 | Inventarisasi Pengadaan |
| | | 03 | Penyimpanan |
| | | 04 | Distribusi |
| | | 02 | Peralatan |
| | | 01 | Inventarisasi Analisis Kebutuhan |
| | | 02 | Inventarisasi Pengadaan |
| | | 03 | Penyimpanan |

| | | | |
|----|---------------------------|-------------------------------|---|
| | | 04 | Pemeliharaan |
| | | 05 | Pengerahan |
| | | 06 | Distribusi |
| PK | Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | 01 | Kebijakan Bersifat Pengaturan | |
| | | 01 | Kebijakan tentang Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 01 | Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan |
| | | 02 | Penyiapan Bahan |
| | | 03 | Perumusan Kebijakan |
| | | 04 | Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan |
| | | 05 | Penetapan dalam Bentuk NSPK |
| | | 06 | Perumusan dan Penerapan Standar |
| | | 02 | MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>) |
| | 02 | Kebijakan Bersifat Penerapan | |
| | | 01 | Kebijakan Bersifat Penerapan |
| | | 01 | Pengkajian dan Pengusulan Penetapan |
| | | 02 | Penyiapan Bahan |
| | | 03 | Perumusan Penetapan |
| | | 04 | Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Penetapan |
| | | 05 | Penetapan dalam Bentuk Keputusan |
| | 03 | Pembinaan Pendidikan | |
| | | 01 | Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal |
| | | 01 | PAUD (Bahan Ajar, Pelatihan) |
| | | 02 | PAUD (Sosialisasi, Peringatan Hari Anak Nasional) |
| | | 03 | PAUD (<i>Block Grant</i>) |
| | | 04 | Pendidikan Masyarakat (Penyelenggaraan Program, Pemberian Bantuan Sosial, Pembinaan Program, Pameran/Publikasi/Sosialisasi) |
| | | 05 | Pendidikan Masyarakat (Lomba, Penghargaan, Anugrah dan Peringatan Hari Anak Internasional) |
| | | 06 | Kursus dan Pelatihan (Penyelenggaraan Program, Pemberian Bantuan Sosial, Pembinaan Program, dan Standar Kursus) |
| | | 07 | Lomba Lembaga Kursus Berprestasi, Publikasi dan Promosi Kursus |

| | | | |
|--|----|------------------|--|
| | | 08 | Sertifikasi Kursus |
| | | 09 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (Bahan Ajar dan Sosialisasi) |
| | | 10 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (<i>Block Grant</i> , Data Pendidik dan Tenaga Pendidik) |
| | 02 | Pendidikan Dasar | |
| | | 01 | Sekolah Dasar (Kurikulum, Bahan Ajar dan Pelatihan) |
| | | 02 | Sekolah Dasar (<i>Block Grant</i>) |
| | | 03 | Sekolah Dasar (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Lomba, Sayembara, Festival) |
| | | 04 | Sekolah Dasar (BOS dan Bantuan Siswa Miskin) |
| | | 05 | Sekolah Menengah Pertama (Kurikulum, Bahan Ajar, Pelatihan) |
| | | 06 | Sekolah Menengah Pertama (<i>Block Grant</i>) |
| | | 07 | Sekolah Menengah Pertama (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Lomba, Sayembara, Festival) |
| | | 08 | Sekolah Menengah Pertama (BOS dan Bantuan Siswa Miskin) |
| | | 09 | Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/PK-LK (Bahan Ajar dan Petunjuk Teknis) |
| | | 10 | Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/PK-LK (<i>Block Grant</i>) |
| | | 11 | Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/PK-LK (Sosialisasi, Lomba, Sayembara, Festival, Jambore, Kurikulum, Alat Bantu Pembelajaran, Pendataan) |
| | | 12 | Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/PK-LK (Kelembagaan: Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi, <i>Block Grant</i> , Bimbingan Teknis, Lomba-lomba) |
| | | 13 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (Pendataan, Pemetaan, Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik) |
| | | 14 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik: Standar, Uji, dan Sertifikasi Kompetensi) |
| | | 15 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (Penilaian Prestasi Kerja, Angka Kredit, Pengawas Sekolah, Bimbingan |

| | | | |
|--|----|---------------------|--|
| | | | Teknis/Sosialisasi) |
| | | 16 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (Penghargaan Guru dan Tenaga Pendidik) |
| | | 17 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (<i>Block Grant</i>) |
| | 03 | Pendidikan Menengah | |
| | | 01 | Sekolah Menengah Atas (Kurikulum, Bahan Ajar, Pelatihan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi, Lomba, Sayembara, dan Festival) |
| | | 02 | Sekolah Menengah Atas (<i>Block Grant</i> , Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin) |
| | | 03 | Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/PK-LK (Bahan Ajar, Petunjuk Teknis, Sosialisasi, Lomba, Jambore, Festival, Kurikulum/Bahan Pembelajaran, Alat Bantun Pembelajaran) |
| | | 04 | Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/PK-LK (<i>Block Grant</i> , Pendataan) |
| | | 05 | Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/PK-LK (Kelembagaan: UKS, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi, <i>Block Grant</i> , Bimbingan Teknis/Sosialisasi, Lomba, Sayembara, Festival, Gebyar dan Jambore) |
| | | 06 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (Pendataan, Pemetaan, Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik, Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah, Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik, Bimbingan Teknis/Sosialisasi) |
| | | 07 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik: Standar, Uji, dan Sertifikasi Kompetensi) |
| | | 08 | Pendidik dan Tenaga Pendidik (<i>Block Grant</i> , Penghargaan Guru dan Tenaga Pendidik) |
| | 04 | Pendidikan Tinggi | |
| | | 01 | Kelembagaan dan Kerja Sama (Program dan Evaluasi, Pengembangan Kelembagaan) |
| | | 02 | Kelembagaan dan Kerja Sama (Pemberdayaan |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | | Kelembagaan) |
| | | 03 | Kelembagaan dan Kerja Sama (Kerja Sama antar Lembaga) |
| | | 04 | Pendidikan dan Pengajaran (Penerimaan Mahasiswa Baru, Perkuliahan, Program Studi, UTS, UAS, Administrasi Kelulusan) |
| | | 05 | Pendidikan dan Kerja Sama (Registrasi Mahasiswa, Kurikulum, Tugas Akhir: Skripsi, Tesis, Disertasi, Komprehensif, KKL, dan PPL) |
| | | 06 | Pendidikan dan Pengajaran (Penetapan Kelulusan, Ijazah dan Transkrip, Buku Induk Nomor Registrasi Kelulusan) |
| | | 07 | Dosen (Daftar Hadir, Ekuivalen Wajib Mengajar Penuh, Laporan Evaluasi, Evaluasi Mahasiswa terhadap Dosen, Pembimbingan dan Pengujian Mahasiswa, Evaluasi Program Studi) |
| | | 08 | Penunjukan Pendidikan (Administrasi dan Penentu Pemakaian: Laboratorium, Perpustakaan, Studio, Bengkel, dll.) |
| | | 09 | Data dan Organisasi Alumni |
| | | 05 | Kemahasiswaan |
| | | 01 | Status: Cuti, Putus Kuliah/Pindah, <i>Drop Out</i> , Laporan Status Mahasiswa/Keterangan masih Kuliah, dan Meninggal Dunia |
| | | 02 | Pembinaan/Pelatihan Mahasiswa |
| | | 03 | Kesejahteraan dan Fasilitas |
| | | 04 | Organisasi Mahasiswa |
| | | 05 | Himpunan Orang Tua Mahasiswa |
| | | 06 | Kegiatan Mahasiswa |
| | | 07 | Lomba Kegiatan Kemahasiswaan Lokal/Nasional/Internasional |
| | | 08 | Prestasi Mahasiswa dalam Pengembangan Sains, Teknologi, Seni Budaya, dan Olahraga |
| | | 09 | Berkas Perorangan Mahasiswa |
| | | 06 | Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| | | 01 | Perencanaan Pengadaan |
| | | 02 | Karier |
| | | 03 | Kualifikasi |

| | | |
|----|----|---|
| | 07 | Penelitian |
| | 01 | Penawaran Penelitian |
| | 02 | Perencanaan Penelitian |
| | 03 | Laporan dan Evaluasi Hasil Penelitian |
| | 04 | Penyebaran Hasil Penelitian (Sosialisasi dan Diseminasi) |
| | 05 | Penemuan Teknologi Terbaru |
| | 06 | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan |
| | 07 | Data Statistika Penelitian |
| | 08 | Seminar, Lokakarya, Temu Karya, dan <i>Workshop</i> Hasil Penelitian |
| | 08 | Pengabdian Masyarakat |
| | 01 | Penawaran Pengabdian |
| | 02 | Perencanaan Pengabdian |
| | 03 | Laporan dan Evaluasi Hasil Pengabdian |
| | 04 | Penyebaran hasil Pengabdian (Sosialisasi dan Diseminasi) |
| | 05 | Forum Pengabdian Masyarakat |
| | 06 | Data Statistik Pengabdian |
| | 07 | Penyuluhan dan Konsultasi |
| | 08 | Bantuan Sosial |
| | 09 | KKN |
| | 09 | Tata Pamong Perguruan Tinggi |
| | 01 | Majelis Wali Amanah |
| | 02 | Senat Akademik |
| | 03 | Dewan Guru Besar |
| | 04 | Perencanaan, Program Kerja, Penilaian, Pembinaan Penilaian, dan Pengembangan Komisi Guru Besar/Detasering |
| 04 | | Kebudayaan |
| | 01 | Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman |
| | 01 | Registrasi Nasional |
| | 02 | Perlindungan |
| | 03 | Pengembangan dan Pemanfaatan |
| | 04 | Eksplorasi dan Dokumentasi |
| | 02 | Pembinaan Kesenian dan Perfilman |
| | 01 | Pembinaan Seni Pertunjukan |
| | 02 | Pembinaan Seni Rupa |
| | 03 | Pembinaan Literasi dan Apresiasi Film |

| | | | |
|--|----|--|--|
| | | 04 | Dokumentasi Seni dan Film |
| | | 05 | Publikasi Seni dan Film |
| | 03 | Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi | |
| | | 01 | Kelembagaan dan Kepercayaan |
| | | 02 | Komunitas Kepercayaan |
| | | 03 | Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional |
| | | 04 | Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial |
| | 04 | Sejarah dan Nilai Budaya | |
| | | 01 | Sejarah |
| | | 02 | Pemetaan Nilai |
| | | 03 | Verifikasi dan Perumusan Nilai |
| | | 04 | Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya |
| | | 05 | Publikasi Sejarah dan Nilai Budaya |
| | 05 | Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya | |
| | | 01 | Internalisasi Nilai Budaya (Pengemasan Nilai Budaya) |
| | | 02 | Internalisasi Nilai Budaya (Penanaman Nilai Budaya) |
| | | 03 | Kekayaan Budaya |
| | | 04 | Warisan Budaya Nasional dan Dunia |
| | | 05 | Diplomasi Budaya |
| | 05 | Kurikulum | |
| | | 01 | Pembinaan Kurikulum |
| | | 02 | Hasil Evaluasi Penyusunan Kurikulum |
| | 06 | Perbukuan | |
| | | 01 | Penyusunan Standar Mutu Buku |
| | | 02 | Pengumpulan Naskah |
| | | 03 | Penilaian Mutu Buku dan Pemilahan |
| | | 04 | Persetujuan dan Pengesahan Naskah |
| | | 05 | Penerbitan/Percetakan |
| | | 06 | Master Buku/Naskah yang Dicitak |
| | | 07 | Distribusi Buku |
| | | 08 | Pengembangan Naskah |
| | | 09 | Pengkajian Buku |
| | 07 | Penilaian Pendidikan | |
| | | 01 | Penilaian Akademik |
| | | 02 | Penilaian Non Akademik |
| | | 03 | Analisis dan Sistem Informasi Penilaian |

| | | | |
|--|----|---|--|
| | 08 | Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | |
| | | 01 | Pengembangan dan Perlindungan |
| | | 01 | Pengkajian |
| | | 02 | Pembakuan dan Perlindungan |
| | | 03 | Informasi dan Publikasi |
| | | 02 | Pembinaan dan Pemasyarakatan |
| | | 01 | Pemasyarakatan |
| | | 03 | Pembelajaran |
| | | 01 | Proses Pembelajaran |
| | | 02 | Pembinaan Tenaga Kebahasaan dan Kesusastraan |
| | | 04 | Peningkatan dan Pengendalian |
| | | 01 | Peningkatan Fungsi dan Peran |
| | | 02 | Pengendalian Penggunaan Bahasa |
| | 09 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan | |
| | | 01 | Pengembangan Profesi Pendidikan |
| | | 01 | Peningkatan Kompetensi |
| | | 02 | Sertifikasi |
| | | 02 | Pengembangan Tenaga Kependidikan |
| | | 01 | Program |
| | | 02 | Evaluasi |
| | | 03 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan |
| | | 01 | Program |
| | | 02 | Evaluasi |
| | | 04 | Penjaminan Mutu Pendidikan |
| | | 01 | Pemetaan Mutu |
| | | 02 | Sistem Evaluasi |
| | | 05 | Penyusunan Materi/SOP/Instrumen/Panduan/Pedoman |
| | | 06 | Penyelenggaraan Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi |
| | | 07 | Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Monitoring dan Evaluasi |
| | | 08 | Penyaluran <i>Block Grant</i> Pasca Bencana |
| | | 09 | Lomba/Sayembara/Festival/Olimpiade Pendidikan Nasional Internasional |
| | 10 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan | |
| | | 01 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio, Televisi, dan Film |

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| | | 01 | Perancangan dan Produksi |
| | | 02 | Penyiaran dan Pengendalian |
| | 02 | Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web | |
| | | 01 | Perancangan dan Produksi |
| | | 02 | Aplikasi dan Pengendalian |
| | 03 | Pengembangan Jejaring | |
| | | 01 | Pengkajian dan Perancangan |
| | | 02 | Pemeliharaan dan Pengendalian |
| | 11 | Data dan Statistik Pendidikan | |
| | | 01 | Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan |
| | | 01 | Validasi dan Integrasi Data Peserta Didik |
| | | 02 | Validasi dan Integrasi Data Peserta Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| | | 02 | Validasi dan Integrasi Data Proses Pembelajaran |
| | | 03 | Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik |
| | | 01 | Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Anak |
| | | 02 | Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah |
| | | 03 | Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan Tinggi |
| | 12 | Arkeologi | |
| | | 01 | Program dan Kerja Sama Penelitian |
| | | 01 | Program |
| | | 02 | Kerja Sama |
| | | 02 | Data dan Informasi Penelitian |
| | | 01 | Data |
| | | 02 | Informasi |
| | 13 | Monitoring dan Evaluasi | |
| PG | Perdagangan | | |
| | 01 | Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | 01 | Bina Usaha |
| | | 01 | Kelembagaan |
| | | 02 | Penguatan Usaha |
| | | 03 | Jasa Perdagangan Berbasis Elektronik |
| | | 04 | Jasa Perdagangan Berbasis Jasa Distribusi dan Bisnis |
| | | 05 | Usaha Dagang Asing |

| | | | |
|--|----|---|---|
| | | 06 | Keagenan |
| | | 07 | Informasi Pendaftaran Perusahaan |
| | | 08 | Informasi Seksi Analisis LKTP |
| | | 09 | Pelaku Pasar Pengecer |
| | | 10 | Pelaku Pasar Pemasok |
| | 02 | Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri | |
| | | 01 | Iklim Usaha |
| | | 02 | Bimbingan Teknis |
| | | 03 | Fasilitasi Usaha Produktif |
| | | 04 | Fasilitasi Usaha dan Pemasaran |
| | | 05 | Penelaahan Potensi Produk dalam Rangka Pengembangan Produk Lokal |
| | | 06 | Fasilitasi Penguatan Produk dalam Rangka Pengembangan Potensi Produk |
| | | 07 | Kerja Sama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pencitraan Produk Dalam Negeri |
| | | 08 | Peningkatan Promosi Pencitraan Produk Dalam Negeri |
| | 03 | Logistik dan Sarana Distribusi | |
| | | 01 | Perencanaan Pengembangan Sarana Distribusi |
| | | 02 | Bimbingan Teknis Pengembangan Sarana Distribusi |
| | | 03 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Sarana Distribusi |
| | | 04 | Evaluasi Pengelolaan Sarana Distribusi |
| | | 05 | Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik dengan Pemerintah |
| | | 06 | Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik dengan Non Pemerintah |
| | | 07 | Informasi Logistik |
| | | 08 | Bimbingan Teknis Penyediaan Jasa Logistik |
| | 04 | Bahan Pokok dan Bahan Strategis | |
| | | 01 | Informasi Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis) |
| | | 02 | Informasi Non Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis) |
| | | 03 | Hasil Industri berupa Gula dan Tepung |
| | | 04 | Hasil Industri berupa Minyak Goreng dan Garam |

| | | | |
|--|----|--|---|
| | | 05 | Barang Strategis Hasil Agro |
| | | 06 | Barang Strategis Hasil Industri |
| | | 07 | Barang Pokok Agro Serelia |
| | | 08 | Barang Pokok Agro Hewan dan Non Serelia |
| | 02 | Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | |
| | | 01 | Standarisasi |
| | | 01 | Hubungan Kelembagaan |
| | | 02 | Informasi Standar |
| | | 03 | Kerja Sama Standarisasi Regional |
| | | 04 | Kerja Sama Standarisasi Bilateral dan Multilateral |
| | | 05 | Penetapan Standar |
| | | 06 | Perumusan Standar |
| | | 07 | Tata Usaha Kepegawaian |
| | | 08 | Tata Usaha Keuangan |
| | | 09 | Tata Usaha Perencanaan dan Program |
| | | 10 | Tata Usaha Inventarisasi Kantor/BMAN |
| | | 02 | Pemberdayaan Konsumen |
| | | 01 | Kerja Sama |
| | | 02 | Informasi dan Publikasi |
| | | 03 | Konsultasi Hukum Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen |
| | | 04 | Analisis Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen |
| | | 05 | Bimbingan Konsumen |
| | | 06 | Bimbingan Pelaku Usaha |
| | | 07 | Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat |
| | | 08 | Fasilitas Pemberdayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| | | 04 | Pengawasan Barang Beredar dan Jasa |
| | | 01 | Produk Pertambangan dan Olahan |
| | | 02 | Produk Aneka Industri |
| | | 03 | Produk Pertanian dan Kehutanan |
| | | 04 | Produk Kimia dan Olahan |
| | | 05 | Jasa Distribusi |
| | | 06 | Jasa Bisnis |
| | | 07 | Kerja Sama Lembaga Pemerintah |
| | | 08 | Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah |

| | | |
|----|----|--|
| | 05 | Metrologi |
| | 01 | Sarana Metrologi Legal |
| | 02 | Kerja Sama Metrologi Legal |
| | 03 | Kelembagaan Metrologi Legal |
| | 04 | Penilaian Metrologi Legal |
| | 05 | Besaran Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu |
| | 06 | Besaran Arus, Panjang, dan Volume |
| | 07 | Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya |
| | 08 | Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Internasional |
| | 09 | Bimbingan Mutu Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) |
| | 10 | Pelayanan Teknis Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) |
| | 11 | Bimbingan Mutu Balai Pengujian UTTP |
| | 12 | Pelayanan Teknis Balai Pengujian UTTP |
| | 13 | Bimbingan Kemetrolagian Bali SML Regional 1 |
| 03 | | Perdagangan Luar Negeri |
| | 01 | Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan |
| | 01 | Ekspor Produk Tanaman Pangan |
| | 02 | Ekspor Produk Perikanan dan Peternakan |
| | 03 | Tanaman Perkebunan Tahunan |
| | 04 | Tanaman Perkebunan Musiman |
| | 05 | Hortikultura |
| | 06 | Rempah-rempah dan Tanaman Obat |
| | 07 | Hasil Hutan Berupa Kayu dan Produk Kayu |
| | 08 | Hasil Hutan Bukan Kayu |
| | 02 | Ekspor Produk Industri dan Pertambangan |
| | 01 | Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) |
| | 02 | Produk Aneka dan Jasa |
| | 03 | Produk Logam dan Mesin |
| | 04 | Produk Alat Transportasi dan Elektronika |
| | 05 | Produk Industri Agro |
| | 06 | Produk Kimia |
| | 07 | Produk Migas |

| | | | |
|--|----|--------------------------------------|--|
| | | 08 | Produk Pertambangan |
| | 03 | Impor | |
| | | 01 | Impor Barang Modal Mesin dan Peralatan Mesin |
| | | 02 | Impor Barang Modal Alat Angkut |
| | | 03 | Barang Pertanian dan Kehutanan |
| | | 04 | Barang Kelautan dan Perikanan |
| | | 05 | Barang Aneka Industri |
| | | 06 | Barang Bahan Baku Industri |
| | | 07 | Barang Konsumsi Tahan Lama |
| | | 08 | Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama |
| | | 09 | Barang Kimia dan Bahan Berbahaya |
| | | 10 | Barang Tambang dan Limbah |
| | 04 | Fasilitasi Ekspor dan Impor | |
| | | 01 | Kerja Sama Multilateral dan Regional, termasuk Bilateral |
| | | 02 | Pembiayaan Perdagangan dalam Kerja Sama Internasional |
| | | 03 | Sumber Pembiayaan dan Sistem Pembayaran |
| | | 04 | Prosedur Ekspor dan Impor |
| | | 05 | Dokumen Ekspor dan Impor |
| | | 06 | Sarana dan Prasarana Penunjang Perdagangan Internasional |
| | | 07 | Regulasi Penunjang Perdagangan Internasional |
| | | 08 | Analisa Pelayanan Perdagangan |
| | | 09 | Fasilitasi Pelayanan Perdagangan |
| | 05 | Pengamanan Perdagangan | |
| | | 01 | Monitoring Hambatan Perdagangan |
| | | 02 | Evaluasi Monitoring Hambatan Perdagangan |
| | | 03 | Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan |
| | | 04 | Penanganan Tuduhan <i>Dumping</i> |
| | | 05 | Penanganan Tuduhan Subsidi |
| | | 06 | Penanganan Tuduhan <i>Safeguard</i> |
| | 04 | Kerja Sama Perdagangan Internasional | |
| | | 01 | Multilateral |
| | | 01 | Tarif Barang Pertanian |
| | | 02 | Non Tarif Barang Pertanian |
| | | 03 | Tarif Barang Non Pertanian |
| | | 04 | Non Tarif Barang Non Pertanian |

| | | | |
|--|----|---|---|
| | | 05 | Akses Pasar Barang Non Pertanian |
| | | 06 | Aturan Perdagangan |
| | | 07 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Investasi |
| | | 08 | Lingkungan dan Isu Baru |
| | | 09 | Tinjauan Ketentuan Perdagangan |
| | | 10 | Notifikasi |
| | 02 | ASEAN | |
| | | 01 | Perdagangan Barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I |
| | | 02 | Fasilitas Perdagangan Barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I |
| | | 03 | Perdagangan Barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II |
| | | 04 | Fasilitas Perdagangan Barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II |
| | | 05 | ASEAN Mitra Dialog |
| | | 06 | Kerja Sama antar dan Sub Regional |
| | 03 | APEC dan Organisasi Internasional Lainnya | |
| | | 01 | Akses Perdagangan Barang APEC |
| | | 02 | Akses Investasi APEC |
| | | 03 | Fasilitasi Perdagangan APEC |
| | | 04 | Fasilitasi Investasi APEC |
| | | 05 | Badan-badan PBB dan Non PBB |
| | | 06 | Organisasi Komoditi Internasional |
| | 04 | Bilateral | |
| | | 01 | Kerja Sama Bilateral dengan Berbagai Negara-negara |
| | 05 | Perundingan Perdagangan Jasa | |
| | | 01 | Jasa Bisnis dan Distribusi |
| | | 02 | Jasa Keuangan |
| | | 03 | Jasa Konstruksi, Pariwisata, Rekreasi Budaya dan Olahraga |
| | | 04 | Jasa Transportasi |
| | | 05 | Jasa Pendidikan |
| | | 06 | Jasa Kesehatan |
| | | 07 | Jasa Komunikasi |
| | | 08 | Jasa Lingkungan dan Jasa Lainnya |
| | | 09 | <i>Rules</i> dan Peraturan Domestik |
| | | 10 | Penyusunan Analisis Informasi |
| | 05 | Pengembangan Ekspor Nasional | |

| | | |
|--|----|---|
| | 01 | Pasar dan Informasi Ekspor |
| | 01 | Pengembangan Pasar |
| | 02 | Pengelolaan Data pada Sistem Informasi Ekspor |
| | 03 | Pengembangan Sistem Informasi Ekspor |
| | 04 | Pelayanan Pelaku Usaha Ekspor |
| | 05 | Publikasi Informasi Ekspor |
| | 02 | Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif |
| | 01 | Hasil Industri Manufaktur berupa Mesin, Logam, Elektronik, dan Telematika |
| | 02 | Hasil Industri Manufaktur berupa Pangan, Tekstil dan Produk Tekstil, Alat Kesehatan dan Aneka |
| | 03 | Produk Agro berupa Kehutanan dan Perkebunan |
| | 04 | Produk Agro berupa Perikanan dan Pertanian |
| | 05 | Jasa Bisnis dan Profesi |
| | 06 | Jasa Konstruksi dan Distribusi |
| | 07 | Media dan IPTEK Ekonomi Kreatif |
| | 08 | Seni Budaya dan Desain Ekonomi Kreatif |
| | 03 | Kerja Sama Pengembangan Ekspor |
| | 01 | Pemerintah Luar Negeri |
| | 02 | Non Pemerintah Luar Negeri |
| | 03 | Pemerintah Dalam Negeri |
| | 04 | Non Pemerintah Dalam Negeri |
| | 04 | Promosi dan Citra |
| | 01 | Promosi |
| | 02 | Perencanaan Citra |
| | 03 | Pemantauan dan Evaluasi Citra |
| | 04 | Penerapan Citra Dalam dan Luar Negeri |
| | 06 | Perdagangan Berjangka Komoditi |
| | 01 | Perniagaan |
| | 01 | Bina Usaha Kelembagaan dan Pelaku Penunjang |
| | 02 | Bina Usaha Pelaku Pasar |
| | 03 | Pengawasan Transaksi Kelembagaan dan Pelaku Penunjang |
| | 04 | Pengawasan Transaksi Pelaku Pasar |
| | 05 | Pemantauan dan Evaluasi Keuangan dalam Rangka |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| | | | Pengawasan Keuangan dan Audit |
| | | 06 | Audit Kepatuhan dan Keuangan dalam Rangka Pengawasan dan Audit |
| | | 02 | Analisis Pasar |
| | | 01 | Pengkajian Pasar Fisik dan Penyerahan |
| | | 02 | Posisi dan Pelaporan Pengkajian Pasar |
| | | 03 | Kelembagaan dan Produk Pengembangan Pasar |
| | | 04 | Tata Tertib dan Kontrak Pengembangan Pasar |
| | | 05 | Teknologi Informasi pada Sistem Informasi |
| | | 06 | Data pada Sistem Informasi |
| | | 03 | Pasar Fisik dan Jasa |
| | | 01 | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pelaku Pasar Lelang |
| | | 02 | Pembinaan Pelaku Sistem Resi Gudang |
| | | 03 | Pengawasan Transaksi Pasar Lelang |
| | | 04 | Pengawasan Penyelenggara dan Pelaku Pasar Lelang |
| | | 05 | Pengawasan Pengelola Agunan dan Lembaga Sertifikasi pada Sistem Resi Gudang |
| | | 06 | Pengawasan Lembaga Penjaminan dan Agen Penjual pada Sistem Resi Gudang |
| | 07 | Bimbingan Teknis | |
| | 08 | Evaluasi | |
| PN | Perencanaan dan Pembangunan | | |
| | 01 | Usulan Perencanaan | |
| | | 01 | Aspirasi DPRD |
| | | 02 | Usulan Langsung Masyarakat On Line dan Manual |
| | | 03 | Usulan Perangkat Daerah |
| | | 04 | Usulan Unit Kerja dalam Perangkat Daerah |
| | 02 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) | |
| | | 01 | Musrenbang RPJP/RPJM |
| | | 02 | Musrenbang RKPD |
| | | 03 | Forum Perangkat Daerah |
| | 03 | Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan | |
| | | 01 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) |
| | | 02 | Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) |
| | | 03 | Rencana Strategis Perangkat Daerah |
| | 04 | Rencana Kerja Tahunan | |
| | | 01 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |

| | | |
|----|----|--|
| | 02 | Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) |
| | 03 | Rencana Kerja Unit Kerja pada Perangkat Daerah |
| | 04 | Penetapan Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah |
| | 05 | Penetapan Kinerja Pejabat Eselon 3 dan 4 |
| 05 | | Rencana Pembangunan Wilayah Strategis |
| | 01 | Pusat Pertumbuhan Nasional dan Regional |
| | 02 | Metropolitan Bandung dan Bodebekkapur |
| | 03 | Pembangunan Bagian Wilayah |
| | 04 | Pembangunan Tematik |
| | 05 | Pembangunan Sektoral |
| 06 | | Pembangunan Daerah Perbatasan Kota Bandung |
| | 01 | Kajian Rencana Pembangunan Daerah Perbatasan Kota Bandung |
| | 02 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan Kota Bandung |
| | 03 | Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan Kota Bandung |
| 07 | | Indikator Keberhasilan Pembangunan |
| | 01 | Kajian Penetapan Indikator Keberhasilan Pembangunan |
| | 02 | Evaluasi Capaian Indikator Keberhasilan Pembangunan |
| 08 | | Kerja Sama Perencanaan |
| | 01 | Kegiatan Komite Perencanaan |
| | 02 | Rekomendasi Komite Perencanaan |
| | 03 | Kerja Sama Perencanaan dengan Perguruan Tinggi |
| | 04 | Kerja Sama Perencanaan dengan Pemerintah Daerah |
| | 05 | Kerja Sama Perencanaan dengan Luar Negeri |
| 09 | | Pejabat Fungsional Perencanaan (Perencana) |
| | 01 | Kajian Pengembangan Perencana |
| | 02 | Pembinaan Perencana |
| 10 | | Laporan |
| | 01 | Laporan Berkala (Laporan Triwulan dan Semester) |
| | 02 | Laporan Tahunan Eselon 3 |
| | 03 | Laporan Tahunan Perangkat Daerah |
| | 04 | Laporan Khusus |
| | 05 | <i>Progress Report</i> |
| | 06 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |
| 11 | | Evaluasi Program/Kegiatan |
| | 01 | Unit Kerja |

| | | |
|----|---|--|
| | 02 | Lembaga/Instansi |
| 12 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan | |
| 13 | Konsultasi Perencanaan Pembangunan | |
| 14 | Pemantauan, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan | |
| 15 | Perencanaan Pendanaan Pembangunan | |
| | 01 | Pendanaan Luar Negeri dan Hibah |
| | 02 | Pendanaan Dalam Negeri |
| | 03 | Kerja Sama Pembangunan Internasional |
| | 04 | Surat Berharga Syariah Negara |
| | 05 | Pendanaan <i>On Top</i> dan atau Inisiatif Baru |
| | 06 | <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) |
| HB | Perhubungan | |
| | 01 | Kebijakan |
| | 01 | Kebijakan Mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara dan Perkeretaapian |
| | 01 | Pengkajian dan Pengusulan Kegiatan |
| | 02 | Penyiapan Kebijakan |
| | 03 | Perumusan dan Penyusunan Bahan |
| | 04 | Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan |
| | 05 | Penetapan dalam Bentuk NSPK |
| | 02 | Perhubungan Darat |
| | 01 | Jaringan Transportasi Jalan |
| | 01 | Jaringan Prasarana dan Pelayanan (Penentuan dan Penetapan Lokasi Terminal Barang, Terminal Penumpang, Terminal Barang Utama) |
| | 02 | Jaringan Prasarana dan Pelayanan (Jaringan Trayek Angkutan antar Kota, Jaringan Jalan Primer, Jaringan Transportasi Sekunder, Kualifikasi Teknis Petugas Terminal) |
| | 03 | Penetapan Kelas Jalan Primer |
| | 04 | Pengembangan Transportasi Jalan (Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) |
| | 05 | Pengembangan Transportasi Jalan |
| | 02 | Sarana Angkutan Barang |
| | 01 | Pengujian Kendaraan Bermotor (Pengesahan dan |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | | Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor) |
| | | 02 | Pengujian Kendaraan Bermotor (Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor) |
| | | 03 | Teknologi Kendaraan Bermotor (Sertifikasi, Persyaratan Teknis Laik Jalan, dan Harmonisasi dan Standar Regulasi) |
| | | 04 | Teknologi Kendaraan Bermotor (Pelaksana Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor) |
| | | 03 | Lalu Lintas Jalan |
| | | 01 | Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan |
| | | 02 | Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional Baik Tol/Non Tol |
| | | 03 | Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan, Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor |
| | | 04 | Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor |
| | | 05 | Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan |
| | | 06 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan di Jalan Nasional |
| | | 04 | Angkutan Jalan |
| | | 01 | Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi |
| | | 02 | Izin Trayek Angkutan Lintas Batas Negara, Antar Kota Antar Provinsi |
| | | 03 | Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek Lintas Batas Negara dan Antar Kota Antar Provinsi |
| | | 04 | Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum, Pembinaan Angkutan Barang |
| | | 05 | Angkutan Perintis |
| | | 06 | Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum, Pembinaan Angkutan Barang |
| | | 07 | Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Tarif Angkutan Barang |
| | | 08 | Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu |
| | | 05 | Pengendalian Operasi |
| | | 01 | Monitoring Operasional |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 02 | Pedoman Teknis Bimbingan Teknis PPNS |
| | | 03 | Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh PPNS |
| | | 04 | Bimbingan Teknis PPNS, dan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian PPNS |
| | | 06 | Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 01 | Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 02 | Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan (Peta Jaringan, <i>Blueprint</i> Jaringan) |
| | | 03 | Pengembangan SIM Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 07 | Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 01 | Rancang Bangun Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 02 | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 03 | Pengawasan dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 08 | Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 01 | Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 02 | Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyebrangan, Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyebrangan di Lintas Nasional dan Internasional |
| | | 03 | Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 04 | Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 09 | Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 01 | Manajemen Lalu Lintas |
| | | 02 | PPNS Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 03 | Sertifikasi Inspektur Sungai, Danau dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | 04 | Pengukuran Alur Pelayaran Sungai, Danau dan Kolam Pelabuhan Penyebrangan |
| | | 05 | Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau |
| | | 06 | Perambuan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 10 | Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 01 | Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Persetujuan Operasi Kapal Penyebrangan Lintas Nasional dan Internasional |
| | | 02 | Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 03 | Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan |
| | | 11 | Jaringan Transportasi Perkotaan |
| | | 01 | Jaringan Transportasi Perkotaan Berbasis Jalan, Jalan Rel, dan Perairan Daratan |
| | | 02 | Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi |
| | | 03 | Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jaringan Transportasi Perkotaan |
| | | 12 | Lalu Lintas Perkotaan |
| | | 01 | Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan |
| | | 02 | Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan |
| | | 03 | Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah |
| | | 13 | Angkutan Perkotaan |
| | | 01 | Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek |
| | | 02 | Jaringan Trayek Perkotaan |
| | | 03 | Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi |
| | | 14 | Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan |
| | | 01 | Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak Dalam Trayek untuk Angkutan Penumpang/Barang |
| | | 02 | Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan antar Simpul di Kawasan Perkotaan |

| | | | |
|--|----|-----------------------------------|---|
| | | | yang Melebihi Satu Wilayah |
| | | 03 | Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi |
| | 15 | Dampak Transportasi Perkotaan | |
| | | 01 | Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan |
| | | 02 | Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan |
| | | 03 | <i>Masterplan</i> Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan |
| | | 04 | Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Kota |
| | | 05 | Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional Dalam Kawasan Perkotaan |
| | | 06 | <i>Masterplan</i> Transportasi Perkotaan |
| | 16 | Manajemen Keselamatan | |
| | | 01 | Monitoring dan Evaluasi Data Kecelakaan |
| | | 02 | Kualifikasi Unit Pengkajian |
| | | 03 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 04 | Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 05 | Harmonisasi Kebijakan |
| | 17 | Promosi dan Kemitraan Keselamatan | |
| | | 01 | Promosi Keselamatan |
| | | 02 | Penyuluhan, Publikasi dan Diseminasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 03 | Kemitraan Keselamatan Antar Lembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | 18 | Bina Keselamatan Angkutan Umum | |
| | | 01 | Keselamatan Pengusaha Angkutan Umum |
| | | 02 | Keselamatan Awak Kendaraan Angkutan Umum dan Awal Kapal Sungai dan Danau |
| | 19 | Audit dan Inspeksi Keselamatan | |

| | | | |
|--|----|------------------|--|
| | | 01 | Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia |
| | | 02 | Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 03 | Audit Faktor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyebrangan serta Laik Fungsi Jalan |
| | | 04 | Pedoman Keselamatan |
| | | 05 | Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Pelaku Transportasi Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan |
| | | 06 | Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau dan Penyebrangan serta Laik Fungsi Jalan |
| | 03 | Perhubungan Laut | |
| | | 01 | Angkutan Laut Dalam Negeri |
| | | 01 | Jaringan Trayek Berjadwal Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri |
| | | 02 | Penempatan Kapal dan Pemberian Persetujuan Penetapan Dispensasi Syarat Bendera Kapal Asing |
| | | 03 | Trayek Tidak Berjadwal Tetap dan Tidak Teratur (<i>Trample</i>) Angkutan Laut Dalam Negeri |
| | | 04 | Usaha Pelayaran Rakyat |
| | | 02 | Angkutan Laut Luar Negeri |
| | | 01 | Pelayaran Nasional dan Asing yang Menyelenggarakan Angkutan Laut dari Indonesia ke Negara-negara Amerika, Eropa, Afrika dan Sebaliknya |
| | | 02 | Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Multilateral di Bidang Angkutan Laut |
| | | 03 | Persetujuan Penetapan Persyaratan Agen Umum dan Perwakilan Perusahaan Pelayaran Asing |
| | | 04 | Pelayaran Nasional dan Asing yang Menyelenggarakan Angkutan Laut dari Indonesia ke Negara-negara di Asia-Pasifik, Australia dan Sebaliknya |
| | | 05 | Kerja Sama Bilateral, Sub-regional, Regional dan Multilateral di Bidang Angkutan Laut |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 06 | Persetujuan Penetapan Persyaratan Agen Umum dan Perwakilan Perusahaan Pelayaran Asing |
| | | 03 | Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut |
| | | 01 | Operasional Angkutan Laut Khusus Pertambangan dan Lepas Pantai Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar Muat |
| | | 02 | Persetujuan Penetapan Dispensasi Syarat Bendera Kapal Asing Angkutan Laut Khusus yang Beroperasi di Perairan Indonesia |
| | | 03 | Operasional Angkutan Laut Khusus Aneka Industri, Kehutanan, Perikanan |
| | | 04 | Persetujuan Penetapan Dispensasi Syarat Bendera Kapal Asing Angkutan Laut Khusus yang Beroperasi di Perairan Indonesia serta Penunjang Angkutan Laut |
| | | 04 | Pengembangan Usaha Angkutan Laut |
| | | 01 | Pengembangan Armada |
| | | 02 | Analisis Ekonomi Kebutuhan Armada |
| | | 03 | Usaha Angkutan Laut dan Tarif Angkutan Laut |
| | | 04 | Perizinan Penyelenggaraan Usaha Pelayaran antar Provinsi/Internasional |
| | | 05 | Izin Operasi Angkutan Laut Khusus serta Izin Usaha Angkutan Multimoda |
| | | 05 | Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut |
| | | 01 | Pengolahan Data dan Informasi Rencana Kebutuhan Angkutan Laut pada Waktu dan atau Kondisi Tertentu |
| | | 02 | Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Bahan Pokok |
| | | 03 | Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Angkutan Laut pada Waktu dan atau Kondisi Tertentu |
| | | 04 | Evaluasi Angkutan Bahan Pokok untuk Kelancaran Angkutan Laut |
| | | 06 | Pengembangan Pelabuhan |
| | | 01 | Tatanan Kepelabuhanan Nasional |
| | | 02 | Pengumpulan dan Evaluasi Data dan Informasi Kepelabuhanan |
| | | 03 | Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan |
| | | 04 | Penyusunan Laporan Direktorat |
| | | 05 | Rencana Induk dan Pengembangan Pelabuhan |

| | | |
|--|----|---|
| | 07 | Perancangan Fasilitas Pelabuhan |
| | 01 | Perancangan Teknis Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan |
| | 02 | Survei Topografi dan Hidro-oceanografi dan Geoteknik |
| | 03 | Persetujuan Desain, Pembangunan Fasilitas, dan Peralatan Pelabuhan |
| | 04 | Pembangunan dan Perawatan Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan |
| | 05 | Sertifikasi Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan |
| | 08 | Pengerukan dan Reklamasi |
| | 01 | Perancangan dan Survei Teknis Pelaksanaan Pengerukan dan Reklamasi |
| | 02 | Perizinan |
| | 03 | Penggunaan Kapan dan Alat Bantu Keruk |
| | 04 | Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi |
| | 09 | Pemanduan dan Penundaan Kapal |
| | 01 | Penetapan Wilayah Perairan Pandu |
| | 02 | Standar Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal |
| | 03 | Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pandu |
| | 04 | Standarisasi Sarana Bantu Pemanduan |
| | 10 | Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan |
| | 01 | Tarif Jasa Kepelabuhanan |
| | 02 | Kinerja Pelayanan Pelabuhan dan Penetapan Pelabuhan Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri |
| | 03 | Penetapan Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Penting |
| | 04 | Penggunaan Atas Tanah dan Perairan |
| | 05 | Kerja Sama Pelabuhan |
| | 06 | Persetujuan Pengoperasian Pelabuhan |
| | 11 | Kelaikan Kapal |
| | 01 | Konstruksi dan Stabilitas Kapal |
| | 02 | Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal |
| | 12 | Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal |
| | 01 | Pengukuran Kapal |
| | 02 | Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal |
| | 13 | Nautis, Teknis dan Radio Kapal |
| | 01 | Penilikan Keselamatan Kapal |
| | 02 | Sertifikasi Keselamatan Kapal |

| | | |
|--|----|--|
| | 14 | Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal |
| | 01 | Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran |
| | 02 | Manajemen Keselamatan Kapal |
| | 15 | Kepelautan |
| | 01 | Pengawakan dan Perlindungan Awal Kapal |
| | 02 | Standarisasi dan Sertifikasi Pelaut |
| | 16 | Perambuan |
| | 01 | Perijinan Izin Spesifikasi Teknis Sarana Bantu Navigasi Pelayaran |
| | 02 | Pengamatan Laut dan Survei Alur Pelayaran |
| | 03 | Penandaan Daerah Terbatas dan Terlarang |
| | 04 | Daerah <i>Ship to Ship</i> |
| | 05 | Maklumat Pelayaran Bahaya Navigasi |
| | 06 | Desain Sistem Rute dan Tata Cara Berlalu Lintas |
| | 07 | Peralatan |
| | 08 | Perencanaan Pembangunan |
| | 09 | <i>Replacement</i> |
| | 10 | Perbaikan dan Pemeliharaan |
| | 11 | Gambar Desain Konstruksi |
| | 12 | Kelainan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Koreksi Peta Laut |
| | 17 | Telekomunikasi Pelayaran |
| | 01 | Penyusunan Kinerja Stasiun Radio Pantai |
| | 02 | Stasiun Radio Kapal dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Elektronika |
| | 03 | Pemberian Rekomendasi Izin Radio Telekomunikasi Pelayaran |
| | 04 | Izin Identifikasi untuk Dinas Bergerak Pelayaran |
| | 05 | Izin Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Pelayaran |
| | 06 | Perencanaan Bangunan Gedung |
| | 07 | Sistem Jaringan |
| | 08 | Peralatan dan Suku Cadang |
| | 09 | Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Telekomunikasi Pelayaran |
| | 10 | Penilaian Teknis |
| | 18 | Kapal Negara Kenavigasian |
| | 01 | Pengoperasian, Pengawakan dan Perbekalan Kapal |

| | | | |
|--|----|--|---|
| | | 02 | Formasi dan Penempatan Kapal Negara Kenavigasian |
| | | 03 | Rancang Bangun dan Pembangunan Kapal |
| | | 04 | Pemeliharaan dan Penilaian Teknis Penghapusan Kapal |
| | | 05 | Perlengkapan dan Suku Cadang Kapal Negara Kenavigasian |
| | 19 | Pangkalan Kenavigasian | |
| | | 01 | Pemeliharaan Bangunan Gedung |
| | | 02 | Lokasi Pembangunan dan Fasilitas Pangkalan |
| | | 03 | Penilaian Teknis Fasilitas Pangkalan |
| | | 04 | Rencana Kebutuhan Peralatan Suku Cadang Bengkel |
| | | 05 | Pemeliharaan, Perbaikan dan Penilaian Teknis |
| | | 06 | Peralatan Galangan dan Bengkel |
| | 20 | Sarana dan Prasarana | |
| | | 01 | Penyusunan Rencana dan Program Kerja |
| | | 02 | Penyusunan Rencana Anggaran Sarana dan Prasarana Kenavigasian |
| | | 03 | Pelaporan Pelaksanaan Rencana dan Program Kerja |
| | | 04 | Pelaporan Pelaksanaan Anggaran dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kenavigasian |
| | 21 | Patroli dan Pengamanan | |
| | | 01 | Patroli |
| | | 02 | Penanganan Perompakan dan Pembajakan |
| | | 03 | Sistem Pelaporan Kapal (<i>Ship Reporting System</i>) |
| | | 04 | Analisa Kerawanan Wilayah |
| | | 05 | Penegakkan Peraturan Perundang-undangan di Laut, Pantai dan Pelabuhan |
| | | 06 | Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Patroli |
| | | 07 | Pengamanan Sarana dan Prasarana Transportasi (ISPS Code) di Laut, Pantai, dan Pelabuhan |
| | | 08 | Perizinan Penggunaan, Pendistribusian Amunisi dan Senjata Api |
| | | 09 | Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Pengamanan |
| | 22 | Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil | |
| | | 01 | Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran |
| | | 02 | Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Advokasi dan |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | | Diseminasi |
| | | 03 | Penyelidikan, Penyidikan, dan serta Pengajuan Berkas Perkara Pelanggaran dan Tindak Pidana Pelayaran |
| | | 04 | Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| | | 23 | Tertib Pelayaran |
| | | 01 | Pengawasan Penanganan Muatan Berbahaya |
| | | 02 | Tertib Lalu Lintas Kapal dan Tertib Bandar |
| | | 03 | Izin Berlayar |
| | | 04 | Pengawasan Kapal Asing |
| | | 05 | Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Kesyahbandaran |
| | | 06 | <i>Port State Control Officer</i> |
| | | 07 | Pengusutan Kecelakaan dan Bencana Kapal |
| | | 08 | Pengajuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Pelayaran dan Pelaporan ke <i>International Maritime Organization</i> |
| | | 09 | Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Penanganan Pemrosesan Kecelakaan Kapal |
| | | 24 | Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air |
| | | 01 | <i>Search and Rescue</i> |
| | | 02 | Penanggulangan Pencemaran |
| | | 03 | Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran, Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas <i>Search and Rescue</i> , Pemadam Kebakaran |
| | | 04 | Pendirian Perusahaan dan Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Perairan |
| | | 05 | Kegiatan Penyelaman |
| | | 06 | Penanganan Kerangka Kapal dan <i>Salvage</i> |
| | | 07 | Penetapan Kualifikasi Teknis Petugas Penyelam |
| | | 25 | Sarana dan Prasarana |
| | | 01 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai |
| | | 02 | Pemeliharaan Senjata Api |
| | | 03 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Petugas di Bidang Awak Kapal Penjagaan Laut dan Pantai |
| | | 04 | Penyiapan Rencana, Program Kerja dan Laporan |

| | | | |
|--|----|-------------------|--|
| | | | Direktorat |
| | 04 | Perhubungan Udara | |
| | | 01 | Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara |
| | | 01 | Sistem, Rute, Jaringan Penerbangan |
| | | 02 | Kapasitas Angkutan Udara |
| | | 03 | Angkutan Multimoda |
| | | 04 | Logistik dan <i>National Single Window</i> (NSW) |
| | | 05 | Pelayanan Penunjang Angkutan Udara |
| | | 06 | <i>On Time Performance</i> Perusahaan Angkutan Udara |
| | | 07 | Pelayanan Pengangkutan Kargo |
| | | 08 | Angkutan Multimoda dan Logistik |
| | | 09 | Rangking Peningkatan Kinerja Pelayanan Angkutan Udara |
| | | 02 | Angkutan Udara Niaga Berjadwal |
| | | 01 | Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri |
| | | 02 | Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri |
| | | 03 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga |
| | | 01 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Dalam Negeri |
| | | 02 | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga Luar Negeri |
| | | 04 | Kerja Sama Angkutan Udara |
| | | 01 | Pemberian Persetujuan Kerja Sama Bilateral di Bidang Angkutan Udara dan Kerja Sama Perusahaan Angkutan Udara |
| | | 02 | Pengawasan dan Penegakan Hukum |
| | | 03 | Perjanjian dan Kerja Sama Multilateral dan Lembaga Internasional di Bidang Angkutan Udara |
| | | 04 | Koordinasi dan Pertemuan dengan Instansi Terkait untuk Fasilitasi Pelayanan Angkutan Udara Internasional |
| | | 05 | Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara |
| | | 01 | Bimbingan Usaha Angkutan Udara |
| | | 02 | Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara |
| | | 06 | Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan |
| | | 01 | Pemberian Izin dan/atau Persetujuan dan/atau Rekomendasi di Bidang Tata Bandar Udara |
| | | 02 | Pengawasan dan Penegakan Hukum |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 03 | Pemberian Izin dan/atau Persetujuan dan/atau Rekomendasi di Bidang Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara |
| | | 04 | Pengawasan dan Penegakan Hukum |
| | | 07 | Prasarana Bandar Udara |
| | | 01 | Pengawasan dan Penegakan Hukum |
| | | 02 | Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara |
| | | 03 | Pemberian Izin dan/atau Sertifikasi di Bidang Verifikasi Prasarana Bandar Udara |
| | | 04 | Pengawasan dan Penegakan Hukum |
| | | 08 | Peralatan dan Utilitas Bandar Udara |
| | | 01 | Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara |
| | | 02 | Pemberian Sertifikasi dan/atau Perizinan di Bidang Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara |
| | | 03 | Pengawasan dan Penegakan Hukum |
| | | 09 | Personel dan Operasi Bandar Udara |
| | | 01 | Pemberian Lisensi/Validasi dan/atau Sertifikasi/Register di Bidang Sertifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara |
| | | 02 | Pengawasan Personel dan Operasi Bandar Udara |
| | | 10 | Penyelenggaraan Bandar Udara |
| | | 01 | Pemberian Izin di Bidang Kerja Sama Penyelenggaraan Bandar Udara |
| | | 02 | Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan |
| | | 03 | Verifikasi Penyelenggaraan Bandar Udara |
| | | 04 | Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan |
| | | 11 | Standarisasi, Kerja Sama dan Program Keamanan Penerbangan |
| | | 01 | Pemberian Persetujuan di Bidang Standarisasi Keamanan Penerbangan |
| | | 02 | Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya dan Pelayanan Darurat |
| | | 03 | Pemberian Izin dan/atau Persetujuan di Bidang Keamanan Penerbangan |
| | | 04 | Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Contingency Plan</i>) |
| | | 12 | Pelayanan Darurat |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 01 | Pemberian Sertifikasi di Bidang Personel PKP-PK dan <i>Salvage</i> |
| | | 02 | Pemberian Lisensi dan Persetujuan di Bidang Personel PKP-PK dan <i>Salvage</i> |
| | | 03 | Pemberian Sertifikasi di Bidang Fasilitas Pelayanan Darurat |
| | 13 | | Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan |
| | | 01 | Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| | | 02 | Personel Keamanan Penerbangan |
| | 14 | | Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang Berbahaya |
| | | 01 | Pemberian Sertifikasi di Bidang Fasilitas Keamanan Penerbangan |
| | | 02 | Pengendalian di Bidang Fasilitas Keamanan Penerbangan |
| | | 03 | Pemberian Lisensi di Bidang Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya |
| | 15 | | Standarisasi |
| | | 01 | <i>Regulated Agent</i> |
| | | 02 | Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KP dan DG |
| | | 03 | Kerja Sama Luar Negeri |
| | | 04 | Pas Bandara |
| | | 05 | ICAO, JICA, CASP, <i>Air Marshall</i> |
| | | 06 | Undangan |
| | 16 | | Kendali Mutu Keamanan Penerbangan |
| | | 01 | Kendali Mutu Keamanan Bandar Udara, Pengangkutan Barang berbahaya dan Pelayanan Darurat |
| | | 02 | Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum |
| | | 03 | Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara, Pengangkutan Barang berbahaya dan Pelayanan Darurat |
| | | 04 | Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum |
| | 17 | | Manajemen Lalu Lintas Penerbangan |
| | | 01 | Manajemen Ruang Udara |
| | | 02 | Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan |
| | 18 | | Manajemen Informasi Aeronautika |

| | | | |
|--|----|---|--|
| | | 01 | Kartografi Penerbangan |
| | | 02 | Publikasi Informasi Aeronautika |
| | 19 | Komunikasi Penerbangan | |
| | | 01 | Operasi Komunikasi Penerbangan |
| | | 02 | Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan |
| | 20 | Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan | |
| | | 01 | Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan |
| | | 02 | Fasilitas Pengamatan Penerbangan |
| | 21 | Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan | |
| | | 01 | Standarisasi Navigasi Penerbangan |
| | | 02 | Sertifikasi Navigasi Penerbangan |
| | 22 | Standarisasi | |
| | | 01 | Pemberian Program di Bidang Standarisasi Teknik |
| | | 02 | Program Pencegahan Insiden dan Kecelakaan |
| | | 03 | Pengawasan dan Penegakan Hukum |
| | | 04 | Pemberian Sertifikasi di Bidang Standarisasi Operasi Penerbangan |
| | | 05 | Pengawasan dan Penegakan Hukum |
| | 23 | Rekayasa | |
| | | 01 | Pengawasan Proses Rekayasa |
| | | 02 | Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara |
| | 24 | Produk Aeronautika | |
| | | 01 | Pengawasan Mutu dan Proses Produksi |
| | | 02 | Pengesahan Produk |
| | 25 | Operasi Pesawat Udara | |
| | | 01 | Pengawasan Operasi Pesawat Udara |
| | | 02 | Personel Operasi Pesawat Udara |
| | 26 | Perawatan | |
| | | 01 | Perawatan Pesawat Udara |
| | | 02 | Personel Teknik Perawatan |
| | 05 | Perkeretaapian | |
| | | 01 | Jaringan |
| | | 01 | Penataan Jaringan |
| | | 02 | Pengembangan Jaringan |
| | | 02 | Lalu Lintas |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 01 | Lalu Lintas Antar Kota |
| | | 02 | Lalu Lintas Perkotaan |
| | | 03 | Angkutan |
| | | 01 | Angkutan Antar Kota |
| | | 02 | Angkutan Perkotaan |
| | | 04 | Investasi |
| | | 01 | Penyelenggaraan Kerja Sama |
| | | 02 | Pengembangan Usaha |
| | | 05 | Jalur dan Bangunan Kereta Api |
| | | 01 | Pembangunan, Perawatan dan Pengusahaan Jalan Rel dan Tanah Kereta Api, Perhitungan Biaya Perawatan, Pengoperasian dan Pengusahaan Jalan Rel dan Tanah Kereta Api |
| | | 02 | Penetapan Rancang Bangun |
| | | 03 | Penempatan dan/atau Penyimpanan Peralatan Suku Cadang Jalan Rel |
| | | 04 | Pengesahan Kualitas Material Baru Jalan Rel |
| | | 05 | Akreditasi Pelaksana Jasa Konsultan serta Konstruksi |
| | | 06 | Pembangunan, Perawatan dan Pengusahaan Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Perhitungan Biaya Perawatan, Pengoperasian dan Pengusahaan Jalan Rel |
| | | 07 | Tanah Kereta Api |
| | | 08 | Penetapan Rancang Bangun |
| | | 09 | Penempatan dan/atau Penyimpanan Peralatan Suku Cadang Jalan Rel |
| | | 10 | Pengesahan Kualitas Material Baru Jalan Rel |
| | | 11 | Akreditasi Pelaksana Jasa Konsultasi serta Konstruksi |
| | | 06 | Fasilitas Operasi Kereta Api |
| | | 01 | Pembangunan, Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan Persinyalan |
| | | 02 | Pelistrikan, Perhitungan dan Perawatan, Pengoperasian dan Pengusahaan Telekomunikasi |
| | | 03 | Penetapan Rancang Bangun |
| | | 04 | Penempatan dan/atau Penyimpanan Peralatan Suku Cadang Komunikasi dan Pelistrikan |
| | | 05 | Pengesahan Kualitas Material Baru Telekomunikasi dan Pelistrikan |

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 06 | Akreditasi Pelaksana Jasa Konsultan serta Konstruksi Telekomunikasi dan Pelistrikan |
| | | 07 | Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api |
| | | 01 | Pengujian Pertama Jalur dan Bangunan serta Stasiun Kereta Api |
| | | 02 | Pengesahan Hasil Uji |
| | | 03 | Pengesahan Kualitas Material untuk Jalur dan Bangunan serta Stasiun Kereta Api yang Digunakan dalam Pengujian Jalur dan Bangunan Kereta Api dan Stasiun Kereta Api |
| | | 04 | Penyusunan Kebutuhan Suku Cadang dan Komponen Peralatan Pengujian Jalur dan Bangunan Kereta Api serta Stasiun Kereta Api |
| | | 05 | Pengusahaan Fasilitas Peralatan Pengujian Jalur dan Bangunan Kereta Api serta Stasiun Kereta Api |
| | | 06 | Penyiapan Kebutuhan atau Pemberdayaan Kembali Suku Cadang Fasilitas Pengujian Jalur dan Bangunan Kereta Api serta Stasiun Kereta Api |
| | | 08 | Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api |
| | | 01 | Pemeliharaan, Pemeriksaan dan Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api |
| | | 02 | Pengesahan Hasil Uji |
| | | 03 | Pengesahan Kualitas Material untuk Fasilitas Operasi Kereta Api |
| | | 04 | Penyusunan Kebutuhan Suku Cadang dan Komponen Peralatan Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api |
| | | 05 | Pengusahaan Fasilitas Peralatan Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api |
| | | 06 | Penyiapan Kebutuhan atau Pemberdayaan Kembali Suku Cadang Fasilitas Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api |
| | | 09 | Pengembangan Sarana |
| | | 01 | Rancangan Bangun dan Rekayasa |
| | | 02 | Pengendalian Mutu |
| | | 10 | Pengawasan Sarana |
| | | 01 | Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan Sarana |

| | | | |
|----|---------------|----------------------------|--|
| | | 02 | Pelaksanaan Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan Sarana |
| | | 03 | Data Base dan Pengembangan Sistem Informasi |
| | | 04 | Penyusunan Standar Peralatan dan Fasilitas Pendukung di Balai Yasa, Depo, dan Tempat Pengujian |
| | | 05 | Data Base dan Sistem Informasi Bidang Fasilitas Saran Perkeretaapian |
| | | 11 | Pengelolaan Sarana Milik Negara |
| | | 01 | Pengoperasian Sarana Milik Negara |
| | | 02 | Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana Milik Negara |
| | | 03 | Data Base dan Pengembangan Sistem Informasi Sarana Milik Negara |
| | | 04 | Pemeliharaan Sarana Milik Negara |
| | | 05 | Data Base dan Pengembangan Sistem Informasi Sarana Milik Negara |
| | | 12 | Pengujian dan Sertifikasi Sarna Wilayah I |
| | | 01 | Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penggerak |
| | | 02 | Pengujian dan Sertifikasi Sarana Tanpa Penggerak |
| | | 13 | Audit dan Peningkatan Keselamatan |
| | | 01 | Audit Keselamatan |
| | | 02 | Peningkatan Keselamatan |
| | | 14 | Analisis dan Penanganan Kecelakaan |
| | | 01 | Analisis Kecelakaan |
| | | 02 | Penanganan Kecelakaan |
| | | 15 | Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi SDM |
| | | 01 | Akreditasi Kelembagaan |
| | | 02 | Sertifikasi Sumber Daya Manusia |
| | | 16 | Penegakan Hukum |
| | | 01 | Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil |
| PI | Perindustrian | | |
| | 01 | Iklim Usaha dan Kerja Sama | |
| | 01 | Industri Manufaktur | |
| | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) |
| | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik Dasar, dan Dasar Lainnya) |
| | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Kimia Organik, |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | | dan Kimia Hilir Lainnya) |
| | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya, Alas Kaki, Kulit dan Aneka) |
| | | 02 | Industri Agro |
| | | 01 | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan |
| | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan |
| | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau |
| | | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |
| | | 01 | Alat Transportasi Darat |
| | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan |
| | | 04 | Industri Kecil dan Menengah |
| | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan |
| | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang |
| | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika |
| | 02 | | Promosi Industri |
| | | 01 | Industri Manufaktur |
| | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) |
| | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik Dasar, dan Dasar Lainnya) |
| | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Kimia Organik, dan Kimia Hilir Lainnya) |
| | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya, Alas Kaki, Kulit dan Aneka) |
| | | 02 | Industri Agro |
| | | 01 | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan |
| | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan |
| | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau |
| | | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |
| | | 01 | Alat Transportasi Darat |
| | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan |
| | | 04 | Industri Kecil dan Menengah |
| | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan |
| | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang |

| | | | |
|--|----|------------------------------|---|
| | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika |
| | 03 | Standarisasi dan Teknologi | |
| | | 01 | Industri Manufaktur |
| | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) |
| | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik Dasar, dan Dasar Lainnya) |
| | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Kimia Organik, dan Kimia Hilir Lainnya) |
| | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya, Alas Kaki, Kulit dan Aneka) |
| | | 02 | Industri Agro |
| | | 01 | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan |
| | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan |
| | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau |
| | | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |
| | | 01 | Alat Transportasi Darat |
| | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan |
| | | 04 | Industri Kecil dan Menengah |
| | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan |
| | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang |
| | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika |
| | 04 | Hak dan Kekayaan Intelektual | |
| | | 01 | Industri Manufaktur |
| | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) |
| | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik Dasar, dan Dasar Lainnya) |
| | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Kimia Organik, dan Kimia Hilir Lainnya) |
| | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya, Alas Kaki, Kulit dan Aneka) |
| | | 02 | Industri Agro |
| | | 01 | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan |

| | | | |
|--|----|---|---|
| | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan |
| | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau |
| | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | |
| | | 01 | Alat Transportasi Darat |
| | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan |
| | 04 | Industri Kecil dan Menengah | |
| | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan |
| | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang |
| | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika |
| | 05 | Industri Hijau | |
| | | 01 | Industri Manufaktur |
| | | 01 | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) |
| | | 02 | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik Dasar, dan Dasar Lainnya) |
| | | 03 | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Kimia Organik, dan Kimia Hilir Lainnya) |
| | | 04 | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya, Alas Kaki, Kulit dan Aneka) |
| | | 02 | Industri Agro |
| | | 01 | Industri Hasil Hutan dan Perkebunan |
| | | 02 | Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan |
| | | 03 | Industri Minuman dan Tembakau |
| | 03 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi | |
| | | 01 | Alat Transportasi Darat |
| | | 02 | Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan |
| | 04 | Industri Kecil dan Menengah | |
| | | 01 | Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan |
| | | 02 | Industri Kerajinan dan Sandang |
| | | 03 | Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika |
| | 06 | Analisis Industri Unggulan Daerah Kota | |
| | | 01 | Kerja Sama Industri Unggulan Daerah Kota |
| | | 01 | Kerja Sama Industri Unggulan Daerah Kota Wilayah Industri I |
| | | 02 | Kerja Sama Industri Unggulan Daerah Kota Wilayah |

| | | | |
|--|----|--|---|
| | | | Industri II |
| | | 03 | Kerja Sama Industri Unggulan Daerah Kota Wilayah Industri III |
| | 07 | Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri | |
| | | 01 | Kerja Sama Industri Unggulan Daerah Kota |
| | | 01 | Kerja Sama Industri Unggulan Daerah Kota Wilayah Industri I |
| | | 02 | Kerja Sama Industri Unggulan Daerah Kota Wilayah Industri II |
| | | 03 | Kerja Sama Industri Unggulan Daerah Kota Wilayah Industri III |
| | 08 | Pengembangan Infrastruktur Pendukung | |
| | | 01 | Kawasan Industri Wilayah Industri I |
| | | 02 | Kawasan Industri Wilayah Industri II |
| | | 03 | Kawasan Industri Wilayah Industri III |
| | 09 | Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri | |
| | | 01 | Kawasan Industri Wilayah Industri I |
| | | 02 | Kawasan Industri Wilayah Industri II |
| | | 03 | Kawasan Industri Wilayah Industri III |
| | 10 | Kerja Sama Industri Internasional | |
| | | 01 | Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Fora Multilateral) |
| | | 01 | Akses Industri Wilayah Amerika |
| | | 02 | Akses Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah |
| | | 03 | Kerja Sama Teknik dan Promosi Wilayah Amerika |
| | | 04 | Kerja Sama Teknik dan Promosi Wilayah Eropa dan Timur Tengah |
| | | 05 | Kerja Sama Multilateral dengan WTO dan Organisasi Komoditas |
| | | 06 | Fora Multilateral Lainnya |
| | | 02 | Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional |
| | | 01 | Akses Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia |
| | | 02 | Akses Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika |
| | | 03 | Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | | Timur, Pasifik dan Australia |
| | | 04 | Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika |
| | | 05 | Kerja Sama Regional APEC dan Regional Lainnya |
| | | 06 | Kerja Sama Regional ASEAN dan Mitra Dialog |
| | | 03 | Ketahanan Industri |
| | | 01 | Penanganan Hambatan Industri Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Fora Multilateral) |
| | | 02 | Penanganan Hambatan Industri Wilayah II (Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Multilateral) |
| | | 03 | Pengamanan Basis Industri Manufaktur |
| | | 04 | Pengamanan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |
| | | 05 | Pengamanan Industri Agro |
| | | 06 | Pengamanan Industri Kecil dan Menengah |
| | 11 | | Standarisasi |
| | | 01 | Standar |
| | | 01 | Standar Industri Manufaktur |
| | | 02 | Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi |
| | | 02 | Penyiapan Penerapan |
| | | 01 | Penyiapan Penerapan Standar |
| | | 02 | Kerja Sama Standarisasi |
| | | 03 | Infrastruktur Standar |
| | | 01 | Pengembangan Infrastruktur Standar |
| | | 02 | Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian |
| | 12 | | Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri |
| | | 01 | Kebijakan Industri |
| | | 01 | Kebijakan Sektoral |
| | | 02 | Kebijakan Kewilayahan |
| | | 02 | Perpajakan dan Tarif |
| | | 01 | Perpajakan dan Tarif |
| | | 02 | Tarif dan Non Tarif |
| | | 03 | Pengembangan Model Industrial |
| | | 01 | Pemrograman Model |
| | | 02 | Aplikasi Model |

| | | | |
|----|--------------|--|---|
| | 13 | Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup | |
| | | 01 | Industri Hijau |
| | | | 01 Pengembangan Industri Hijau |
| | | | 02 Kerja Sama Industri Hijau |
| | | 02 | Lingkungan Hidup |
| | | | 01 Lingkungan Global |
| | | | 02 Pengendalian Lingkungan Hidup |
| | | 03 | Energi |
| | | | 01 Konservasi Energi |
| | | | 02 Diversifikasi Energi |
| | 14 | Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual | |
| | | 01 | Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri |
| | | | 01 Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri |
| | | | 02 Penerapan Kebijakan Teknologi Industri |
| | | 02 | Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri |
| | | | 01 Pengkajian Inovasi Teknologi Industri |
| | | | 02 Pengkajian Inovasi Teknologi Industri |
| | | 03 | Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | 01 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | 02 Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual |
| PS | Perpustakaan | | |
| | | 01 | Deposit Bahan Pustaka |
| | | | 01 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam |
| | | | 02 Penangkalan Data Penerbitan dan Pengusaha Rekaman |
| | | | 03 Terbitan Badan Internasional dan Regional |
| | | 04 | Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam |
| | | 05 | Bibliografi dan Katalog |
| | | | 01 Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) |
| | | | 02 Katalog Induk Nasional (KIN) |
| | | | 03 Katalog Dalam Terbitan (KDT) |
| | | 06 | Pendaftaran <i>International Standard Book Number</i> (ISBN) |
| | | 07 | Pendaftaran <i>Internasional Standard Music Number</i> (ISMN) |
| | | 02 | Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka |
| | | | 01 Akuisisi |
| | | | 01 Pembelian |
| | | | 02 Hibah |

| | | | |
|--|----|---------------------------------|---|
| | | 03 | Hadiah |
| | | 04 | Tukar Menukar |
| | | 05 | Implementasi Undang-undang KCKR |
| | | 06 | Terbitan Internal |
| | | 07 | Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus |
| | | 08 | Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk) |
| | | 02 | Pengolahan Bahan Pustaka |
| | | 03 | Pangkalan Data Katalog Koleksi |
| | | 04 | Kajian Pengembangan Bahan Perpustakaan |
| | | 05 | Pedoman Pengolahan Bahan Perpustakaan |
| | 03 | Jasa Perpustakaan dan Informasi | |
| | | 01 | Keanggotaan |
| | | 02 | Sirkulasi |
| | | 03 | Referensi |
| | | 04 | Alih Aksara, Alih Bahasa, dan Kajian Naskah Nusantara |
| | | 05 | Kerja Sama Perpustakaan |
| | | 01 | MoU |
| | | 02 | Perjanjian Kerja Sama |
| | | 03 | Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Internasional |
| | | 06 | Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan |
| | | 01 | Pengembangan Situs <i>Web</i> |
| | | 02 | Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia |
| | | 03 | Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan |
| | | 04 | Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital |
| | | 05 | Pangkalan Data Layanan Perpustakaan |
| | 04 | Preservasi | |
| | | 01 | Konservasi |
| | | 01 | Perawatan Bahan Pustaka |
| | | 02 | Perbaikan Bahan Pustaka |
| | | 03 | Penjilidan Bahan Pustaka |
| | | 02 | Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) |
| | | 03 | Kurasi Digital |
| | 05 | Sumber Daya Perpustakaan | |
| | | 01 | Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca |
| | | 01 | Perpustakaan Umum |

| | | | |
|--|----|-----------------------------|---|
| | | 02 | Perpustakaan Khusus |
| | | 03 | Perpustakaan Sekolah |
| | | 04 | Perpustakaan Perguruan Tinggi |
| | 02 | Pembakuan Perpustakaan | |
| | | 01 | Standar Nasional Perpustakaan Umum |
| | | 02 | Standar Nasional Perpustakaan Khusus |
| | | 03 | Standar Nasional Perpustakaan Sekolah |
| | | 04 | Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi |
| | | 05 | Pedoman Perpustakaan Umum |
| | | 06 | Pedoman Perpustakaan Khusus |
| | | 07 | Pedoman Perpustakaan Sekolah |
| | | 08 | Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi |
| | 03 | Akreditasi Perpustakaan | |
| | | 01 | Permintaan Akreditasi |
| | | 02 | Pemberian Akreditasi |
| | | 03 | Pangkalan Data Perpustakaan yang Diakreditasi |
| | 04 | Pangkalan Data Perpustakaan | |
| | | 01 | Nomor Pokok Perpustakaan |
| | | 02 | Perpustakaan Berbasis Wilayah |
| | 05 | Pengkajian Perpustakaan | |
| | 06 | Pemasyarakatan Minat Baca | |
| | | 01 | Pedoman Pembudayaan Minat Baca |
| | | 02 | Kajian Pembudayaan Minat Baca |
| | | 03 | Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca |
| | 07 | Organisasi Perpustakaan | |
| | | 01 | Forum Perpustakaan Umum |
| | | 02 | Forum Perpustakaan Khusus |
| | | 03 | Forum Perpustakaan Sekolah |
| | | 04 | Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi |
| | | 05 | Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca |
| | | 06 | Organisasi Perpustakaan Lainnya |
| | 06 | Pendidikan dan Pelatihan | |
| | | 01 | Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan |
| | | 01 | Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan |
| | | 02 | Sistem dan Metode |
| | | 03 | Kurikulum/Silabus/Bahan Ajar/Modul |
| | | 04 | Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |

| | | | |
|----|------------|---------------------------------------|--|
| | | 05 | Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan |
| | | 02 | Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan |
| | | 01 | Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil |
| | | 02 | Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli |
| | | 03 | Teknis Pimpinan Lembaga Perpustakaan |
| | | 04 | Teknis Pustakawan/Pengelola Perpustakaan |
| | | 05 | Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan |
| | 07 | Pengembangan Pustakawan | |
| | | 01 | Sertifikasi Tenaga Perpustakaan |
| | | 02 | Pembinaan Tenaga Perpustakaan |
| | | 03 | Penerbitan Jurnal |
| | | 04 | Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan |
| | | 01 | Tim Penilai Instansi (Perpustakaan Nasional) |
| | | 02 | Tim Penilai Pusat |
| | | 05 | Pemasyarakatan |
| | | 06 | Evaluasi Tenaga Perpustakaan |
| | | 07 | Pangkalan Data Tenaga Perpustakaan |
| | | 08 | Pangkalan Data Tim Penilai Pustakawan |
| SN | Persandian | | |
| | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Persandian | |
| | | 01 | Sumber Daya Manusia |
| | | 01 | Data Personil Sandi |
| | | 02 | Pembinaan Personil Sandi |
| | | 03 | Pengawasan dan Pengendalian |
| | | 02 | Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi |
| | | 01 | Data Materiil dan JKS |
| | | 02 | Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi |
| | | 03 | Akreditasi dan Sertifikasi |
| | | 01 | Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan |
| | | 02 | Sertifikasi Alat |
| | 02 | Pengamanan Persandian | |
| | | 01 | Pengamanan Sinyal Teknik Sandi dan Kripto |
| | | 01 | Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) |
| | | 02 | Pelaporan |
| | | 02 | Analisis Sinyal Teknik Sandi dan Kripto |

| | | | |
|----|-----------|--|--|
| | | 01 | Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) |
| | | 02 | Pelaporan |
| | | 03 | Materiil Sandi Sistem dan Peralatan |
| | | 01 | Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi) |
| | | 02 | Pelaporan |
| | 03 | Pengkajian Persandian Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi | |
| | | 01 | Perencanaan Pengkajian |
| | | 02 | Administrasi Pengkajian |
| | | 03 | Pelaksanaan |
| | | 04 | Pelaporan |
| IK | Perikanan | | |
| | 01 | Taat Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil | |
| | | 01 | Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi (Rencana Tata Ruang laut Nasional, Rencana Tata Ruang Laut Lintas Wilayah dan Perairan) |
| | | 02 | Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I Jawa, Sumatra, dan Leuser Sunda |
| | | 03 | Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II (Kalimantan dan Maluku, Zona Wilayah Sulawesi dan Papua) |
| | | 04 | Informasi dan Evaluasi Spasial |
| | 02 | Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan | |
| | | 01 | Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi |
| | | 02 | Konservasi Kawasan (Perancangan Konservasi Kawasan, Pelindungan dan Pelestarian Kawasan) |
| | | 03 | Konservasi Jenis Ikan (Perancangan Konservasi Jenis Ikan, Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan) |
| | | 04 | Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan (Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jenis Ikan) |
| | 03 | Pesisir dan Lautan | |
| | | 01 | Mitigasi Bencana Lingkungan (Mitigasi Bencana Pesisir dan Lautan, Adaptasi Dampak Perubahan Iklim) |
| | | 02 | Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan (Benda Muatan Kapal Tenggelam, Jasa Kelautan) |
| | | 03 | Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut (Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir, Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Laut) |

| | | |
|----|----|---|
| | 04 | Rehabilitasi dan Reklamasi |
| | 01 | Identifikasi Pulau-pulau Kecil |
| | 02 | Pengelolaan Ekosistem Pulau-pulau Kecil (Rehabilitasi, Mitigasi dan Adaptasi) |
| | 03 | Investasi dan Promosi Pulau-pulau Kecil |
| | 04 | Sarana dan Prasarana Pulau-pulau Kecil |
| 04 | | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha |
| | 01 | Akses Permodalan (Akses Perbankan, Akses Non Bank) |
| | 02 | Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Identifikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) |
| | 03 | Sosial Budaya Masyarakat (Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat) |
| | 04 | Pengembangan Usaha (Pelayanan Usaha, Usaha Mikro) |
| 05 | | Pengembangan Sumber Daya Perikanan |
| | 01 | Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat (Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat I, Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat II) |
| | 02 | Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur (Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur I dan II) |
| | 03 | Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran (Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Wilayah Barat, Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Wilayah Timur) |
| | 04 | Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Barat dan Wilayah Timur |
| 06 | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan |
| | 01 | Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi |
| | 02 | Pengawasan Pencemaran Perairan (Pengawasan Pencemaran Pesisir Laut dan Pesisir Pantai, Pengawasan Pencemaran Perairan Umum dan Pedalaman) |
| | 03 | Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
| | 04 | Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati |
| 07 | | Kapal Pengawas |
| | 01 | Logistik dan Operasional Wilayah Barat |

| | | |
|----|----|--|
| | 02 | Logistik dan Operasional Wilayah Timur |
| | 03 | Perawatan Kapal Pengawas (Wilayah Barat dan Timur) |
| | 04 | Pengawakan Kapas Pengawas (Wilayah Barat dan Timur) |
| 08 | | Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur |
| | 01 | Sistem Pemantauan (Pengembangan Sistem Pemantauan, Kerja Sama Pemantauan) |
| | 02 | Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan (Operasional Sistem Pemantauan Pemanfaatan Sumber, Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan) |
| | 03 | Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan) |
| | 04 | Pengembangan Infrastruktur Pengawasan (Penyiapan Infrastruktur, Evaluasi Infrastruktur) |
| 09 | | Penanganan Pelanggaran |
| | 01 | Penyidikan (Wilayah Barat dan Timur) |
| | 02 | Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal (Wilayah Barat dan Timur) |
| | 03 | Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitasi PPNS Perikanan |
| | 04 | Pemantauan dan Evaluasi |
| 10 | | Tindak Karantina Ikan |
| | 01 | Pemeriksaan Ikan |
| | 02 | Penahanan |
| | 03 | Pengasingan |
| | 04 | Pengamatan |
| | 05 | Pengamanan |
| | 06 | Penolakan |
| | 07 | Pemusnahan |
| | 08 | Pelepasan/Pembebasan |
| 11 | | Tertib Operasional |
| | 01 | Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan |
| | 02 | Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran |
| | 03 | Permohonan Sertifikat |
| | 04 | Pemasukan Formulir |
| | 05 | Pemasukan Sertifikat |
| | 06 | Evaluasi dan Monitoring Sertifikat |

| | | | |
|----|-----------|--------------------------------|---|
| | | 07 | Surat Perintah |
| | | 08 | Rekomendasi |
| | 12 | Pencegahan Penyakit | |
| | | 01 | Penutupan Suatu Area |
| | | 02 | Pelanggaran Lalu Lintas Ikan |
| | 13 | Pengawasan Karantina Ikan | |
| | | 01 | Pengawasan Peraturan Perkarantinaan |
| | | 02 | Pengawasan Pelaksanaan Operasional |
| | 14 | Instalasi | |
| | | 01 | Instalasi Karantina Sementara |
| | | 02 | Lokasi Karantina |
| TN | Pertanian | | |
| | 01 | Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 01 | Pembibitan Ternak |
| | | 01 | Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar |
| | | 02 | Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil |
| | | 03 | Produksi Bibit Ternak Unggas |
| | | 04 | Produksi Bibit Aneka Ternak |
| | | 05 | Penilaian Bibit Ternak |
| | | 06 | Pelepasan Bibit Ternak |
| | | 07 | Sertifikasi Bibit Ternak |
| | | 08 | Pengawasan Mutu Bibit Ternak |
| | | 09 | Analisis Pengembangan Bibit Ternak |
| | | 10 | Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak |
| | | 11 | Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran |
| | | 02 | Pakan Ternak |
| | | 01 | Bahan Pakan Asal Hewan |
| | | 02 | Bahan Pakan Asal Tumbuhan |
| | | 03 | Budidaya Pakan Hijau |
| | | 04 | Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak |
| | | 05 | Produk Pakan Olahan |
| | | 06 | Pengolahan Pakan Olahan |
| | | 07 | Sertifikasi Pakan |
| | | 08 | Pengawasan Pakan |

| | | | |
|--|----|--|---|
| | | 09 | Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran |
| | 03 | Budidaya Ternak | |
| | | 01 | Ternak Sapi dan Kerbau Potong |
| | | 02 | Ternak Kambing dan Domba Potong |
| | | 03 | Ternak Sapi dan Kerbau Perah |
| | | 04 | Ternak Kambing Perah |
| | | 05 | Ternak Unggas |
| | | 06 | Aneka Ternak dan <i>Monogastric</i> |
| | | 07 | Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga (LM3) |
| | | 08 | Sarjana Membangun Desa (SMD) |
| | 04 | Kesehatan Hewan | |
| | | 01 | Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner |
| | | 02 | Penyidikan Penyakit Hewan |
| | | 03 | Pencegahan Penyakit Hewan |
| | | 04 | Pemberantasan Penyakit Hewan |
| | | 05 | Perlindungan Hewan dengan Analisis Risiko Penyakit Eksotik |
| | | 06 | Perlindungan Hewan dengan Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan |
| | | 07 | Kelembagaan Kesehatan Hewan |
| | | 08 | Sumber Daya Kesehatan Hewan |
| | | 09 | Laporan THL |
| | | 10 | Proposal Poskeswan |
| | | 11 | Mutu Obat Hewan |
| | | 12 | Peredaran Obat Hewan |
| | | 13 | Pendaftaran Obat Hewan |
| | | 14 | Rekomendasi Obat Hewan |
| | 05 | Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen | |
| | | 01 | Teknologi Pasca Panen |
| | | 02 | Sarana Pasca Panen |
| | | 03 | Penerapan Higiene Sanitasi |
| | | 04 | Inspeksi Higiene Sanitasi |
| | | 05 | Pengawasan Sanitasi |
| | | 06 | Pengawasan Keamanan Produk Hewan |
| | | 07 | Zoonosis |
| | | 08 | Kesejahteraan Hewan |

| | | | |
|--|----|------------|---|
| | | 09 | Pengujian Produk Hewan |
| | | 10 | Sertifikasi Produk Hewan |
| | | 11 | Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran |
| | 02 | Perkebunan | |
| | | 01 | Tanaman Semusim |
| | | 01 | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim |
| | | 02 | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim |
| | | 03 | Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim |
| | | 04 | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim |
| | | 05 | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim |
| | | 06 | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim |
| | | 07 | Pemberdayaan Tanaman Semusim |
| | | 08 | Kelembagaan Tanaman Semusim |
| | | 02 | Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 01 | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 02 | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 03 | Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 04 | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 05 | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 06 | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 07 | Pemberdayaan Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 08 | Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 03 | Tanaman Tahunan |
| | | 01 | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan |
| | | 02 | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan |
| | | 03 | Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan |
| | | 04 | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan |
| | | 05 | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan |
| | | 06 | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan |
| | | 07 | Pemberdayaan Tanaman Tahunan |
| | | 08 | Kelembagaan Tanaman Tahunan |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 04 | Perlindungan Perkebunan |
| | | 01 | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim |
| | | 02 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim |
| | | 03 | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 04 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar |
| | | 05 | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman |
| | | 06 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman |
| | | 07 | Dampak Perubahan Iklim |
| | | 08 | Pencegahan Kebakaran |
| | | 05 | Pasca Panen dan Pembinaan Usaha |
| | | 01 | Teknologi Pasca Panen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar |
| | | 02 | Penerapan Pasca Panen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar |
| | | 03 | Teknologi Pasca Panen Tanaman Tahunan |
| | | 04 | Penerapan Pasca Panen Tanaman Tahunan |
| | | 05 | Bimbingan Usaha Perkebunan |
| | | 06 | Bimbingan Perkebunan Berkelanjutan |
| | | 07 | Gangguan Usaha |
| | | 08 | Penanganan Konflik |
| | 03 | | Hortikultura |
| | | 01 | Perlindungan Hortikultura |
| | | 01 | Teknologi Perlindungan Tanaman Buah |
| | | 02 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| | | 03 | Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat |
| | | 04 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat |
| | | 05 | Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | 06 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Florikultura |
| | | 07 | Pengelolaan Dampak Iklim dan Lingkungan |
| | | 08 | Informasi dan Persyaratan Teknis |
| | 02 | | Perbenihan Hortikultura |
| | | 01 | Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas |
| | | 02 | Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas |
| | | 03 | Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas |
| | | 04 | Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas |
| | | 05 | Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas |
| | | 06 | Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas |
| | | 07 | Bahan Tugas Kedinasan Lain Berdasarkan Penugasan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis |
| | | 08 | Bahan Penyusunan dan Penyajian Laporan Kegiatan serta Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan |
| | | 09 | Bahan Penyiapan dan Pemeliharaan Dokumen Seksi Penilaian Varietas |
| | 04 | | Prasarana dan Sarana Pertanian |
| | | 01 | Perluasan dan Pengelolaan Lahan |
| | | 01 | Identifikasi Lahan untuk Basis Data Lahan |
| | | 02 | Analisis dan Penyajian Data Lahan |
| | | 03 | Identifikasi dan Analisis Pengendalian Lahan |
| | | 04 | Rekomendasi Teknis Pengendalian Lahan |
| | | 05 | Identifikasi dan Analisis Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan |
| | | 06 | Bimbingan Teknis Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan |
| | | 07 | Identifikasi dan Analisis Perluasan Kawasan Tanaman Pangan |
| | | 08 | Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perluasan Kawasan Tanaman Pangan |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | 09 | Identifikasi dan Analisis Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan |
| | | 10 | Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan |
| | | 02 | Pengelolaan Air Irigasi |
| | | 01 | Pengembangan Sumber Air Permukaan |
| | | 02 | Pengembangan Sumber Air Tanah |
| | | 03 | Pengembangan Jaringan |
| | | 04 | Optimasi Air |
| | | 05 | Iklim |
| | | 06 | Konservasi Air dan Lingkungan Hidup |
| | | 07 | Identifikasi Kelembagaan |
| | | 08 | Pengembangan Kelembagaan |
| | | 03 | Pembiayaan Pertanian |
| | | 01 | Data dan Informasi Pembiayaan Program |
| | | 02 | Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pembiayaan Program |
| | | 03 | Pembiayaan Syariah |
| | | 04 | Kerja Sama Pembiayaan Syariah |
| | | 05 | Materi dan Verifikasi Pembiayaan Agrobisnis |
| | | 06 | Fasilitasi dan Pemantauan Pembiayaan Agrobisnis |
| | | 07 | Kelembagaan Agrobisnis |
| | | 08 | Pemberdayaan Agrobisnis |
| | | 04 | Pupuk Pestisida |
| | | 01 | Pupuk Organik dan Pembenh Tanah Tanaman Pangan |
| | | 02 | Pupuk Organik dan Pembenh Tanah Hortikultura dan Perkebunan |
| | | 03 | Pupuk Anorganik Tanaman Pangan |
| | | 04 | Pupuk Anorganik Hortikultura dan Perkebunan |
| | | 05 | Pestisida Kimia |
| | | 06 | Pestisida Hayati |
| | | 07 | Pengawasan Pupuk |
| | | 08 | Pengawasan Pestisida |
| | | 05 | Alat dan Mesin Pertanian |
| | | 01 | Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 02 | Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan |

| | | | |
|--|----|----------------|---|
| | | | dan Peternakan |
| | | 03 | Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 04 | Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan |
| | | 05 | Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian |
| | | 06 | Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian |
| | 05 | Tanaman Pangan | |
| | | 01 | Perbenihan Tanaman Pangan |
| | | 01 | Penilaian Varietas |
| | | 02 | Pengawasan Mutu Benih |
| | | 03 | Produksi Benih Serelia Padi |
| | | 04 | Produksi Benih Serelia Non Padi |
| | | 05 | Produksi Benih Aneka Kacang |
| | | 06 | Produksi Benih Umbi |
| | | 07 | Kelembagaan Produksi |
| | | 08 | Kelembagaan Pengawasan |
| | | 02 | Budidaya Serelia |
| | | 01 | Padi Irigasi |
| | | 02 | Padi Rawa |
| | | 03 | Padi Tadah Hijau |
| | | 04 | Padi Tadah Lahan Kering |
| | | 05 | Intensifikasi Jagung |
| | | 06 | Pengembangan Jagung |
| | | 07 | Intensifikasi Serelia Lain |
| | | 08 | Pengembangan Serelia Lain |
| | | 03 | Budidaya Aneka Kacang dan Umbi |
| | | 01 | Intensifikasi Kedelai |
| | | 02 | Pengembangan Kedelai |
| | | 03 | Intensifikasi Ubi Kayu |
| | | 04 | Pengembangan Ubi Kayu |
| | | 05 | Intensifikasi Aneka Kacang |
| | | 06 | Pengembangan Aneka Kacang |
| | | 07 | Intensifikasi Aneka Umbi |
| | | 08 | Pengembangan Aneka Umbi |

| | | |
|--|----|---|
| | 04 | Perlindungan Tanaman Pangan |
| | 01 | Monitoring dan Analisis Data Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| | 02 | Evaluasi dan Pelaporan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| | 03 | Adaptasi Dampak Perubahan Iklim |
| | 04 | Mitigasi Dampak Perubahan Iklim |
| | 05 | Identifikasi Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| | 06 | Verifikasi Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| | 07 | Pemasyarakatan Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
| | 08 | Kelembagaan Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
| | 05 | Pasca Panen Tanaman Pangan |
| | 01 | Teknologi Pasca Panen Padi |
| | 02 | Sarana Pasca Panen Padi |
| | 03 | Teknologi Pasca Panen Jagung dan Serelia Lain |
| | 04 | Sarana Pasca Panen Jagung dan Serelia Lain |
| | 05 | Teknologi Pasca Panen Kedelai dan Aneka Kacang |
| | 06 | Sarana Pasca Panen Kedelai dan Aneka Kacang |
| | 07 | Teknologi Pasca Panen Aneka Umbi |
| | 08 | Sarana Pasca Panen Aneka Umbi |
| | 06 | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian |
| | 01 | Pengolahan Hasil Pertanian |
| | 01 | Tanaman Pangan Serelia |
| | 02 | Tanaman Pangan Aneka Kacang dan Aneka Umbi |
| | 03 | Tanaman Buah dan Sayur |
| | 04 | Tanaman Florikultura dan Tanaman Obat |
| | 05 | Tanaman Perkebunan Semusim |
| | 06 | Tanaman Perkebunan Tahunan |
| | 07 | Peternakan Ruminansia |
| | 08 | Peternakan Non Ruminansia |
| | 02 | Mutu dan Standarisasi |
| | 01 | Standarisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | 02 | Standarisasi Perkebunan dan Peternakan |

| | | | |
|--|--|----|---|
| | | 03 | Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 04 | Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Perkebunan dan Peternakan |
| | | 05 | Akreditasi dan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 06 | Akreditasi dan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan |
| | | 07 | Kerja Sama dan Harmonisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 08 | Kerja Sama dan Harmonisasi Perkebunan dan Peternakan |
| | | 03 | Pengembangan Usaha dan Investasi |
| | | 01 | Kemitraan |
| | | 02 | Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif |
| | | 03 | Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 04 | Investasi Perkebunan dan Peternakan |
| | | 05 | Daya Saing Promosi Dalam Negeri |
| | | 06 | Ekshibisi dan Ekspo Promosi Dalam Negeri |
| | | 07 | Daya Saing Promosi Luar Negeri |
| | | 08 | Ekshibisi dan Ekspo Promosi Luar Negeri |
| | | 04 | Pemasaran Domestik |
| | | 01 | Analisis Ekspor |
| | | 02 | Pengembangan Ekspor |
| | | 03 | Pemasaran Bilateral |
| | | 04 | Pemasaran Regional |
| | | 05 | Pemasaran Multilateral |
| | | 06 | Kerja Sama Komoditi Regional |
| | | 07 | Kerja Sama Komoditi Multilateral dan Bilateral |
| | | 07 | Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Pertanian |
| | | 01 | Administrasi |
| | | 01 | Rencana Kerja |
| | | 02 | TOR/Proposal |
| | | 03 | Pembentukan Tim Kerja |
| | | 04 | Surat Menyurat |
| | | 02 | Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan |
| | | 01 | Hasil Penelitian dan Pengembangan |
| | | 02 | Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi |

| | | | |
|--|----|---|---|
| | 03 | Diseminasi | |
| | 04 | Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian | |
| | | 01 | Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Memlot, Seminat Lokakarya, Temu Karya, <i>Workshop</i> |
| | | 02 | Jurnal, Buletin, Monografi, Pro Siding, dan Publikasi Lainnya |
| | 05 | Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan | |
| | 06 | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan | |
| | 07 | Data Penelitian dan Pengembangan | |
| | 08 | Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan | |
| | 08 | Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) | |
| | | 01 | Hak Cipta |
| | | 02 | Hak Paten Sederhana |
| | | 03 | Hak Paten Biasa |
| | | 04 | Hak Merek |
| | | 05 | Pendaftaran Varietas Tanaman |
| | | 06 | Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim |
| | | 07 | Permohonan HAK PVTT Tanaman Tahunan |
| | | 08 | Permohonan HKI yang Ditolak |
| | | 09 | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan |
| | | 10 | Data Penelitian dan Pengembangan |
| | 09 | Ketahanan Pangan | |
| | | 01 | Ketersediaan dan Kerawanan Pangan |
| | | | 01 Analisis Ketersediaan Pangan |
| | | | 02 Sumber Daya Pangan |
| | | | 03 Analisis Akses Pangan |
| | | | 04 Pengembangan Akses Pangan |
| | | | 05 Analisis Kerawanan Pangan |
| | | | 06 Penanggulangan Kerawanan Pangan |
| | | 02 | Distribusi dan Cadangan Pangan |
| | | | 01 Analisis Distribusi Pangan |
| | | | 02 Kelembagaan Distribusi Pangan |
| | | | 03 Analisis Harga Pangan Produsen |
| | | | 04 Analisis Harga Pangan Konsumen |
| | | | 05 Cadangan Pangan Pemerintah |
| | | | 06 Cadangan Pangan Masyarakat |
| | | 03 | Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan |

| | | | |
|--|----|----|---|
| | | 01 | Pola Konsumsi Pangan |
| | | 02 | Kebutuhan Konsumsi Pangan |
| | | 03 | Pengembangan Pangan Lokal |
| | | 04 | Promosi Keanekaragaman Pangan |
| | | 05 | Pengawasan Keamanan Pangan Segar |
| | | 06 | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar |
| | | 04 | Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan |
| | | 01 | Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan |
| | | 02 | Dewan Ketahanan Pangan |
| | | 03 | SOLID |
| | | 04 | Penghargaan Ketahanan Pangan |
| | 10 | | Karantina Pertanian |
| | | 01 | Data Karantina Hewan |
| | | 01 | Data Penyakit Hewan |
| | | 02 | Teknik dan Metode |
| | | 03 | Data Kualitatif dan Kuantitatif |
| | | 04 | Data Sarana/Laboratorium/Lokasi |
| | | 05 | Laporan |
| | | 02 | Data Karantina Tumbuhan |
| | | 01 | Data Penyakit Tumbuhan |
| | | 02 | Teknik dan Metode |
| | | 03 | Data Kualitatif dan Kuantitatif |
| | | 04 | Data Sarana/Laboratorium/Lokasi |
| | | 05 | Laporan |
| | | 03 | Inventarisasi Penyakit Hewan |
| | | 01 | Survei |
| | | 02 | Determinasi Penyakit/Daerah Pencar |
| | | 03 | Pengamatan Penyakit di Laboratorium/Kandang Uji Diagnosa |
| | | 04 | Inventarisasi Penyakit Tumbuhan |
| | | 01 | Survei |
| | | 02 | Determinasi Penyakit/Daerah Pencar |
| | | 03 | Pengamatan Penyakit di Laboratorium/Kandang Uji Diagnosa |
| | | 05 | Tindakan Karantina Hewan |
| | | 01 | Pemeriksaan |

| | | | |
|--|----|---------------------------------------|---|
| | | 02 | Pengasingan |
| | | 03 | Pengamatan |
| | | 04 | Perlakuan |
| | | 05 | Penahanan |
| | | 06 | Penolakan |
| | | 07 | Pemusnahan |
| | | 08 | Pembebasan |
| | 06 | Tindakan Karantina Tumbuhan | |
| | | 01 | Pemeriksaan |
| | | 02 | Pengasingan |
| | | 03 | Pengamatan |
| | | 04 | Perlakuan |
| | | 05 | Penahanan |
| | | 06 | Penolakan |
| | | 07 | Pemusnahan |
| | | 08 | Pembebasan |
| | 07 | Sertifikasi Pelepasan Karantina | |
| | | 01 | Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan |
| | | 02 | Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan |
| | 08 | Pemberantasan Penyakit Hewan | |
| | | 01 | Penutupan Satu Daerah |
| | | 02 | Pembatasan Gerak HPHK |
| | | 03 | Pembinaan HPHK |
| | 09 | Pemberantasan Penyakit Tumbuhan | |
| | | 01 | Penutupan Satu Daerah |
| | | 02 | Pembatasan Gerak OPHK |
| | | 03 | Pembinaan OPHK |
| | 10 | Keamanan Pangan | |
| | | 01 | Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan) |
| | | 02 | Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) |
| | 11 | Tertib Operasional Karantina Hewan | |
| | | 01 | Penelitian Data Laporan Operasional |
| | | 02 | Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS) |
| | 12 | Tertib Operasional Karantina Tumbuhan | |
| | | 01 | Penelitian Data Laporan Operasional |
| | | 02 | Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS) |

| | | | |
|--|----|---|---|
| | 11 | Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian | |
| | | 01 | Perlindungan Varietas Tanaman |
| | | 01 | Permohonan Perlindungan Varietas Tanaman |
| | | 02 | Pengujian Perlindungan Varietas Tanaman |
| | | 03 | Pendaftaran Varietas Tumbuhan Sumber Daya Genetik Tanaman |
| | | 02 | Pelayanan Perizinan Pertanian |
| | | 01 | Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian) |
| | | 02 | Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan) |
| | | 03 | Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging dan Jeroan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak) |
| | | 03 | Pelayanan Hukum |
| | | 01 | Sertifikasi |
| | | 02 | Pertimbangan Hukum |
| | 12 | Bimbingan Teknis | |
| | 13 | Evaluasi | |

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027